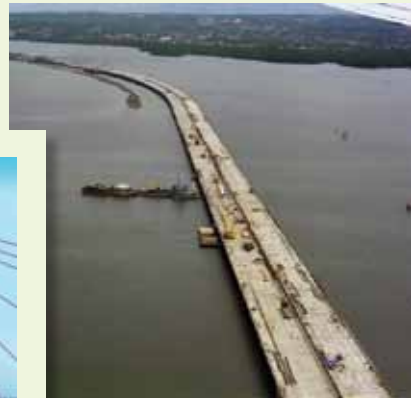




BIS PU 2013



BUKU INFORMASI STATISTIK

PEKERJAAN UMUM 2013



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGOLAHAN DATA (PUSDATA)

KATA PENGANTAR

Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi statistik infrastruktur pekerjaan umum dalam berbagai bentuk penyajian dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum sangat diperlukan. Oleh sebab itu disusun Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) sebagai output dari pekerjaan Penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Data dan informasi yang disajikan diupayakan berupa data terpilah yang berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kementerian PU, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dalam Penyusunan BIS-PU ini disajikan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum tingkat nasional yang dirinci menurut provinsi atau data agregat per provinsi.

Ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pusdata sebagai Pembina/Pengarah dalam kegiatan ini, serta kepada Tim Pelaksana Teknis kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Informasi Literal Pusdata. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada personil-personil kerabat informasi di Sub Direktorat/Bidang Data dan Informasi Pusat, Balai dan Dinas Pekerjaan Umum di daerah, Badan Pusat Statistik pusat dan daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah tingkat provinsi, serta instansi terkait lainnya yang telah memberikan perhatian dan dukungan, baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif demi terwujudnya penyajian Buku Informasi Infrastruktur Pekerjaan Umum ini.

Tim Penyusun menyadari bahwa di dalam penyusunan BIS-PU ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pengguna buku ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Tujuan.....	I-2
 BAB II : GAMBARAN UMUM INDONESIA	
A. Geografi Wilayah.....	II-1
B. Administrasi Wilayah.....	II-2
C. Demografi Wilayah.....	II-5
D. Ekonomi Wilayah.....	II-8
E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.....	II-17
 BAB III : STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	
A. Sumber Air.....	III-1
A.1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai.....	III-1
A.2. Danau/Situ	III-6
B. Bangunan Air.....	III-8
B.1. Bendungan/Waduk.....	III-8
B.2. Bendung.....	III-10
B.3. Embung dan Embung Potensi.....	III-12
C. Daerah Irigasi.....	III-15
D. Daerah Rawa.....	III-20

	E. Bangunan Pengaman Pantai.....	III-26
	F. Analisis Statistik Infrastruktur Sumber Daya Air.....	III-27
BAB IV	: STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA	
	A. Jalan Nasional.....	IV-1
	B. Jalan Strategis Nasional.....	IV-6
	C. Jalan Tol.....	IV-7
	D. Jembatan.....	IV-12
	E. Analisis Statistik Infrastruktur Jalan	IV-18
BAB V	: STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA	
	A. Sistem Penyediaan Air Minum.....	V-1
	B. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.....	V-8
	C. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).....	V-10
	D. Kawasan Agropolitan dan Minapolitan.....	V-11
	E. Rumah Susun Sederhana Sewa.....	V-20
	F. Analisis Statistik Infrastruktur Cipta Karya	V-24
BAB VI	: PENATAAN RUANG.....	VI-1
BAB VII	: STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN ISU GENDER	
	A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU.....	VII-1
	B. Isu Gender.....	VII-10
BAB VIII	: PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

2.1.	Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012	II-1
2.2.	Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa di Indonesia Tahun 2010 – 2012	II-3
2.3.	Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012	II-6
2.4.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2012 ...	II-7
2.5.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2009 – 2012	II-9
2.6.	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2009 – 2012	II-11
2.7.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2009 – 2012	II-11
2.8.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (miliar rupiah) Tahun 2009 – 2012	II-13
2.9.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi (miliar rupiah) Tahun 2009 – 2011	II-14
2.10.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi (miliar rupiah) Tahun 2008 – 2011	II-15
2.11.	Perkembangan Alokasi Dana Kementerian Pekerjaan Umum Dalam APBN Indonesia (milyar rupiah)	II-17
2.12.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)	II-18
2.13.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)	II-19
2.14.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)	II-20

2.15.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)	II-21
2.16.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)	II-22
2.17.	Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum Menurut Provinsi Tahun 2012 – 2013 (milyar rupiah)	II-23
3.1.	Wilayah Sungai Lintas Negara	III-2
3.2.	Wilayah Sungai Lintas Provinsi	III-2
3.3.	Wilayah Sungai Strategis Nasional	III-3
3.4.	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	III-4
3.5.	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota	III-6
3.6.	Jumlah Danau di Indonesia Menurut Provinsi	III-7
3.7.	Rekapitulasi Bendungan di Indonesia Milik PU Menurut Provinsi (Kriteria Menurut PP Nomor 37 Tahun 2010)	III-9
3.8.	Jumlah Bendung di Indonesia Menurut Provinsi	III-11
3.9.	Jumlah Embung di Indonesia Menurut Provinsi	III-13
3.10.	Jumlah Embung Potensi di Indonesia Menurut Provinsi	III-14
3.11.	Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat	III-16
3.12.	Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi	III-18
3.13.	Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	III-19
3.14a.	Potensi Daerah Rawa dan Pemanfaatannya di Indonesia	III-22
3.14b.	Potensi Daerah Rawa dan Pemanfaatannya di Indonesia	III-23
3.15.	Panjang Bangunan Pengaman Pantai di Indonesia Menurut Provinsi ..	III-27
3.16.	Gambaran Umum Areal Sawah di Indonesia	III-29
3.17.	Dukungan Jaringan Irigasi Terhadap Produksi Padi Nasional	III-30

4.1.	Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester ke-1 Tahun 2013	IV-2
4.2.	Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester ke-1 Tahun 2013	IV-3
4.3.	Panjang dan Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Kemantapan Jalan Semester ke-1 Tahun 2013	IV-5
4.4.	Jalan Strategis Nasional Rencana	IV-6
4.5.	Rencana Umum Jaringan Jalan Tol di Indonesia (km)	IV-8
4.6.	Jalan Tol di Indonesia yang Sudah Beroperasi (km)	IV-9
4.7.	Rencana Pembangunan Jalan Tol 2010 – 2014 (Trans Jawa)	IV-10
4.8.	Rencana Pembangunan Jalan Tol 2010 – 2014 (Non Trans Jawa)	IV-11
4.9.	Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional BMS Semester 2 Tahun 2012 (unit)	IV-13
4.10.	Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional BMS Semester 2 Tahun 2012 (m)	IV-14
4.11.	Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional BMS Semester 2 Tahun 2012 (%)	IV-16
4.12.	Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional BMS Semester 2 Tahun 2012 (%)	IV-17
4.13.	Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2011	IV-20
4.14.	Persentase Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2011	IV-20
4.15.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Pulau Besar	IV-22
4.16.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Pulau Besar ...	IV-23
4.17.	Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Provinsi	IV-24

4.18.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi	IV-26
4.19.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi	IV-27
5.1a.	Penyelenggaraan SPAM PDAM di Indonesia	V-2
5.1b.	Penyelenggaraan SPAM PDAM di Indonesia	V-3
5.2.	Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2012	V-5
5.3.	Hasil Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2010, 2011 dan 2012	V-6
5.4.	Jumlah Fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum Menurut Provinsi dan Kapasitasnya	V-7
5.5.	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Indonesia	V-9
5.6.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Indonesia Menurut Provinsi	V-11
5.7.	Pencapaian Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Tahun 2002 – 2011	V-12
5.8.	Pencapaian Kawasan Agropolitan Tahun 2002 – 2011	V-13
5.9.	Pencapaian Kawasan Minapolitan Tahun 2005 – 2011	V-14
5.10.	Pencapaian Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun Anggaran 2003 – 2012	V-15
5.11.	Pencapaian Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun Anggaran 2005 – 2012	V-19
5.12.	Pembangunan Rusunawa di Indonesia Tahun 2003 – 2012	V-21
5.13.	Jumlah Rusunawa Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2003 – 2012 .	V-23
5.14.	Layanan PDAM di Indonesia	V-25
6.1.	Status Perda RTRW di Indonesia September 2013	VI-3
6.2a.	Status Perda RTRW di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2013	VI-3
6.2b.	Status Perda RTRW di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2013	VI-4

6.3.	Rencana Tata Ruang Pulau	VI-6
6.4.	Kawasan Lindung Nasional	VI-14
6.5.	Kawasan Andalan di Indonesia	VI-23
6.6.	Kawasan Strategis Nasional	VI-29
7.1.	Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2011 – 2013	VII-2
7.2.	Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2011 – 2013	VII-3
7.3.	Jumlah PNS Kementerian PU Menurut Usia dan Golongan Kepangkatan Status : 1 April 2013	VII-5
7.4.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Status : 1 April 2013	VII-6
7.5.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Status : 1 April 2013	VII-7
7.6.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2012 dan 2013	VII-8
7.7.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2012 dan 2013	VII-9
7.8.	Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2011 – 2013	VII-15
7.9.	Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2011 – 2013	VII-16
7.10.	Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 1 April 2013	VII-17
7.11a.	Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 1 April 2013	VII-20
7.11b.	Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 1 April 2013	VII-21

DAFTAR GAMBAR

2.1.	Jumlah Kabupaten di Indonesia Tahun 2010 – 2012	II-4
2.2.	Jumlah Kota di Indonesia Tahun 2010 – 2012	II-4
2.3.	Jumlah Kecamatan di Indonesia Tahun 2010 – 2012	II-5
2.4.	Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2010 – 2012	II-5
2.5.	Persentase Penduduk Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2012 ...	II-8
2.6.	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011	II-10
2.7.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007 – 2011 (%)	II-12
2.8.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2009 – 2011..	II-12
3.1.	Luas Daerah Rawa di Indonesia	III-21
3.2.	Pohon Rawa Nasional	III-21
3.3.	Grafik Luas Potensi Daerah Rawa di Indonesia Berdasarkan Jenisnya (ha)	III-25
3.4.	Grafik Luas Potensi Daerah Rawa di Indonesia Berdasarkan Reklamasi dan Jenisnya (ha)	III-25
3.5.	Potensi Irigasi di Indonesia	III-28
3.6.	Luas Daerah Irigasi di Indonesia Berdasarkan Kewenangan (ha)	III-29
3.7.	Gambaran Umum Areal Sawah di Indonesia	III-30
3.8.	Dukungan Jaringan Irigasi Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2012	III-31
4.1.	Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester ke-1 Tahun 2013 (km)	IV-3
4.2.	Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester ke-1 Tahun 2013 (%)	IV-4

4.3.	Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional BMS Semester 2 Tahun 2012 (unit)	IV-15
4.4.	Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional BMS Semester 2 Tahun 2012 (m)	IV-15
4.5.	Persentase Jumlah dan Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional Berdasarkan Kemantapannya BMS Semester 2 Tahun 2012 (%)	IV-18
4.6.	Persentase Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Pulau Besar...	IV-21
4.7.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jalan Menurut Pulau Besar	IV-23
4.8.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jalan Nasional Menurut Pulau Besar	IV-23
4.9.	Rasio Luas Wilayah terhadap Jalan Menurut Pulau Besar	IV-23
4.10.	Rasio Luas Wilayah terhadap Jalan Nasional Menurut Pulau Besar	IV-23
4.11.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Jalan Menurut Pulau Besar	IV-24
4.12.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Jalan Nasional Menurut Pulau Besar	IV-24
4.13.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi	IV-28
4.14.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi	IV-28
4.15.	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi	IV-29
4.16.	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi	IV-29
4.17.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi	IV-30
4.18.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi	IV-30

5.1.	Persentase Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2012	V-6
5.2.	Perkembangan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2010, 2011 dan 2012	V-7
5.3.	Pencapaian Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Tahun 2002 – 2011	V-13
5.4.	Pencapaian Kawasan Agropolitan Tahun 2002 – 2011	V-14
5.5.	Pencapaian Kawasan Minapolitan Tahun 2005 – 2011	V-15
5.6.	Pembangunan Rusunawa di Indonesia Tahun 2003 – 2012 (twin block)	V-22
5.7.	Pembangunan Rusunawa di Indonesia Tahun 2003 – 2012 (unit)	V-22
5.8.	Cakupan Pelayanan PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)	V-26
5.9.	Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)	V-27
5.10.	Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (ltr/dtk per 1000 pelanggan)	V-28
7.1.	Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2008 – 2013	VII-2
7.2.	Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2013	VII-4
7.3.	Persentase PNS Kementerian PU Menurut Usia Tahun 2013	VII-5
7.4.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2013	VII-6
7.5.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2013	VII-7
7.6.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2012 dan 2013	VII-9
7.7.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2013	VII-10
7.8.	Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2008 – 2013	VII-12
7.9.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-13
7.10.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-13
7.11.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan	

Tahun 2013	VII-14
7.12. Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2013	VII-14
7.13. Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2008 – 2013	VII-16
7.14. Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2008 – 2013	VII-17
7.15. Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-18
7.16. Jumlah Pejabat Eselon I Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-18
7.17. Jumlah Pejabat Eselon II Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-19
7.18. Jumlah Pejabat Eselon III Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-19
7.19. Jumlah Pejabat Eselon IV Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-20
7.20. Persentase Pejabat (Eselon I – Eselon IV) Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013	VII-21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum yang berwawasan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah bagian dari pendukung program sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang pekerjaan umum tersebut perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan umum program, desain, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, serta pemanfaatan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan fungsi Pusat Pengolahan Data (Pusdata) yang salah satunya sebagai unit pengelola serta penyedia data spasial dan literal, maka Unit Kerja Eselon III di PUSDATA yaitu Balai Informasi Literal mempunyai tugas untuk menyediakan data infrastruktur ke-PU-an beserta pendukungnya yang dituangkan dalam Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU). BIS-PU diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan ke-PU-an secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana yang telah ada dapat dilaksanakan. Dengan adanya dukungan data terpilah, pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana/infrastruktur bidang Pekerjaan Umum tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan per wilayah, dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata dan adil.

Sebagai salah satu instansi yang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman. Keberadaan infrastruktur tersebut telah dirasakan manfaatnya dalam melayani kebutuhan masyarakat, meskipun masih ada

beberapa infrastruktur yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan kapasitas, dan ada pula yang masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan.

Infrastruktur yang dibangun sangat beragam dari skala besar, menengah hingga kecil, dan keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu inventarisasi data infrastruktur pekerjaan umum menjadi suatu hal yang amat penting. Dari data tersebut akan dapat diperoleh suatu informasi dan gambaran mengenai karakteristik dan keberadaan infrastruktur pekerjaan umum.

Keberadaan infrastruktur mutlak diperlukan oleh setiap negara. Infrastruktur juga dijadikan salah satu indikator dalam menentukan indeks persaingan global suatu negara. Pemerintah menyadari pentingnya penyediaan infrastruktur yang baik karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan mendorong berkembangnya sektor ekonomi lain seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri, dan lain-lain. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

B. Tujuan

Penyusunan Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) ini bertujuan untuk menyajikan data dan informasi statistik bidang Pekerjaan Umum serta informasi sektor-sektor terkait lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pimpinan dan unit-unit organisasi dan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi lainnya, serta untuk masyarakat pengguna informasi.

BIS-PU secara garis besar memberikan gambaran umum tentang hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum yang dilengkapi dengan data statistik yang terdiri dari data statistik bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan data bidang/sektor terkait lainnya yang sedapat mungkin terpilah menurut gender. Selain itu di dalam BIS-PU disajikan analisis statistik bidang pekerjaan umum yang dihubungkan dengan data bidang/sektor terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM INDONESIA

A. Geografi Wilayah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km², terdiri dari 1,9 juta km² daratan dan 3,3 juta km² lautan. Lima pulau besar di Indonesia adalah Sumatera dengan luas 480.793,28 km², Jawa 129.438,28 km², Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) 544.150,07 km², Sulawesi 188.522,36 km², dan Papua 416.060,32 km².

Letak geografis Indonesia berada di antara 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Jika dibentangkan, maka wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Di Indonesia terdapat 3 sistem gunung api, yaitu Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik dan Sirkum Lingkar Australia. Karena faktor geografisnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi alam sangat besar sekaligus rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami.

Tabel 2.1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2012

Provinsi	Ibukota Provinsi	Luas (km ²) ¹	Persen	Jumlah Pulau ²
1	2	3	4	5
Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,03	663
Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,82	419
Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,20	391
Riau	Pekanbaru	87.023,66	4,55	139
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43	2.408
Jambi	Jambi	50.058,16	2,62	19
Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,79	53

Provinsi	Ibukota Provinsi	Luas (km ²) ¹	Persen	Jumlah Pulau ²
1	2	3	4	5
Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	950
Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	47
Lampung	Bandar Lampung	34.623,80	1,81	188
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	218
Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85	131
Banten	Serang	9.662,92	0,51	131
Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,72	296
DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16	23
Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,50	287
Bali	Denpasar	5.780,06	0,30	85
Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97	864
Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,55	1.192
Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,71	339
Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153.564,50	8,04	32
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744,23	2,03	320
Kalimantan Timur	Samarinda	204.534,34	10,70	370
Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72	668
Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59	136
Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,24	750
Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	2,44	295
Sulawesi Barat ³	Mamuju	16.787,18	0,88	-
Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99	651
Maluku	Ambon	46.914,03	2,46	1.422
Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,67	1.474
Papua	Jayapura	319.036,05	16,70	598
Papua Barat	Manokwari	97.024,27	5,08	1.945
Indonesia	Jakarta	1.910.931,32	100,00	17.504

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri

Statistik Indonesia 2012, BPS RI

Catatan : ¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011

² Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2004

³ Jumlah Pulau Sulawesi Selatan termasuk dengan Sulawesi Barat

B. Administrasi Wilayah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Batas-batas NKRI adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Filipina, Malaysia, Singapura, India dan Samudera Pasifik.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Tiap provinsi di Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur dan memiliki DPRD Provinsi. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan memiliki DPRD Kabupaten. Sementara kota dipimpin oleh seorang walikota dan memiliki DPRD Kota. Namun di Jakarta tidak terdapat DPRD Kabupaten atau Kota karena kabupaten dan kota di DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan administratif yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri. Sementara 4 provinsi dengan status istimewa dan khusus lain memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 33 provinsi (belum termasuk Provinsi Kalimantan Utara yang terbentuk pada Oktober 2012). Sampai pertengahan Tahun 2012, di Indonesia terdapat 399 kabupaten, 98 kota, 6.793 kecamatan dan 79.075 desa.

Tabel 2.2. Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa di Indonesia
Tahun 2010 – 2012

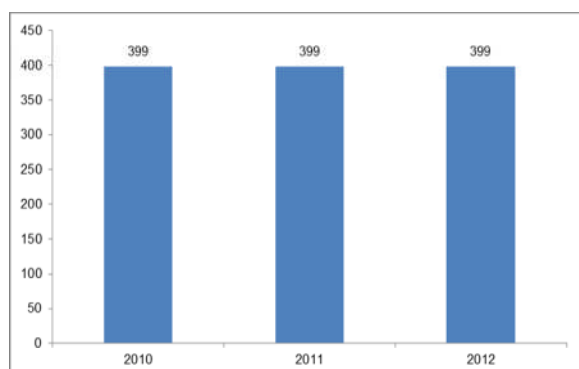
Provinsi	2010				2011				2012			
	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec *	Desa *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aceh	18	5	280	6.459	18	5	287	6.491	18	5	287	6.491
Sumatera Utara	25	8	419	5.770	25	8	421	5.872	25	8	422	5.876
Sumatera Barat	12	7	176	1.014	12	7	176	1.032	12	7	176	1.033
Riau	10	2	153	1.645	10	2	157	1.664	10	2	157	1.736
Kepulauan Riau	5	2	59	353	5	2	59	371	5	2	59	371
Jambi	9	2	131	1.371	9	2	131	1.480	9	2	131	1.484
Sumatera Selatan	11	4	220	3.165	11	4	223	3.186	11	4	225	3.205
Kepulauan Bangka Belitung	6	1	44	361	6	1	46	373	6	1	46	380
Bengkulu	9	1	123	1.507	9	1	124	1.508	9	1	124	1.508
Lampung	12	2	214	2.463	12	2	214	2.463	12	2	214	2.511
DKI Jakarta	1	5	44	267	1	5	44	267	1	5	44	267
Jawa Barat	17	9	625	5.891	17	9	626	5.918	17	9	626	5.941
Banten	4	4	154	1.535	4	4	154	1.535	4	4	154	1.545
Jawa Tengah	29	6	573	8.577	29	6	573	8.578	29	6	573	8.578

Provinsi	2010				2011				2012			
	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec *	Desa *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DI Yogyakarta	4	1	78	438	4	1	78	438	4	1	78	438
Jawa Timur	29	9	662	8.506	29	9	662	8.503	29	9	662	8.505
Bali	8	1	57	715	8	1	57	716	8	1	57	716
Nusa Tenggara Barat	8	2	116	989	8	2	116	1.117	8	2	116	1.122
Nusa Tenggara Timur	20	1	289	2.874	20	1	293	2.918	20	1	293	3.052
Kalimantan Barat	12	2	175	1.894	12	2	176	1.967	12	2	176	1.970
Kalimantan Tengah	13	1	125	1.514	13	1	130	1.528	13	1	132	1.528
Kalimantan Selatan	11	2	151	1.985	11	2	151	2.000	11	2	151	2.000
Kalimantan Timur	10	4	136	1.465	10	4	146	1.465	10	4	146	1.469
Sulawesi Utara	11	4	159	1.673	11	4	159	1.691	11	4	159	1.733
Gorontalo	5	1	66	619	5	1	70	723	5	1	75	732
Sulawesi Tengah	10	1	155	1.815	10	1	161	1.848	10	1	166	1.903
Sulawesi Selatan	21	3	304	2.976	21	3	304	2.982	21	3	304	3.015
Sulawesi Barat	5	0	69	603	5	0	69	641	5	0	69	645
Sulawesi Tenggara	10	2	201	2.088	10	2	204	2.156	10	2	205	2.159
Maluku	9	2	77	964	9	2	86	999	9	2	90	1.027
Maluku Utara	7	2	112	1.063	7	2	112	1.071	7	2	112	1.075
Papua	28	1	385	3.579	28	1	389	3.619	28	1	389	3.619
Papua Barat	10	1	167	1.410	10	1	175	1.438	10	1	175	1.441
Indonesia	399	98	6.699	77.548	399	98	6.773	78.558	399	98	6.793	79.075

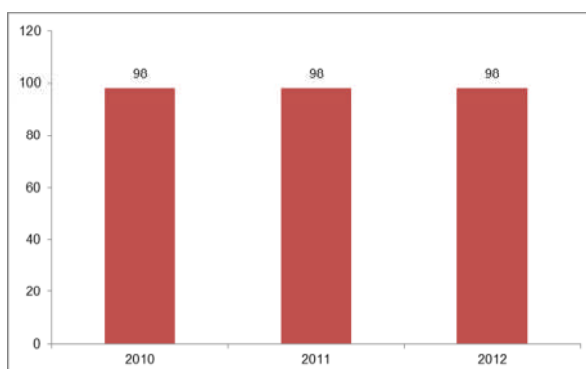
Sumber: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
Statistik Indonesia 2012, BPS RI

Catatan: * Berdasarkan Laporan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan 30 Juni 2012

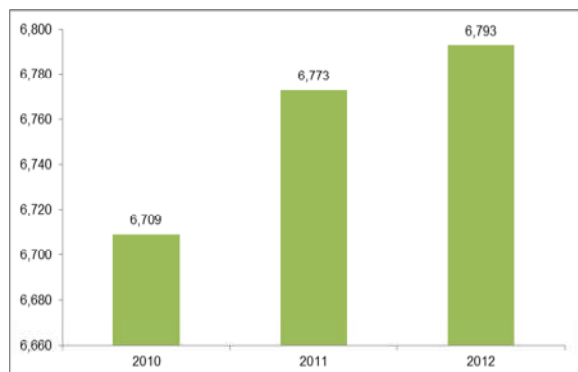
Gambar 2.1. Jumlah Kabupaten di Indonesia
Tahun 2010 – 2012



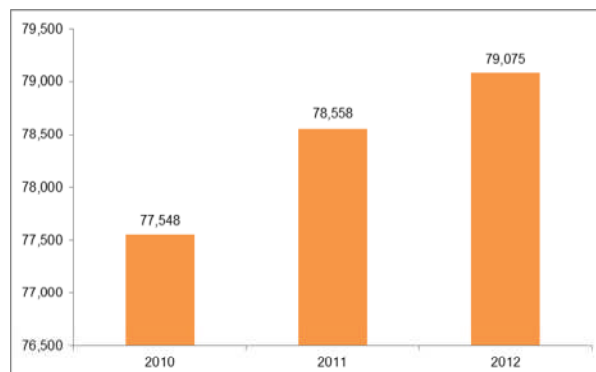
Gambar 2.2. Jumlah Kota di Indonesia
Tahun 2010 – 2012



Gambar 2.3. Jumlah Kecamatan di Indonesia Tahun 2010 – 2012



Gambar 2.4. Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2010 – 2012



C. Demografi Wilayah

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah bangsa Melayu Austronesia yang menempati hampir seluruh wilayah Indonesia di bagian barat dan tengah. Terdapat juga kelompok suku-suku Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu ada pula penduduk pendatang yang jumlahnya tidak terlalu banyak, seperti Tionghoa, India, dan Arab. Penduduk pendatang sebagian besar masuk ke wilayah nusantara melalui jalur perdagangan, kemudian menetap menjadi bagian dari penduduk Indonesia.

Berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan Tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia adalah 251,86 juta jiwa yang terdiri dari 129,56 juta atau 51,44% penduduk laki-laki dan 122,29 juta atau 48,56% penduduk perempuan.

Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebesar 54,39%, kemudian Pulau Sumatera 23,51%. Pulau Jawa menjadi salah satu daerah terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 132,76 juta jiwa dan kepadatannya mencapai 1.025 jiwa per km². Selanjutnya persentase penduduk Indonesia untuk pulau-pulau lain berturut-turut adalah Sulawesi 8,08%, Kalimantan 6,41%, Nusa Tenggara 4,27%, Papua dan Papua Barat 2,11%, serta Maluku dan Maluku Utara 1,24%. Gambar 2.5. menunjukkan distribusi penduduk Indonesia menurut pulau-pulau besar.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012

Provinsi	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
Aceh	2.541.235	2.473.999	5.015.234
Sumatera Utara	7.691.902	7.535.817	15.227.719
Sumatera Barat	2.845.316	2.772.661	5.617.977
Riau	3.347.886	3.108.436	6.456.322
Jambi	1.825.407	1.706.719	3.532.126
Sumatera Selatan	4.380.993	4.147.726	8.528.719
Bengkulu	1.030.247	966.291	1.996.538
Lampung	4.976.172	4.610.320	9.586.492
Kepulauan Bangka Belitung	697.297	651.902	1.349.199
Kepulauan Riau	977.733	917.857	1.895.590
DKI Jakarta	4.944.914	4.658.503	9.603.417
Jawa Barat	20.888.318	19.021.956	39.910.274
Jawa Tengah	16.873.505	15.704.852	32.578.357
DI Yogyakarta	1.763.015	1.695.014	3.458.029
Jawa Timur	18.927.259	18.342.626	37.269.885
Banten	5.206.766	4.732.054	9.938.820
Bali	2.129.385	2.098.320	4.227.705
Nusa Tenggara Barat	2.705.029	2.693.544	5.398.573
Nusa Tenggara Timur	2.684.322	2.659.580	5.343.902
Kalimantan Barat	2.681.647	2.511.625	5.193.272
Kalimantan Tengah	1.381.383	1.258.687	2.640.070
Kalimantan Selatan	2.127.184	2.018.659	4.145.843
Kalimantan Timur	2.207.672	1.947.282	4.154.954
Sulawesi Utara	1.343.564	1.273.591	2.617.155
Sulawesi Tengah	1.511.676	1.423.667	2.935.343
Sulawesi Selatan	4.658.314	4.709.793	9.368.107
Sulawesi Tenggara	1.374.791	1.316.832	2.691.623
Gorontalo	578.496	569.032	1.147.528
Sulawesi Barat	811.669	777.493	1.589.162
Maluku	949.405	916.843	1.866.248
Maluku Utara	647.733	610.621	1.258.354
Papua	2.274.198	1.950.034	4.224.232
Papua Barat	579.030	512.141	1.091.171
Indonesia	129.563.463	122.294.477	251.857.940

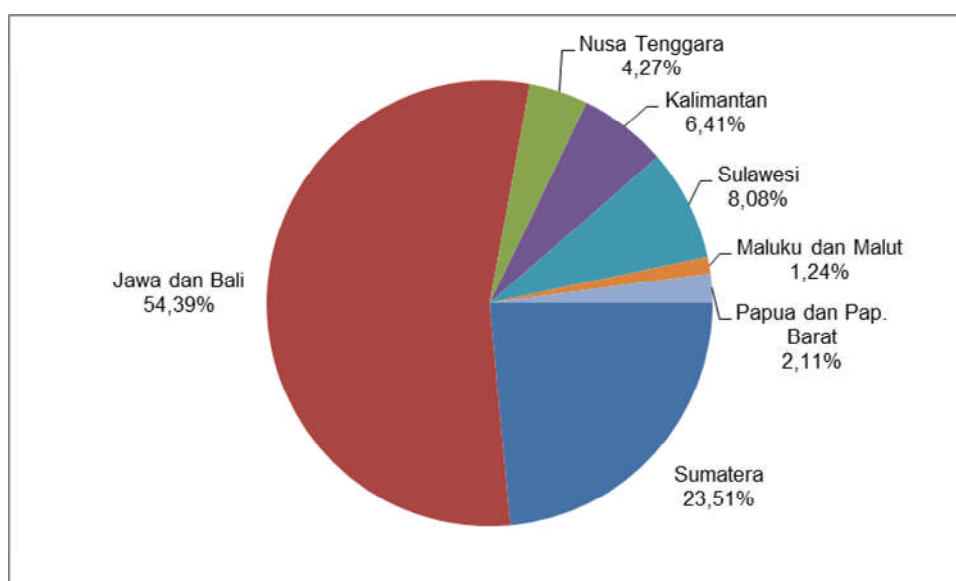
Sumber : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012

Tabel 2.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2012

Provinsi	Jumlah	Persentase	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	2	3	4	5
Aceh	5.015.234	1,99	57.956,00	86,54
Sumatera Utara	15.227.719	6,05	72.981,23	208,65
Sumatera Barat	5.617.977	2,23	42.012,89	133,72
Riau	6.456.322	2,56	87.023,66	74,19
Jambi	3.532.126	1,40	50.058,16	70,56
Sumatera Selatan	8.528.719	3,39	91.592,43	93,12
Bengkulu	1.996.538	0,79	19.919,33	100,23
Lampung	9.586.492	3,81	34.623,80	276,88
Kepulauan Bangka Belitung	1.349.199	0,54	16.424,06	82,15
Kepulauan Riau	1.895.590	0,75	8.201,72	231,12
DKI Jakarta	9.603.417	3,81	664,01	14.462,76
Jawa Barat	39.910.274	15,85	35.377,76	1.128,12
Jawa Tengah	32.578.357	12,94	32.800,69	993,22
DI Yogyakarta	3.458.029	1,37	3.133,15	1.103,69
Jawa Timur	37.269.885	14,80	47.799,75	779,71
Banten	9.938.820	3,95	9.662,92	1.028,55
Bali	4.227.705	1,68	5.780,06	731,43
Nusa Tenggara Barat	5.398.573	2,14	18.572,32	290,68
Nusa Tenggara Timur	5.343.902	2,12	48.718,10	109,69
Kalimantan Barat	5.193.272	2,06	147.307,00	35,25
Kalimantan Tengah	2.640.070	1,05	153.564,50	17,19
Kalimantan Selatan	4.145.843	1,65	38.744,23	107,01
Kalimantan Timur	4.154.954	1,65	204.534,34	20,31
Sulawesi Utara	2.617.155	1,04	13.851,64	188,94
Sulawesi Tengah	2.935.343	1,17	61.841,29	47,47
Sulawesi Selatan	9.368.107	3,72	46.717,48	200,53
Sulawesi Tenggara	2.691.623	1,07	38.067,70	70,71
Gorontalo	1.147.528	0,46	11.257,07	101,94
Sulawesi Barat	1.589.162	0,63	16.787,18	94,67
Maluku	1.866.248	0,74	46.914,03	39,78
Maluku Utara	1.258.354	0,50	31.982,50	39,35
Papua	4.224.232	1,68	319.036,05	13,24
Papua Barat	1.091.171	0,43	97.024,27	11,25
Indonesia	251.857.940	100,00	1.910.931,32	131,80

Sumber : Diolah dari Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2012



D. Ekonomi Wilayah

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Penghitungan nilai PDB dilakukan atas dua dasar harga, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. PDB atas dasar harga berlaku yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dapat digunakan untuk melihat perkembangan struktur ekonomi pada tahun tersebut. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun.

Berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku, kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi masyarakat Indonesia di Tahun 2011 sebagian besar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 24,28%, kemudian Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,72%. Hal ini menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia tidak lagi didominasi pada sektor agraris, melainkan dari sektor industri. Meskipun demikian, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tetap menghasilkan output yang besar dan perlu ditingkatkan mengingat sektor ini berkaitan sangat erat dengan kemandirian bangsa terutama dalam hal ketahanan pangan. Nilai dan persentase PDB atas dasar harga berlaku menurut sektor pada Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.6.

Tabel 2.5. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Tahun 2009 – 2012

Lapangan Usaha	2009	2010*	2011**	2012***1
1	2	3	4	5
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	857.196,8	985.448,8	1.093.466,0	604.371,4
Pertambangan dan Penggalian	592.060,9	718.136,8	886.243,3	502.078,0
Industri Pengolahan	1.477.541,5	1.595.779,4	1.803.486,3	949.541,5
Listrik, Gas dan Air Bersih	46.680,0	49.119,0	55.700,6	30.079,1
Konstruksi	555.192,5	660.890,5	756.537,3	410.106,5
Perdagangan, Hotel dan Restoran	744.513,5	882.487,2	1.022.106,7	549.752,5
Pengangkutan dan Komunikasi	353.739,7	423.165,3	491.240,9	262.954,1
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	405.162,0	466.563,8	534.975,0	290.262,6
Jasa-Jasa	574.116,5	654.680,0	783.330,0	428.608,2
PDB	5.606.203,4	6.436.270,8	7.427.086,1	4.027.753,9
PDB Tanpa Migas	5.141.414,4	5.936.237,8	6.794.373,4	3.699.103,9

Sumber : Statistik Indonesia 2012, BPS RI

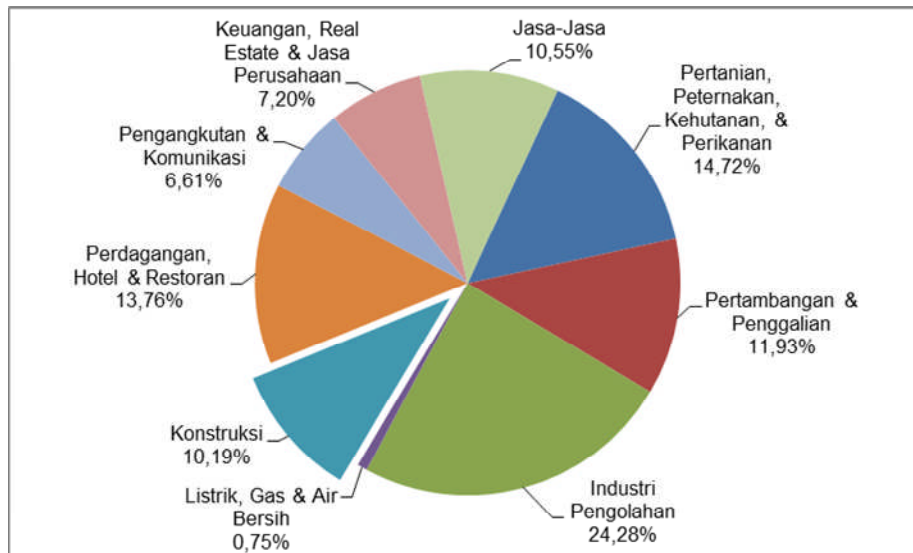
Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

¹ Data sampai semester I

Gambar 2.6. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011



Dari nilai PDB atas dasar harga konstan di Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 6,46% dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah 6,95%. Laju pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan agregat pendapatan Tahun 2011 terhadap Tahun 2010. Setelah pada Tahun 2009 sempat berada pada angka 4,63%, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan nilai yang cenderung stabil berada di atas 6%. Hal ini didukung oleh konsumsi domestik dan investasi swasta yang menjadi pengaman ketahanan ekonomi ketika krisis ekonomi melanda beberapa negara di dunia. Konsumsi domestik yang didukung oleh demografi penduduk menjadi salah satu pendorong investor untuk masuk dan menanamkan investasinya di Indonesia.

Jika dilihat menurut lapangan usaha utama, maka sektor yang cukup pesat pertumbuhannya pada Tahun 2011 adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dengan masing-masing angka pertumbuhannya sebesar 10,69%, 9,18% dan 6,81%. Laju pertumbuhan PDB menurut sektor ini dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.8.

Tabel 2.6. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Tahun 2009 – 2012

Lapangan Usaha	2009	2010*	2011**	2012***1
1	2	3	4	5
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	295.883,8	304.736,7	313.727,8	166.796,1
Pertambangan dan Penggalan	180.200,5	186.634,9	189.179,2	96.114,1
Industri Pengolahan	570.102,5	597.134,9	634.246,9	325.817,9
Listrik, Gas dan Air Bersih	17.136,8	18.050,2	18.920,5	9.768,1
Konstruksi	140.267,8	150.022,4	160.090,4	82.769,7
Perdagangan, Hotel dan Restoran	368.463,0	400.474,9	437.250,7	229.392,5
Pengangkutan dan Komunikasi	192.198,8	217.977,4	241.285,2	128.858,6
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	209.163,0	221.024,2	236.076,7	124.129,0
Jasa-Jasa	205.434,2	217.782,4	232.464,6	119.791,3
PDB	2.178.850,4	2.313.838,0	2.463.242,0	1.283.437,3
PDB Tanpa Migas	2.036.685,5	2.171.010,3	2.321.793,0	1.214.047,2

Sumber : Statistik Indonesia 2012, BPS RI

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

¹ Data sampai semester I

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2009 – 2012

Lapangan Usaha	2009	2010*	2011**	2012***1
1	2	3	4	5
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,96	2,99	2,95	4,00
Pertambangan dan Penggalan	4,47	3,57	1,36	2,95
Industri Pengolahan	2,21	4,74	6,22	5,54
Listrik, Gas dan Air Bersih	14,29	5,33	4,82	5,56
Konstruksi	7,07	6,95	6,71	7,23
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,28	8,69	9,18	8,61
Pengangkutan dan Komunikasi	15,85	13,41	10,69	10,19
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,21	5,67	6,81	6,68
Jasa-Jasa	6,42	6,01	6,74	5,60
PDB	4,63	6,20	6,46	6,35
PDB Tanpa Migas	5,00	6,60	6,95	6,82

Sumber : Statistik Indonesia 2012, BPS RI

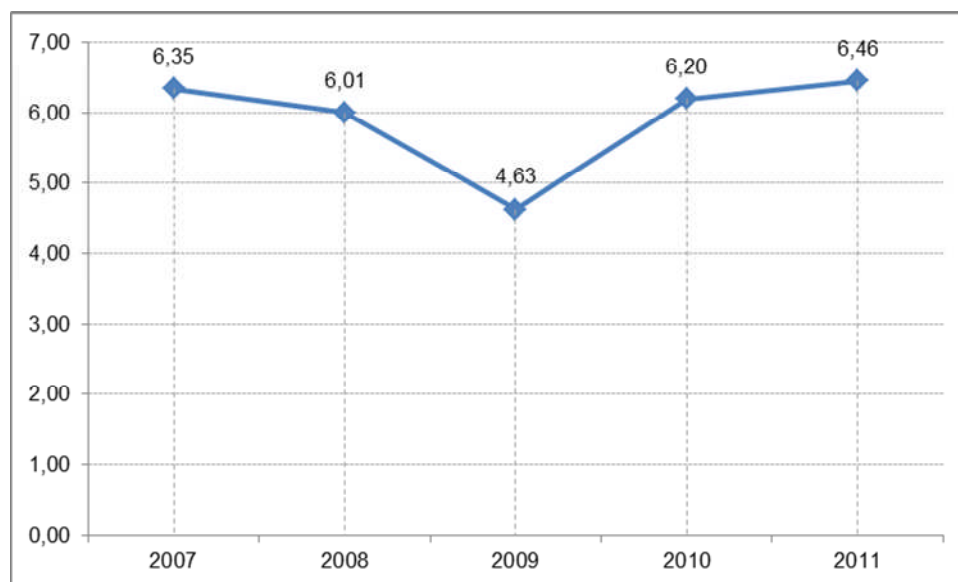
Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

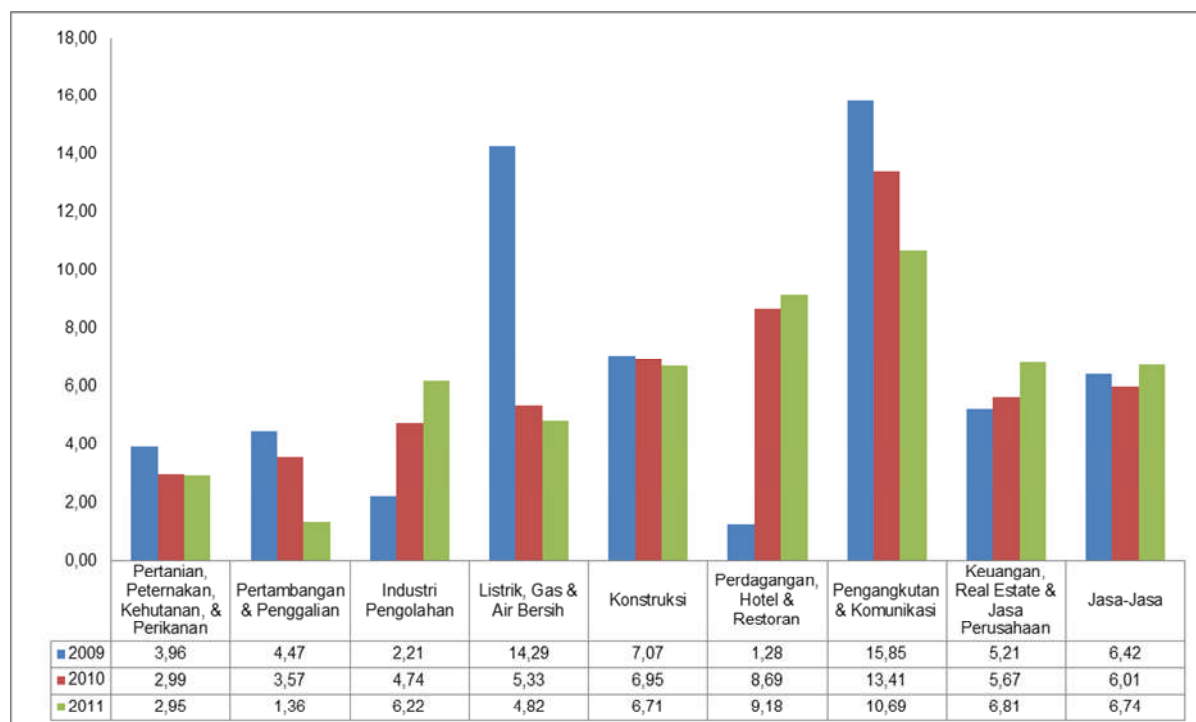
*** Angka sangat sangat sementara

¹ Data sampai semester I

Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007 – 2011 (%)



Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2009 – 2011



PDRB provinsi menjadi salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi. Melalui pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku di Tahun 2011 yang bernilai 977.400,1 miliar rupiah atau 16,32% merupakan yang tertinggi di antara 33 provinsi di Indonesia. Begitu pula untuk PDRB DKI Jakarta atas dasar harga konstan yang sebesar 421.130,5 miliar rupiah. Sementara PDRB Maluku Utara sebesar 6.057 miliar rupiah atau 0,10% merupakan yang terendah.

Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Provinsi (miliar rupiah)
Tahun 2009 – 2011

Provinsi	Dengan Migas			Tanpa Migas		
	2009	2010*	2011**	2009	2010*	2011**
1	2	3	4	5	6	7
Aceh	71.987,0	77.983,8	85.538,0	58.907,8	65.087,9	71.657,7
Sumatera Utara	236.353,6	275.700,2	314.156,9	234.473,5	273.537,1	311.792,6
Sumatera Barat	76.752,9	87.221,3	98.917,3	76.752,9	87.221,3	98.917,3
Riau	297.173,0	345.661,3	413.350,1	179.037,3	214.552,7	253.385,3
Kepulauan Riau	63.892,9	71.614,5	80.242,8	59.061,7	66.504,9	75.007,3
Jambi	44.127,0	53.816,7	63.268,1	36.755,1	45.061,6	52.609,3
Sumatera Selatan	137.331,8	157.535,0	181.776,1	98.907,5	115.201,4	134.591,5
Kepulauan Bangka Belitung	22.997,9	26.565,0	30.254,8	22.434,7	25.959,5	29.620,0
Bengkulu	16.385,4	18.649,6	21.150,3	16.385,4	18.649,6	21.150,3
Lampung	88.934,9	108.378,5	128.408,9	87.949,0	107.139,4	126.937,4
DKI Jakarta	757.696,6	862.089,7	982.540,0	754.540,8	858.385,5	977.400,1
Jawa Barat	689.841,3	771.593,9	861.006,3	658.040,6	738.590,4	824.086,3
Banten	152.556,2	171.690,4	192.218,9	152.556,2	171.690,4	192.218,9
Jawa Tengah	397.903,9	444.692,0	498.614,6	347.231,4	390.883,5	440.808,8
DI Yogyakarta	41.407,0	45.625,6	51.782,1	41.407,0	45.625,6	51.782,1
Jawa Timur	686.847,6	778.565,8	884.143,6	684.479,0	775.302,6	880.074,8
Bali	60.292,2	66.690,6	73.478,2	60.292,2	66.690,6	73.478,2
Nusa Tenggara Barat	44.014,6	49.559,8	48.729,1	44.014,6	49.559,8	48.729,1
Nusa Tenggara Timur	24.179,4	27.738,8	31.204,4	24.179,4	27.738,8	31.204,4
Kalimantan Barat	54.281,2	60.501,5	66.780,2	54.281,2	60.501,5	66.780,2
Kalimantan Tengah	37.161,8	42.621,0	49.072,5	37.161,8	42.621,0	49.072,5
Kalimantan Selatan	51.460,2	59.821,2	68.234,9	50.813,7	59.141,9	67.529,9

Provinsi	Dengan Migas			Tanpa Migas		
	2009	2010*	2011**	2009	2010*	2011**
1	2	3	4	5	6	7
Kalimantan Timur	285.590,8	321.904,9	390.638,6	155.204,1	190.660,5	241.415,6
Sulawesi Utara	33.033,6	36.911,8	41.505,1	32.993,1	36.870,1	41.459,3
Gorontalo	7.069,1	8.056,5	9.153,7	7.069,1	8.056,5	9.153,7
Sulawesi Tengah	32.461,3	37.319,1	44.317,9	31.817,0	36.552,9	43.371,7
Sulawesi Selatan	99.954,6	117.862,2	137.389,9	99.757,7	117.644,0	137.146,2
Sulawesi Barat	9.403,4	10.986,6	12.895,4	9.403,4	10.986,6	12.895,4
Sulawesi Tenggara	25.655,9	28.369,0	32.032,5	25.655,9	28.369,0	32.032,5
Maluku	7.069,6	8.084,8	9.594,9	7.049,3	8.064,5	9.570,8
Maluku Utara	4.691,2	5.389,8	6.057,0	4.691,2	5.389,8	6.057,0
Papua	76.886,7	87.776,6	76.370,6	76.886,7	87.776,6	76.370,6
Papua Barat	18.144,5	26.879,6	36.170,5	12.124,0	14.063,6	16.567,3
Jumlah 33 Provinsi	4.653.539,2	5.293.857,0	6.020.994,1	4.242.314,4	4.850.080,8	5.504.874,0
Indonesia	5.606.203,4	6.436.270,8	7.427.086,1	5.141.414,4	5.936.237,8	6.794.373,4

Sumber : Statistik Indonesia 2012, BPS RI

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Provinsi (miliar rupiah)
Tahun 2009 – 2011

Provinsi	Dengan Migas			Tanpa Migas		
	2009	2010*	2011**	2009	2010*	2011**
1	2	3	4	5	6	7
Aceh	32.219,1	33.118,2	34.779,7	27.574,8	29.089,4	30.801,7
Sumatera Utara	111.559,2	118.640,9	126.450,6	110.850,7	117.901,0	125.668,4
Sumatera Barat	36.683,2	38.860,2	41.276,4	36.683,2	38.860,2	41.276,4
Riau	93.786,2	97.707,5	102.605,9	45.391,9	48.641,8	52.355,1
Kepulauan Riau	38.318,8	41.075,9	43.816,7	36.600,8	39.349,8	42.079,0
Jambi	16.274,9	17.470,7	18.962,4	14.675,3	15.677,4	16.765,8
Sumatera Selatan	60.452,9	63.858,2	68.011,3	47.029,3	50.314,0	54.353,2
Kepulauan Bangka Belitung	10.270,1	10.879,4	11.575,3	10.100,2	10.709,3	11.402,4
Bengkulu	7.859,9	8.336,0	8.869,3	7.859,9	8.336,0	8.869,3
Lampung	36.256,3	38.378,4	40.829,4	35.855,3	38.003,2	40.433,9
DKI Jakarta	371.469,5	395.633,6	422.162,6	370.533,5	394.683,6	421.130,5
Jawa Barat	303.405,3	322.223,8	343.111,2	294.324,4	313.190,5	334.457,1
Banten	83.453,7	88.525,9	94.222,4	83.453,7	88.525,9	94.222,4
Jawa Tengah	176.673,5	186.995,5	198.226,3	166.176,2	176.187,0	187.111,8
DI Yogyakarta	20.064,3	21.044,0	22.129,7	20.064,3	21.044,0	22.129,7
Jawa Timur	320.861,2	342.280,8	366.984,3	319.531,4	340.613,7	365.152,4

Provinsi	Dengan Migas			Tanpa Migas		
	2009	2010*	2011**	2009	2010*	2011**
1	2	3	4	5	6	7
Bali	27.290,9	28.880,7	30.753,7	27.290,9	28.880,7	30.753,7
Nusa Tenggara Barat	18.874,4	20.069,9	19.432,3	18.874,4	20.069,9	19.432,3
Nusa Tenggara Timur	11.920,6	12.543,8	13.249,7	11.920,6	12.543,8	13.249,7
Kalimantan Barat	28.756,9	30.299,8	32.100,7	28.756,9	30.299,8	32.100,7
Kalimantan Tengah	17.657,8	18.803,7	20.070,7	17.657,8	18.803,7	20.070,7
Kalimantan Selatan	29.051,6	30.674,1	32.552,8	28.578,3	30.204,5	32.101,4
Kalimantan Timur	105.564,9	110.886,7	115.244,2	60.031,0	67.051,8	74.920,0
Sulawesi Utara	17.149,6	18.376,8	19.734,3	17.116,8	18.343,2	19.699,0
Gorontalo	2.710,7	2.917,5	3.141,5	2.710,7	2.917,5	3.141,5
Sulawesi Tengah	16.207,6	17.626,2	19.239,9	15.943,3	17.336,4	18.932,4
Sulawesi Selatan	47.326,1	51.199,9	55.116,9	47.225,0	51.091,4	55.001,8
Sulawesi Barat	4.239,5	4.744,3	5.238,4	4.239,5	4.744,3	5.238,4
Sulawesi Tenggara	10.768,6	11.650,2	12.661,9	10.768,6	11.650,2	12.661,9
Maluku	3.993,1	4.251,4	4.507,3	3.980,1	4.237,8	4.492,9
Maluku Utara	2.812,0	3.035,6	3.230,2	2.812,0	3.035,6	3.230,2
Papua	23.138,4	22.407,3	21.137,5	23.138,4	22.407,3	21.137,5
Papua Barat	7.287,0	9.366,4	11.916,1	5.446,5	5.915,7	6.534,2
Jumlah 33 Provinsi	2.094.358,0	2.222.763,1	2.363.341,7	1.953.195,8	2.080.660,3	2.220.907,2
Indonesia	2.178.850,4	2.313.838,0	2.463.242,0	2.036.685,5	2.171.010,3	2.321.793,0

Sumber : Statistik Indonesia 2012, BPS RI

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, maka PDRB Papua Barat Tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu 27,22% dari tahun sebelumnya. Sementara dari nilai PDRB tanpa migas Tahun 2011, maka Kalimantan Timur yang mencatat pertumbuhan tertinggi dengan 11,73% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi (miliar rupiah)
Tahun 2008 – 2011

Provinsi	Dengan Migas				Tanpa Migas			
	2008	2009	2010*	2011**	2008	2009	2010*	2011**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aceh	-5,24	-5,51	2,79	5,02	1,92	3,97	5,49	5,89
Sumatera Utara	6,39	5,07	6,35	6,58	6,40	5,14	6,36	6,59
Sumatera Barat	6,88	4,28	5,93	6,22	6,88	4,28	5,93	6,22

Provinsi	Dengan Migas				Tanpa Migas			
	2008	2009	2010*	2011**	2008	2009	2010*	2011**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riau	5,65	2,97	4,18	5,01	8,06	6,56	7,16	7,63
Kepulauan Riau	6,63	3,52	7,19	6,67	7,19	3,66	7,51	6,94
Jambi	7,16	6,39	7,35	8,54	7,37	6,99	6,83	6,94
Sumatera Selatan	5,07	4,11	5,63	6,50	6,31	5,06	6,98	8,03
Kepulauan Bangka Belitung	4,60	3,74	5,93	6,40	4,93	3,98	6,03	6,47
Bengkulu	5,75	5,62	6,06	6,40	5,75	5,62	6,06	6,40
Lampung	5,35	5,26	5,85	6,39	5,42	5,52	5,99	6,40
DKI Jakarta	6,23	5,02	6,50	6,71	6,25	5,03	6,52	6,70
Jawa Barat	6,21	4,19	6,20	6,48	6,36	4,10	6,41	6,79
Banten	5,77	4,71	6,08	6,43	5,77	4,71	6,08	6,43
Jawa Tengah	5,61	5,14	5,84	6,01	5,49	5,66	6,02	6,20
DI Yogyakarta	5,03	4,43	4,88	5,16	5,03	4,43	4,88	5,16
Jawa Timur	5,94	5,01	6,68	7,22	5,90	4,95	6,60	7,20
Bali	5,97	5,33	5,83	6,49	5,97	5,33	5,83	6,49
Nusa Tenggara Barat	2,82	12,14	6,33	-3,18	2,82	12,14	6,33	-3,18
Nusa Tenggara Timur	4,84	4,29	5,23	5,63	4,84	4,29	5,23	5,63
Kalimantan Barat	5,45	4,80	5,37	5,94	5,45	4,80	5,37	5,94
Kalimantan Tengah	6,17	5,57	6,49	6,74	6,17	5,57	6,49	6,74
Kalimantan Selatan	6,45	5,29	5,58	6,12	6,54	5,38	5,69	6,28
Kalimantan Timur	4,90	2,28	5,04	3,93	6,34	7,05	11,70	11,73
Sulawesi Utara	10,86	7,85	7,16	7,39	10,86	7,83	7,17	7,39
Gorontalo	7,76	7,54	7,63	7,68	7,76	7,54	7,63	7,68
Sulawesi Tengah	7,78	7,71	8,75	9,16	7,44	8,00	8,74	9,21
Sulawesi Selatan	7,78	6,23	8,19	7,65	7,79	6,23	8,19	7,65
Sulawesi Barat	12,07	6,03	11,91	10,41	12,07	6,03	11,91	10,41
Sulawesi Tenggara	7,27	7,57	8,19	8,68	7,27	7,57	8,19	8,68
Maluku	4,23	5,44	6,47	6,02	4,23	5,44	6,47	6,02
Maluku Utara	5,99	6,07	7,95	6,41	5,99	6,07	7,95	6,41
Papua	-1,40	22,22	-3,16	-5,67	-1,40	22,22	-3,16	-5,67
Papua Barat	7,84	13,87	28,54	27,22	9,25	9,18	8,61	10,45
33 Prov	5,74	4,77	6,13	6,32	6,08	5,33	6,53	6,74
Indonesia	6,01	4,63	6,20	6,46	6,47	5,00	6,60	6,95

Sumber : Statistik Indonesia 2012, BPS RI

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan suatu bangsa baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, sosial, budaya, keamanan dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat amat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Salah satu peran pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan infrastruktur adalah dengan mengalokasikan anggaran belanja yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum. Pada Tabel 2.11 di bawah ini ditampilkan perkembangan alokasi dana Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN Nasional sejak Tahun 2009 hingga 2013 dalam milyar rupiah. Terlihat peningkatan setiap tahunnya yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum.

Tabel 2.11. Perkembangan Alokasi Dana Kementerian Pekerjaan Umum
Dalam APBN Indonesia (milyar rupiah)

Tahun	APBN Nasional Kementerian Pekerjaan Umum
1	2
2009	36.172
2010	37.773
2011	57.961
2012	62.563
2013	77.978

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Sementara alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum menurut provinsi dan bidang pembangunannya ditampilkan pada Tabel 2.12 – 2.16 berikut ini.

Tabel 2.12. Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)

Provinsi	TA 2011			TA 2012			TA 2013		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceh	1.181,96	623,01	1.804,97	1.155,72	316,73	1.472,44	1.603,44	102,05	1.705,49
Sumatera Utara	1.739,44	256,51	1.995,96	1.826,52	422,56	2.249,17	2.309,18	489,28	2.798,46
Sumatera Barat	1.240,92	354,73	1.595,65	1.443,47	205,49	1.648,97	1.812,48	302,71	2.115,19
Riau	869,80	178,70	1.048,50	995,12	84,69	1.079,82	1.281,55	40,55	1.322,10
Kepulauan Riau	387,05	3,57	390,62	499,45	5,48	504,93	706,00	13,77	719,77
Jambi	968,58	146,64	1.115,22	983,47	146,57	1.130,04	1.173,92	51,05	1.224,97
Sumatera Selatan	1.346,27	448,17	1.794,45	1.472,51	382,70	1.855,22	1.430,87	380,11	1.810,98
Kepulauan Bangka Belitung	468,03	33,27	501,30	482,16	35,82	517,99	593,78	19,01	612,78
Bengkulu	613,85	81,88	695,73	691,64	96,51	788,16	764,05	122,76	886,81
Lampung	1.178,78	195,92	1.374,71	1.128,03	135,12	1.263,15	1.273,38	194,55	1.467,93
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2.840,40	653,97	3.134,38	4.569,26	1.112,94	5.682,19	4.847,55	1.276,69	6.124,24
Banten	753,67	78,44	832,11	871	122,91	993,91	892,6	340,42	1.233,02
Jawa Tengah	2.780,89	1.253,74	4.034,63	3.299,29	1.292,96	4.592,25	3.964,49	857,55	4.822,04
DI Yogyakarta	714,26	133,01	847,27	1.194,73	127,49	1.322,23	1.186,29	104,60	1.290,89
Jawa Timur	2.883,48	247,73	3.131,21	2.779,40	279,23	3.058,63	2.661,35	290,51	2.951,86
Bali	1.527,45	294,41	1.821,85	1.579,95	100,71	1.680,66	1.675,25	85,70	1.760,95
Nusa Tenggara Barat	1.033,38	267,84	1.301,22	1.199,05	166,57	1.365,62	1.574,18	72,98	1.647,16
Nusa Tenggara Timur	1.354,15	71,92	1.426,08	3.137,51	79,18	3.216,68	1.772,68	40,44	1.813,13
Kalimantan Barat	1.259,82	115,62	1.375,44	1.126,95	178,96	1.305,91	2.145,90	420,86	2.566,76
Kalimantan Tengah	1.231,69	1,23	1.232,92	1.319,69	1,50	1.321,19	1.711,63	2,75	1.714,38
Kalimantan Selatan	839,43	171,84	1.011,26	869,70	121,19	990,89	1.270,37	95,09	1.365,46
Kalimantan Timur	1.275,60	170,61	1.446,21	1.671,12	81,70	1.752,82	2.900,70	183,95	3.084,64
Sulawesi Utara	1.039,23	142,50	1.181,73	1.623,99	49,68	1.673,67	2.099,29	58,05	2.157,34
Gorontalo	461,33	40,83	502,16	726,86	33,75	760,61	955,17	40,63	995,80
Sulawesi Tengah	745,56	93,20	838,77	1.029,83	30,96	1.060,79	1.382,80	2,68	1.385,47
Sulawesi Selatan	1.475,13	470,07	1.945,20	1.561,01	522,62	2.083,63	1.928,60	366,62	2.295,21
Sulawesi Barat	572,79	84,21	657,00	688,32	43,62	731,93	679,14	26,82	705,96
Sulawesi Tenggara	629,61	122,49	752,10	873,76	81,77	955,53	1.129,98	7,37	1.137,35
Maluku	1.127,76	31,91	1.159,67	1.828,94	38,94	1.867,87	1.416,30	15,71	1.432,01
Maluku Utara	538,76	8,69	547,45	728,10	5,71	733,93	1.104,62	4,72	1.109,35
Papua	2.361,08	1,79	2.362,88	5.241,05	1,63	5.242,68	3.940,24	2,00	3.942,23
Papua Barat	1.029,59	4,88	1.034,47	1.595,77	2,14	1.597,91	1.968,16	2,05	1.970,20

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.13. Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Sumber Daya Air Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)

Provinsi	TA 2011			TA 2012			TA 2013		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceh	233,06	-	233,06	269,66	-	269,66	363,84	-	363,84
Sumatera Utara	195,14	43,95	239,09	293,39	37,25	330,64	450,56	4,94	455,50
Sumatera Barat	252,60	63,04	315,64	367,01	42,90	409,92	509,38	55,95	565,33
Riau	130,99	3,50	134,49	128,10	-	128,10	178,38	-	178,38
Kepulauan Riau	65,49	-	65,49	91,89	-	91,89	159,76	-	159,76
Jambi	311,14	25,75	336,89	332,58	40,18	372,76	382,41	7,18	389,59
Sumatera Selatan	316,07	234,97	551,05	560,62	175,39	736,02	429,17	259,35	688,52
Kepulauan Bangka Belitung	52,41	-	52,41	98,11	-	98,11	171,78	-	171,78
Bengkulu	216,66	6,13	222,79	223,50	-	223,50	234,68	-	234,68
Lampung	262,94	17,32	280,26	294,51	9,75	304,26	391,30	12,89	404,19
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1.020,70	513,38	1.534,08	3.018,31	687,51	3.705,81	2.829,45	486,62	3.316,07
Banten	198,62	25,31	223,93	296,67	77,14	373,80	268,88	261,21	530,09
Jawa Tengah	1.187,75	769,13	1.956,88	1.491,13	757,77	2.248,91	1.321,68	485,86	1.807,54
DI Yogyakarta	285,56	73,01	358,57	806,88	37,06	843,94	656,46	25,59	682,05
Jawa Timur	421,95	83,23	505,18	530,81	104,31	635,11	703,50	127,27	830,78
Bali	349,05	4,04	353,09	369,94	1,00	370,94	518,37	2,00	520,37
Nusa Tenggara Barat	271,15	20,99	292,14	414,82	29,00	443,81	623,16	20,88	644,04
Nusa Tenggara Timur	401,46	17,80	419,26	536,78	8,50	545,28	522,71	4,89	527,60
Kalimantan Barat	165,31	-	165,31	204,59	-	204,59	218,28	-	218,28
Kalimantan Tengah	275,73	-	275,73	243,06	-	243,06	271,67	-	271,67
Kalimantan Selatan	137,70	20,26	157,96	175,94	15,00	190,94	221,71	6,50	228,21
Kalimantan Timur	241,42	1,34	242,77	210,76	10,51	221,27	362,57	18,28	380,84
Sulawesi Utara	153,42	38,77	192,20	477,43	15,01	492,43	385,50	36,30	421,80
Gorontalo	115,20	26,00	141,20	344,56	26,00	370,56	304,53	39,06	343,58
Sulawesi Tengah	133,27	20,00	153,27	224,64		224,64	241,84		241,84
Sulawesi Selatan	476,05	135,33	611,38	593,65	120,06	713,71	741,09	118,82	859,90
Sulawesi Barat	120,42	27,13	147,55	208,26	11,23	219,49	183,03	20,30	203,33
Sulawesi Tenggara	170,09	11,26	181,35	194,19	5,50	199,69	232,19	1,00	233,19
Maluku	214,58	25,00	239,58	243,17	34,54	277,71	363,13	12,31	375,44
Maluku Utara	78,36	-	78,36	102,36	-	102,36	216,80	-	216,80
Papua	237,81	-	237,81	283,97	-	283,97	372,27	-	372,27
Papua Barat	57,02	-	57,02	339,18	-	339,18	353,35	-	353,35

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.14. Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Bina Marga Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)

Provinsi	TA 2011			TA 2012			TA 2013		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceh	680,34	229,66	910,00	724,90	217,22	942,12	1.032,88	35,45	1.068,33
Sumatera Utara	1.230,17	16,73	1.246,90	1.376,94	127,89	1.504,83	1.663,32	268,17	1.931,48
Sumatera Barat	737,06	220,94	958,00	912,39	102,61	1.015,00	1.121,06	187,89	1.308,95
Riau	568,99	9,22	578,21	727,38	-	727,38	953,46	-	953,46
Kepulauan Riau	175,00	-	175,00	256,36	-	256,36	401,91	-	401,91
Jambi	537,75	37,25	575,00	540,33	34,06	574,39	621,30	13,54	634,84
Sumatera Selatan	770,48	26,33	796,81	731,88	37,49	769,37	813,57	1,40	814,97
Kepulauan Bangka Belitung	267,73	-	267,73	247,87	-	247,87	287,60	-	287,60
Bengkulu	256,30	18,70	275,00	328,95	42,15	371,10	388,10	92,48	480,58
Lampung	731,45	48,55	780,00	670,64	74,30	744,94	718,18	104,65	822,83
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	927,66	73,34	1.001,00	907,49	348,71	1.256,21	1.682,85	480,00	2.162,85
Banten	384,22	36,78	421,00	403,87	26,79	430,66	469,96	14,46	484,42
Jawa Tengah	974,47	177,53	1.152,00	1.155,20	195,48	1.350,68	1.959,35	84,95	2.044,30
DI Yogyakarta	225,00	-	225,00	249,92	-	249,92	364,31	-	364,31
Jawa Timur	1.693,67	88,93	1.782,60	1.423,01	71,28	1.494,29	1.215,89	50,70	1.266,59
Bali	860,05	124,81	984,86	888,18	23,49	911,67	751,80	-	751,80
Nusa Tenggara Barat	575,51	181,99	757,50	605,78	77,04	682,82	749,70	0,30	750,00
Nusa Tenggara Timur	759,18	18,22	777,40	2.392,17	62,17	2.454,34	949,33	30,67	980,00
Kalimantan Barat	858,00	77,00	935,00	763,26	139,18	902,44	1.132,98	400,44	1.533,43
Kalimantan Tengah	800,00	-	800,00	949,89	-	949,89	1.268,62	-	1.268,62
Kalimantan Selatan	491,78	66,42	558,20	500,58	42,46	543,04	825,99	71,44	897,43
Kalimantan Timur	802,94	157,06	960,00	1.300,43	65,15	1.365,58	2.223,19	159,46	2.382,65
Sulawesi Utara	648,33	91,67	740,00	933,44	14,43	947,87	1.468,87	5,00	1.473,87
Gorontalo	210,00	-	210,00	262,18	-	262,18	523,59	-	523,59
Sulawesi Tengah	453,54	47,26	500,80	654,35	24,96	679,32	996,42	0,10	996,52
Sulawesi Selatan	734,72	215,08	949,80	685,47	231,55	917,01	893,80	147,04	1.040,83
Sulawesi Barat	348,83	16,17	365,00	360,68	-	360,68	360,66	-	360,66
Sulawesi Tenggara	300,37	106,63	407,00	502,95	69,90	572,85	719,64	-	179,64
Maluku	736,13	-	736,13	1.426,02	-	1.426,02	832,57	-	832,57
Maluku Utara	315,00	-	315,00	476,45	-	476,45	639,92	-	639,92
Papua	1.937,96	-	1.937,96	4.739,76	-	4.739,76	3.293,71	-	3.293,71
Papua Barat	817,17	-	817,17	1.089,57	-	1.089,57	1.369,30	-	1.369,30

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.15. Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Cipta Karya Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)

Provinsi	TA 2011			TA 2012			TA 2013		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceh	260,91	393,35	654,26	150,97	99,51	250,48	197,43	66,60	264,03
Sumatera Utara	307,73	195,83	503,57	139,55	257,51	397,06	184,01	216,18	400,19
Sumatera Barat	246,42	70,74	317,16	148,94	59,98	208,92	117,18	55,87	236,04
Riau	165,67	165,98	331,65	132,95	84,69	217,64	144,66	40,55	185,21
Kepulauan Riau	142,48	3,57	146,05	142,23	5,48	147,71	138,67	13,77	152,44
Jambi	115,63	83,65	199,28	104,44	72,33	176,77	164,92	30,33	195,25
Sumatera Selatan	255,32	186,87	442,19	172,08	169,82	341,90	182,88	119,36	302,24
Kepulauan Bangka Belitung	143,81	33,27	177,08	130,75	35,82	166,58	130,25	19,01	149,26
Bengkulu	136,84	57,04	193,89	133,23	54,37	187,60	137,24	30,28	167,51
Lampung	180,08	130,06	310,14	152,17	51,07	203,24	160,17	77,01	237,18
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	526,44	67,25	593,70	624,97	76,71	701,69	329,29	310,07	639,36
Banten	167,30	16,35	183,65	166,36	18,98	185,34	150,66	64,74	215,40
Jawa Tengah	612,74	307,08	919,82	622,81	339,71	962,52	677,15	286,76	963,81
DI Yogyakarta	199,65	60,00	259,65	130,51	90,43	220,94	160,90	79,02	239,91
Jawa Timur	763,09	75,57	838,66	797,23	103,65	900,88	709,25	112,53	821,78
Bali	304,55	165,56	470,10	307,72	76,22	383,94	380,18	83,70	463,88
Nusa Tenggara Barat	180,42	64,86	245,28	163,31	60,54	223,85	196,14	51,80	247,94
Nusa Tenggara Timur	187,26	35,90	223,17	196,95	8,51	205,46	292,75	4,87	297,63
Kalimantan Barat	230,11	38,61	268,72	146,61	39,78	186,39	785,89	20,42	806,31
Kalimantan Tengah	148,96	1,23	150,20	115,24	1,50	116,74	164,69	2,75	167,45
Kalimantan Selatan	204,24	85,16	289,40	163,33	63,73	227,07	217,08	17,15	234,23
Kalimantan Timur	222,42	12,21	234,63	146,51	6,03	152,54	303,95	6,21	310,16
Sulawesi Utara	226,87	12,06	238,92	197,41	20,24	217,65	236,95	16,75	253,70
Gorontalo	32,48	14,83	147,31	112,82	7,75	120,57	123,18	1,57	124,75
Sulawesi Tengah	152,26	25,94	178,20	138,66	6,00	144,66	138,83	2,58	141,40
Sulawesi Selatan	251,30	119,66	370,96	258,04	171,02	429,06	282,96	100,77	383,72
Sulawesi Barat	100,24	40,91	141,15	114,22	32,39	146,61	132,12	6,52	138,64
Sulawesi Tenggara	153,14	4,60	157,74	163,18	6,37	169,54	171,20	6,37	177,57
Maluku	170,89	6,91	177,80	148,47	4,39	152,86	213,17	3,40	216,58
Maluku Utara	140,82	8,69	149,51	142,84	5,71	148,67	197,18	4,72	201,90
Papua	178,01	1,79	179,81	200,78	1,63	200,78	263,83	2,00	265,83
Papua Barat	150,74	4,88	155,62	160,13	2,14	162,27	238,50	2,05	240,54

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.16. Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Penataan Ruang Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2011 – 2013 (milyar rupiah)

Provinsi	TA 2011			TA 2012			TA 2013		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceh	7,65	-	7,65	10,20	-	10,20	9,29	-	9,29
Sumatera Utara	6,40	-	6,40	16,63	-	16,63	11,29	-	11,29
Sumatera Barat	4,85	-	4,85	14,92	-	14,92	4,87	-	4,87
Riau	4,15	-	4,15	6,70	-	6,70	5,05	-	5,05
Kepulauan Riau	4,08	-	4,08	8,98	-	8,98	5,65	-	5,65
Jambi	4,05	-	4,05	6,13	-	6,13	5,30	-	5,30
Sumatera Selatan	4,40	-	4,40	7,93	-	7,93	5,25	-	5,25
Kepulauan Bangka Belitung	4,08	-	4,08	5,43	-	5,43	4,15	-	4,15
Bengkulu	4,05	-	4,05	5,96	-	5,96	4,04	-	4,04
Lampung	4,30	-	4,30	10,72	-	10,72	3,73	-	3,73
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,60	-	5,60	18,48	-	18,48	5,96	-	5,96
Banten	3,53	-	3,53	4,11	-	4,11	3,10	-	3,10
Jawa Tengah	5,93	-	5,93	30,14	-	30,14	6,30	-	6,30
DI Yogyakarta	4,05	-	4,05	7,43	-	7,43	4,63	-	4,63
Jawa Timur	4,77	-	4,77	28,35	-	28,35	32,71	-	32,71
Bali	13,80	-	13,80	14,11	-	14,11	24,90	-	24,90
Nusa Tenggara Barat	6,30	-	6,30	15,14	-	15,14	5,18	-	5,18
Nusa Tenggara Timur	6,25	-	6,25	11,61	-	11,61	7,90	-	7,90
Kalimantan Barat	6,41	-	6,41	12,49	-	12,49	8,75	-	8,75
Kalimantan Tengah	7,00	-	7,00	11,50	-	11,50	6,65	-	6,65
Kalimantan Selatan	5,70	-	5,70	10,04	-	10,04	5,59	-	5,59
Kalimantan Timur	8,81	-	8,81	13,43	-	13,43	10,99	-	10,99
Sulawesi Utara	10,61	-	10,61	15,72	-	15,72	7,97	-	7,97
Gorontalo	3,65	-	3,65	7,29	-	7,29	3,88	-	3,88
Sulawesi Tengah	6,50	-	6,50	12,18	-	12,18	5,71	-	5,71
Sulawesi Selatan	13,06	-	13,06	23,85	-	23,85	10,76	-	10,76
Sulawesi Barat	3,30	-	3,30	5,16	-	5,16	3,33	-	3,33
Sulawesi Tenggara	6,01	-	6,01	13,44	-	13,44	6,95	-	6,95
Maluku	6,16	-	6,16	11,27	-	11,27	7,42	-	7,42
Maluku Utara	4,58	-	4,58	6,45	-	6,45	5,73	-	5,73
Papua	7,30	-	7,30	16,54	-	16,54	10,42	-	10,42
Papua Barat	4,66	-	4,66	6,89	-	6,89	7,01	-	7,01

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Selain alokasi APBN, infrastruktur pekerjaan umum di daerah juga berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana perimbangan di samping DAU (Dana Alokasi Umum). Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus serta teknis dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berikut ini adalah besaran DAK masing-masing provinsi untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, terutama jalan, irigasi serta air minum dan sanitasi.

Tabel 2.17. Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum Menurut Provinsi Tahun 2012 – 2013 (milyar rupiah)

Provinsi	TA 2012				TA 2013				
	Jalan	Irigasi	AMS	Total	Jalan	Irigasi	AMS	Tambahan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceh	165,270	72,440	44,080	281,800	208,940	89,867	62,992	58,556	420,356
Sumatera Utara	233,295	68,083	59,232	360,610	300,509	71,963	75,117	28,356	475,945
Sumatera Barat	141,153	54,722	35,490	231,366	182,031	96,810	52,791	43,918	375,550
Riau	158,582	40,570	6,912	206,065	117,850	3,615	4,945	-	126,410
Kepulauan Riau	45,711	-	8,277	53,988	51,387	-	6,011	9,980	67,380
Jambi	96,150	26,358	16,446	138,954	91,540	29,140	20,150	-	140,830
Sumatera Selatan	140,019	42,009	42,298	224,327	98,728	17,553	34,400	35,846	186,526
Kepulauan Bangka Belitung	53,464	16,868	14,306	84,638	69,700	22,660	17,750	6,054	116,144
Bengkulu	76,544	25,236	17,047	118,827	90,047	41,130	23,211	26,394	180,782
Lampung	144,255	43,399	33,284	220,937	123,937	54,865	30,664	21,297	230,767
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	119,253	60,342	68,676	248,271	132,869	85,321	31,574	11,646	261,411
Banten	43,837	12,154	9,223	65,215	30,627	21,173	12,295	9,912	74,000
Jawa Tengah	288,744	126,538	97,961	513,243	216,440	128,118	87,397	-	431,955
DI Yogyakarta	32,961	14,099	16,744	63,805	35,088	27,173	13,054	-	75,315
Jawa Timur	219,146	108,504	90,293	417,943	221,141	126,492	98,657	21,150	435,277
Bali	64,956	38,339	14,251	117,546	62,611	34,716	7,413	-	178,236
Nusa Tenggara Barat	83,976	47,354	25,277	156,607	58,407	34,270	178,596	35,805	214,401
Nusa Tenggara Timur	182,879	78,831	41,058	302,768	185,358	85,470	55,700	91,337	417,865
Kalimantan Barat	128,926	44,800	173,306	203,249	169,824	62,087	42,413	40,190	314,474
Kalimantan Tengah	128,927	44,800	29,523	203,250	137,381	52,275	19,666	4,711	214,034
Kalimantan Selatan	84,337	29,401	17,215	130,952	81,810	27,328	24,388	12,235	145,761
Kalimantan Timur	82,531	18,009	7,155	107,695	82,071	21,846	15,568	20,537	140,023
Sulawesi Utara	114,743	35,694	29,641	180,077	133,492	38,899	35,930	15,256	223,577

Provinsi	TA 2012				TA 2013				
	Jalan	Irigasi	AMS	Total	Jalan	Irigasi	AMS	Tambahan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gorontalo	59,168	17,975	12,421	89,565	61,411	22,366	13,291	15,219	112,287
Sulawesi Tengah	102,081	37,200	22,062	161,342	107,489	56,034	25,596	48,306	237,425
Sulawesi Selatan	186,727	62,077	41,034	289,839	220,637	101,445	49,871	-	371,962
Sulawesi Barat	53,789	23,245	8,743	85,777	61,214	29,594	16,310	25,779	132,897
Sulawesi Tenggara	104,082	36,665	22,332	163,080	127,352	44,074	28,702	47,272	247,400
Maluku	84,490	27,653	18,000	130,144	71,021	22,933	18,921	-	112,874
Maluku Utara	79,090	30,946	15,737	125,773	127,815	24,637	-	39,740	203,273
Papua	404,320	42,739	63,004	510,062	520,805	84,054	121,644	200,724	926,227
Papua Barat	114,29	21,04	21,28	156,61	137,81	25,4	27,34	46,330	223,33

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Catatan : AMS : Air Minum dan Sanitasi

BAB III

STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

A. Sumber Air

A.1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Salah satu yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah isu yang berkaitan dengan sungai. Sejak dulu keberadaan sungai sangat penting perannya bagi manusia. Terlihat dari berkembangnya peradaban manusia di muka bumi sebagian besar terjadi di sekitar wilayah sungai. Dalam kehidupan yang semakin maju saat ini, manusia tetap harus memelihara serta mengelola sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai menjelaskan bahwa **Wilayah Sungai (WS)** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa **Daerah Aliran Sungai (DAS)** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan statusnya, Wilayah Sungai yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil meliputi :

1. Wilayah Sungai Lintas Negara;

2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi;
3. Wilayah Sungai Strategis Nasional;
4. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; dan
5. Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota.

Pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.5 di bawah ini ditampilkan daftar wilayah sungai di Indonesia menurut statusnya beserta jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) pada WS tersebut yang direkap dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.

Tabel 3.1. Wilayah Sungai Lintas Negara

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Lokasi
1	2	3
Benanain	45	NTT - Timor Leste
Noelmina	186	NTT - Timor Leste
Sesayap	19	Kalimantan Timur - Serawak (Malaysia)
Mamberamo - Tami - Apauvar	25	Papua - Papua Nugini
Einlanden - Digul - Bikuma	29	Papua - Papua Nugini

Sumber : Lampiran I.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Tabel 3.2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	2	3
Alas - Singkil	8	Aceh - Sumatera Utara
Batang Natal - Batang Batahan	40	Sumatera Utara - Sumatera Barat
Rokan	15	Sumatera Utara - Riau - Sumatera Barat
Kampar	7	Riau - Sumatera Barat
Indragiri - Akuaman	24	Riau - Sumatera Barat
Batanghari	2	Jambi - Sumatera Barat
Teramang - Muar	15	Bengkulu - Jambi
Nasal - Padang Guci	19	Bengkulu - Sumatera Selatan - Lampung
Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau	28	Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung
Mesuji - Tulang Bawang	2	Lampung - Sumatera Selatan
Cidanau - Ciujung - Cidurian *	34	Banten - Jawa Barat

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	2	3
Kepulauan Seribu	40	DKI Jakarta - Banten
Ciliwung - Cisadane *	15	DKI Jakarta - Banten - Jawa Barat
Cimanuk - Cisanggarung	25	Jawa Barat - Jawa Tengah
Citanduy	24	Jawa Barat - Jawa Tengah
Progo - Opak - Serang	3	DI Yogyakarta - Jawa Tengah
Bengawan Solo	96	Jawa Timur - Jawa Tengah
Jelai - Kendawangan	11	Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat
Barito	4	Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan
Dumoga - Sangkub	55	Sulawesi Utara - Gorontalo
Limboto - Bolango - Bone	75	Gorontalo - Sulawesi Utara
Randangan	14	Gorontalo - Sulawesi Tengah
Palu - Lariang	52	Sulawesi Tengah - Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan
Kalukku - Karama	74	Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah
Pompengan - Larona	27	Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara
Saddang	24	Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat
Towari - Lasusua	28	Sulawesi Utara - Sulawesi Selatan
Lasolo - Konaweha	25	Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah
Omba	73	Papua Barat - Papua

Sumber : Lampiran I.2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Catatan : * Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 3.3. Wilayah Sungai Strategis Nasional

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	2	3
Aceh - Meureudu	30	Aceh
Woyla - Bateue	13	Aceh
Jambo Aye	13	Aceh
Belawan - Ular - Padang	11	Sumatera Utara
Toba - Asahan	1	Sumatera Utara
Siak	2	Riau
Kepulauan Batam - Bintan	31	Kepulauan Riau
Bangka	63	Kepulauan Bangka Belitung
Seputih - Sekampung	42	Lampung
Citarum *	19	Jawa Barat
Serayu - Bogowonto	15	Jawa Tengah
Jratunseluna	69	Jawa Tengah
Brantas	220	Jawa Timur
Bali - Penida	391	Bali
Lombok	197	Nusa Tenggara Barat

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	2	3
Sumbawa	555	Nusa Tenggara Barat
Flores	472	Nusa Tenggara Timur
Kapuas	9	Kalimantan Barat
Mentaya - Katingan	2	Kalimantan Tengah
Mahakam	12	Kalimantan Timur
Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas	89	Sulawesi Utara
Paguyaman	20	Gorontalo
Parigi - Poso	50	Sulawesi Tengah
Walanae - Cenranae	39	Sulawesi Selatan
Jeneberang	58	Sulawesi Selatan
Halmahera Utara	130	Maluku Utara
Halmahera Selatan	265	Maluku Utara
Ambon - Seram	166	Maluku
Kepulauan Yamdena - Wetar	153	Maluku

Sumber : Lampiran I.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai
 Catatan : * Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 3.4. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	2	3
Teunom - Lambeuso	14	Aceh
Pase - Peusangan	10	Aceh
Tamiang - Langsa	17	Aceh
Baru - Kluet	21	Aceh
Wampu - Besitang	13	Sumatera Utara
Bah Bolon	5	Sumatera Utara
Nias	43	Sumatera Utara
Sibundong - Batang Tom	16	Sumatera Utara
Barumun - Kualuh	2	Sumatera Utara
Batang Angkola - Batang Gadis	5	Sumatera Utara
Rete	3	Riau
Bengkalis - Meranti	37	Riau
Masang - Pasaman	8	Sumatera Barat
Silaut - Tarusan	17	Sumatera Barat
Pengabuan - Lagan	5	Jambi
Sebelat - Ketahun - Lais	19	Bengkulu
Bengkulu - Alas - Talo	9	Bengkulu
Belitung	91	Kepulauan Bangka Belitung
Semangka	116	Lampung

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	2	3
Cibaliung - Cisawarna	75	Banten
Ciliman - Cibungur	27	Banten
Cisadea - Cibareno	74	Jawa Barat
Ciwulan - Cilaki	72	Jawa Barat
Pemali - Comal	32	Jawa Tengah
Bodri - Kuto	12	Jawa Tengah
Madura - Bawean	173	Jawa Timur
Welang - Rejoso	36	Jawa Timur
Bondoyudo - Bedadung	47	Jawa Timur
Pekalen - Sampean	56	Jawa Timur
Baru - Bajulmati	60	Jawa Timur
Sumba	130	Nusa Tenggara Timur
Flotim Kep. - Lembata - Alor	439	Nusa Tenggara Timur
Sambas	4	Kalimantan Barat
Mempawah	5	Kalimantan Barat
Seruyan	3	Kalimantan Tengah
Kahayan	2	Kalimantan Tengah
Cengal - Batulicin	62	Kalimantan Selatan
Kendilo	9	Kalimantan Timur
Karangan	43	Kalimantan Timur
Berau - Kelai	15	Kalimantan Timur
Kayan	9	Kalimantan Timur
Poigar - Ranoyapo	24	Sulawesi Utara
Lambunu - Buol	99	Sulawesi Tengah
Bongka - Mentawa	109	Sulawesi Tengah
Laa - Tambalako	89	Sulawesi Tengah
Poleang - Roraya	174	Sulawesi Tenggara
Muna	106	Sulawesi Tenggara
Buton	95	Sulawesi Tenggara
Kepulauan Sula - Obi	184	Maluku Utara
Buru	53	Maluku
Kepulauan Kei - Aru	211	Maluku
Kamundan - Sebyar	91	Papua Barat
Wapoga - Mimika	97	Papua

Sumber : Lampiran I.4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Tabel 3.5. Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten /Kota
1	2	3	4
Simeulue	26	Aceh	Simeuleu
Kubu	7	Riau	Rokan Hilir
Bukit Batu	2	Riau	Bengkalis
Rawa	6	Riau	Siak
Guntung - Kateman	4	Riau	Indragiri Hilir
Kepulauan Karimun	22	Kepulauan Riau	Karimun
Kep. Lingga - Singkep	35	Kepulauan Riau	Lingga
Kep. Natuna - Anambas	29	Kepulauan Riau	Natuna
Siberut - Pagai - Sipora	86	Sumatera Barat	Mentawai
Enggano	10	Bengkulu	Bengkulu Utara
Kepulauan Karimunjawa	20	Jawa Tengah	Jepara
Wiso - Gelis	27	Jawa Tengah	Jepara
Pawan	6	Kalimantan Barat	Ketapang
Pulau Laut	41	Kalimantan Selatan	Kota Baru
Kepulauan Banggai	185	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan

Sumber : Lampiran I.5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

A.2. Danau/Situ

Danau merupakan cekungan pada permukaan bumi yang berisi air serta ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau buatan berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendalian banjir, wisata olahraga air (perahu dayung, kano, memancing), habitat satwa liar, media budidaya ikan dan penambah keindahan kota. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan situ atau danau karena memiliki nilai ekologi, ekonomi, edukatif, serta estetika.

Dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia II yang diselenggarakan pada Tahun 2011 di Semarang, ditegaskan kembali prioritas penanganan 15 danau di Indonesia yang telah ditetapkan pada konferensi sebelumnya di Bali. Lima belas danau tersebut dipilih

berdasarkan parahnya tingkat kerusakan dan besarnya dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Danau-danau kritis tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi), Rawa Danau (Banten), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Batur (Bali), Danau Tempe dan Danau Matana (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Jempang (Kalimantan Timur), serta Danau Sentani (Papua).

Pada Tabel 3.6. berikut ini disajikan data jumlah danau menurut provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak danau yang menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki dalam bidang sumber daya air. Dibutuhkan kesadaran untuk melestarikan danau dan lingkungan hidup dalam pengelolaan danau yang berkelanjutan untuk menghindari bencana yang tidak diinginkan akibat rusaknya ekosistem danau.

Tabel 3.6. Jumlah Danau di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Danau/Situ	Luas (km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
1	2	3	4
Aceh	8	5.798,00	242.000,00
Sumatera Utara	91	732,00	3.291.500,00
Sumatera Barat	58	398,11	5.569.356,00
Riau	32	137,00	
Jambi	14	5.000,00	
Sumatera Selatan	17	21.432,00	262,00
Bengkulu	7	309,00	2.100.000,00
Lampung	44	97,00	5.884.790,00
Kepulauan Bangka Belitung	546	28,01	72,01
Kepulauan Riau			
DKI Jakarta	45	25,00	
Jawa Barat	127	3.226,60	
Jawa Tengah	34		1,70
DI Yogyakarta	131	1,20	7,04
Jawa Timur	12		
Banten	78	21.163,73	2.902,00
Bali	17	25,72	1.024,35

Provinsi	Jumlah Danau/Situ	Luas (km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
1	2	3	4
Nusa Tenggara Barat	11	30,65	25,00
Nusa Tenggara Timur	60	26,00	995.612,00
Kalimantan Barat	55	305,80	
Kalimantan Tengah	46	195,43	
Kalimantan Selatan	3		
Kalimantan Timur	23	59.250,00	1.300,00
Sulawesi Utara	35	5,00	100.000,00
Sulawesi Tengah	38	426,85	
Sulawesi Selatan	16	881,71	40.424,90
Sulawesi Tenggara	14	244,00	748.957,00
Gorontalo	1		
Sulawesi Barat			
Maluku	3		
Maluku Utara	1		
Papua Barat			
Papua	27	2.449,78	

Sumber : SISDA Sumber Daya Air

B. Bangunan Air

B.1. Bendungan/Waduk

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan menjelaskan bahwa **bendungan** adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*) atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sementara **waduk** adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

Tujuan dibangunnya bendungan antara lain untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendali daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup. Bendungan juga berfungsi untuk

penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air.

Pemilik bendungan adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Pada Tabel 3.7. di bawah ini disajikan data rekapitulasi jumlah bendungan milik PU serta volume efektif dan manfaatnya menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Bendungan di Indonesia Milik PU Menurut Provinsi
(Kriteria Menurut PP Nomor 37 Tahun 2010)

Provinsi	Jumlah Bendungan	Volume Efektif (10 ³ m ³)	Luas Genangan (10 ³ m ²)	Manfaat		
				Irigasi (ha)	PLTA (MW)	Air Baku (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7
Aceh	2	141.790,00	2.654,50	5.640,50	0,00	0,00
Sumatera Utara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumatera Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jambi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumatera Selatan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bengkulu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lampung	3	597.250,00	25.161,00	0,00	28,00	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kepulauan Riau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKI Jakarta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	23	2.634.268,73	93.823,00	6.445,00	150,00	0,00
Jawa Tengah	44	1.698.426,36	1.958.438,00	116.218,00	53,40	6,61
DI Yogyakarta	2	25.000,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	97	760.564,52	60.420,45	89.595,00	519,75	36,00
Banten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bali	5	15.051,00	3.450,00	4.370,00	0,00	1.320,00
Nusa Tenggara Barat	51	252.774,50	21.444,61	24.479,00	1,11	0,00
Nusa Tenggara Timur	19	85.706,67	813,00	2.220,00	0,00	0,00
Kalimantan Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalimantan Selatan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalimantan Timur	5	58.116,00	306,35	1.000,00	0,00	0,53

Provinsi	Jumlah Bendungan	Volume Efektif (10 ³ m ³)	Luas Genangan (10 ³ m ²)	Manfaat		
				Irigasi (ha)	PLTA (MW)	Air Baku (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7
Sulawesi Utara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	4	125.800,00	34.142,00	0,00	24,15	0,00
Sulawesi Tenggara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorontalo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maluku	2	775,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Maluku Utara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papua Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papua	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indonesia	257	6.395.522,77	1.964.958,00	246.710,00	776,41	1.363,14

Sumber : Subdit Data dan Informasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU (Diperoleh September 2012)

B.2. Bendung

Bendung adalah suatu bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat tertentu yang membutuhkannya dan/atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen (SNI 03-2401-1991).

Fungsi utama dari bendung adalah untuk meninggikan elevasi muka air dari sungai yang dibendung sehingga air bisa disadap dan dialirkan ke saluran lewat bangunan pengambilan (*intake structure*). Bendung juga berfungsi sebagai alat pengendali dan pemonitor seluruh tata pengaturan air dan sebagai antisipasi bencana banjir.

Berdasarkan konstruksinya, terdapat dua tipe bendung, yaitu bendung sederhana dan bendung permanen. Terdapat dua jenis bendung permanen, yaitu bendung tetap dan bendung gerak. **Bendung tetap** adalah bendung yang terdiri dari ambang tetap, sehingga

muka air banjir tak dapat diatur elevasinya. **Bendung gerak** adalah bendung yang terdiri dari ambang tetap dilengkapi pintu bendung yang dapat digerakkan untuk mengatur muka air di bagian hulu, sehingga air sungai dapat disadap sesuai dengan kebutuhan dan muka air banjir dapat diatur. Kemudian berdasarkan bentuk alat pengaturnya, bendung gerak terbagi menjadi *sluice gate*, *radial gate*, dan bendung karet. Alat pengatur dari bendung karet dapat dikembang-kempiskan sesuai kebutuhan dengan menambah atau mengurangi isinya.

Tabel 3.8. Jumlah Bendung di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Bendung	Layanan/Manfaat Irigasi (ha)
1	2	3
Aceh	46	214.542
Sumatera Utara	46	101.942
Sumatera Barat	63	146.346
Riau	22	15.587
Jambi	28	46.574
Sumatera Selatan	17	128.217
Bengkulu	41	63.916
Lampung	34	118.362
Kepulauan Bangka Belitung	17	14.044
Kepulauan Riau	2	700
DKI Jakarta	8	
Jawa Barat	83	415.961
Jawa Tengah	230	9.445.286
DI Yogyakarta	9	21.792
Jawa Timur	133	4.232.018
Banten	52	111.325
Bali	36	10.601.454
Nusa Tenggara Barat	49	73.509
Nusa Tenggara Timur	3	15.722
Kalimantan Barat	66	31.941
Kalimantan Tengah	16	12.305
Kalimantan Selatan	47	63.770
Kalimantan Timur	27	36.472
Sulawesi Utara	46	43.625
Sulawesi Tengah	74	101.635
Sulawesi Selatan	103	288.976
Sulawesi Tenggara	61	40.683
Gorontalo	36	49.984
Sulawesi Barat	18	29.333

Provinsi	Jumlah Bendung	Layanan/Manfaat Irigasi (ha)
1	2	3
Maluku	14	25.109
Maluku Utara	11	14.763
Papua Barat	3	4.300
Papua	5	12.000

Sumber : SIGI PU

B.3. Embung dan Embung Potensi

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air ketika musim kemarau adalah dengan memanfaatkan limpahan air hujan dengan membangun embung (*onfarm reservoir*). **Embung** merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpahan atau air rembesan. Embung akan menyimpan air di musim hujan, kemudian airnya dapat dimanfaatkan pada musim kemarau atau saat kekurangan air. Sementara embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung atau bangunan konservasi air buatan.

Selain berfungsi sebagai media konservasi air, embung juga bisa menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, kemudian sebagai pengatur fungsi hidrolis, dan menjaga sistem serta proses-proses alami karena secara tidak langsung berperan sebagai penghasil oksigen melalui proses fotosintesa oleh berbagai jenis fitoplankton yang hidup di dalamnya.

Pada Tabel 3.9. dan 3.10. berikut ini ditampilkan jumlah embung dan embung potensi di Indonesia menurut provinsi. Tidak menutup kemungkinan jika kedepannya embung serta embung potensi dikembangkan menjadi media konservasi air layaknya bendungan atau waduk.

Tabel 3.9. Jumlah Embung di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Embung	Kapasitas (m ³)
1	2	3
Aceh	19	1,60
Sumatera Utara		
Sumatera Barat	26	
Riau		
Jambi		
Sumatera Selatan		
Bengkulu		
Lampung	47	6.287.541,60
Kepulauan Bangka Belitung	1	724.500,00
Kepulauan Riau		
DKI Jakarta		
Jawa Barat		
Jawa Tengah	259	4.600,00
DI Yogyakarta	13	597.624,75
Jawa Timur	2	2.150,00
Banten		
Bali	7	
Nusa Tenggara Barat	130	110,00
Nusa Tenggara Timur	311	477.771,00
Kalimantan Barat		
Kalimantan Tengah		
Kalimantan Selatan		
Kalimantan Timur		
Sulawesi Utara		
Sulawesi Tengah		
Sulawesi Selatan	57	7.308.687,00
Sulawesi Tenggara	19	3.632.692,00
Gorontalo		
Sulawesi Barat		
Maluku	34	219.611.295,00
Maluku Utara		
Papua Barat		
Papua	19	857.042,00

Sumber : SISDA Sumber Daya Air

Tabel 3.10. Jumlah Embung Potensi di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Embung Potensi	Kapasitas (m ³)	Irigasi (ha)
1	2	3	4
Aceh			
Sumatera Utara	62	4.865.000,00	11.483,00
Sumatera Barat			
Riau	6	1.976.125,00	
Jambi			
Sumatera Selatan			
Bengkulu			
Lampung	30	6.135.419,00	435,00
Kepulauan Bangka Belitung			
Kepulauan Riau			
DKI Jakarta			
Jawa Barat			
Jawa Tengah	55	25.757.500,00	8.393,00
DI Yogyakarta	32	506.461,50	
Jawa Timur	231	71.766.764,00	14.181,00
Banten			
Bali	29	3.134.093,00	16.793,00
Nusa Tenggara Barat	408	47.097.820,37	32.494,76
Nusa Tenggara Timur	161	31.127.981,31	4.885,44
Kalimantan Barat			
Kalimantan Tengah			
Kalimantan Selatan			
Kalimantan Timur			
Sulawesi Utara			
Sulawesi Tengah	17	1.560.000,00	1.835,00
Sulawesi Selatan	73	11.027.100,00	22.751,00
Sulawesi Tenggara	10	9.230.390,00	1.820,00
Gorontalo			
Sulawesi Barat			
Maluku	13	1.039.880,00	100,00
Maluku Utara			
Papua Barat			
Papua	16	228.412,86	262,98

Sumber : SISDA Sumber Daya Air

C. Daerah Irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjelaskan bahwa **irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa **Daerah Irigasi (DI)** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dalam penyediaan, pembangunan, pemberian, penggunaan, dan pembuangan irigasi.

Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah di luar irigasi rawa. Berdasarkan letaknya, daerah irigasi terdiri dari :

1. Daerah irigasi lintas negara merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu negara.
2. Daerah irigasi lintas provinsi merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dan jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
3. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.
4. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Pada Tabel 3.11 – 3.13 ditampilkan data luasan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penetapan pembagian kewenangan daerah irigasi digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Tabel 3.11. Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat

Provinsi	Lintas Provinsi (ha)	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	Lintas Kabupaten/Kota (ha)	Utuh Kabupaten/Kota (ha)
1	2	3	4	5
Lintas Provinsi				
BBWS Sumatera VI	18.936,00			
(Jambi dan Sumatera Barat)				
UPT	6.600,00			
(Bengkulu dan Sumatera Barat)				
BBWS Sumatera VIII				
Sumatera Selatan	59.728,00			
Lampung	8.100,00			
BBWS Citanduy				
Jawa Barat	5.052,00			
Jawa Tengah	22.417,00			
BBWS Citanduy				
Jawa Barat	432,00			
Jawa Tengah	563,00			
BBWS Serayu Opak				
Jawa Tengah	115,00			
DI Yogyakarta	149,00			
BBWS Bengawan Solo				
Jawa Tengah	24.461,00			
Jawa Timur	500,00			
BBWS Jratunseluna				
Jawa Tengah	564,00			
Jawa Timur	365,00			
Lintas Kabupaten/Kota				
Aceh		1	19.360,00	
Sumatera Utara		2	10.650,00	
Sumatera Barat		1	4.200,00	
Sumatera Selatan		1	10.163,00	
Lampung		2	97.116,00	
Banten		3	51.104,00	
Jawa Barat		6	346.056,00	
Jawa Tengah		14	190.155,00	
DI Yogyakarta		1	5.159,00	
Jawa Timur		13	150.567,00	

Provinsi	Lintas Provinsi (ha)	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	Lintas Kabupaten/Kota (ha)	Utuh Kabupaten/Kota (ha)
1	2	3	4	5
Bali		2	9.598,00	
Nusa Tenggara Barat		7	28.101,00	
Nusa Tenggara Timur				
Sulawesi Tengah		1	7.922,00	
Kalimantan Selatan		1	6.000,00	
Sulawesi Selatan		9	113.763,00	
Utuh Kabupaten/kota				
Aceh		12		101.561,00
Sumatera Utara		10		43.849,00
Sumatera Barat		10		63.747,00
Jambi		2		9.429,00
Sumatera Selatan		13		113.461,00
Bengkulu		4		23.608,00
Bangka Belitung		2		8.868,00
Lampung		23		176.526,00
Banten		3		48.441,00
Jawa Barat		27		270.015,00
Jawa Tengah		17		108.723,34
DI Yogyakarta		1		7.152,00
Jawa Timur		22		156.612,00
Nusa Tenggara Barat		3		12.673,00
Nusa Tenggara Timur		23		87.994,00
Kalimantan Selatan		4		15.090,00
Sulawesi Utara		3		16.782,00
Sulawesi Barat		2		20.085,00
Sulawesi Tengah		6		32.142,00
Sulawesi Tenggara		2		19.471,00
Sulawesi Selatan		33		260.701,00
Maluku		7		34.034,84
Maluku Utara		2		7.500,00
Papua		2		10.200,00
Papua Barat		1		3.450,00

Sumber : Lampiran I Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 3.12. Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi

Provinsi	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	Lintas Kabupaten/Kota (ha)	Utuh Kabupaten/Kota (ha)	Luas DI Kewenangan Pemerintah Provinsi
1	2	3	4	5
Aceh	44	4.344,00	72.303,00	76.647,00
Sumatera Utara	64	8.712,00	69.456,00	78.168,00
Sumatera Barat	55	14.305,21	36.830,73	51.135,94
Riau	57	0,00	104.784,00	104.784,00
Jambi	5	0,00	7.933,00	7.933,00
Sumatera Selatan	14	0,00	21.718,00	21.718,00
Bengkulu	11	514,00	13.689,00	14.203,00
Lampung	18	3.851,00	22.386,00	26.237,00
Kepulauan Bangka Belitung	5	0,00	9.036,00	9.036,00
Kepulauan Riau	0	0,00	0,00	0,00
DKI Jakarta	0	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	108	16.424,00	119.625,00	136.049,00
Jawa Tengah	98	32.694,01	56.266,00	88.960,01
DI Yogyakarta	44	4.890,87	12.222,00	17.112,87
Jawa Timur	188	49.862,00	139.897,00	189.759,00
Banten	13	0,00	23.203,00	23.203,00
Bali	33	8.033,00	23.872,00	31.905,00
Nusa Tenggara Barat	39	0,00	65.984,00	65.984,00
Nusa Tenggara Timur	41	1.630,00	56.295,00	57.925,00
Kalimantan Barat	8	0,00	11.704,00	11.704,00
Kalimantan Tengah	25	0,00	38.051,00	38.051,00
Kalimantan Selatan	26	0,00	41.602,00	41.602,00
Kalimantan Timur	47	0,00	63.051,00	63.051,00
Sulawesi Utara	14	2.895,00	16.533,00	19.428,00
Sulawesi Tengah	30	0,00	48.777,00	48.777,00
Sulawesi Selatan	35	5.016,00	56.488,00	61.504,00
Sulawesi Tenggara	13	1.406,00	18.085,00	19.491,00
Gorontalo	12	2.688,00	15.623,00	18.311,00
Sulawesi Barat	2	0,00	2.800,00	2.800,00
Maluku	22	0,00	38.499,00	38.499,00
Maluku Utara	33	0,00	43.809,80	43.809,80
Papua Barat	9	0,00	12.285,00	12.285,00
Papua	2	0,00	3.150,00	3.150,00

Sumber : Lampiran I Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 3.13. Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Provinsi	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	Utuh Kabupaten/Kota (ha)
1	2	3
Aceh	1.119	186.603,00
Sumatera Utara	932	182.723,00
Sumatera Barat	1.266	169.033,40
Riau	165	55.848,00
Jambi	86	15.886,00
Sumatera Selatan	131	34.696,00
Bengkulu	330	45.448,00
Lampung	762	122.825,29
Kepulauan Bangka Belitung	38	10.017,00
Kepulauan Riau		
DKI Jakarta		
Jawa Barat	1.017	219.640,00
Jawa Tengah	8.982	481.055,18
DI Yogyakarta	2.468	46.480,74
Jawa Timur	7.701	459.436,46
Banten	962	106.100,53
Bali	832	101.505,00
Nusa Tenggara Barat	304	102.723,00
Nusa Tenggara Timur	1.199	130.906,00
Kalimantan Barat	514	68.229,00
Kalimantan Tengah	103	35.930,00
Kalimantan Selatan	252	71.028,00
Kalimantan Timur	438	129.635,00
Sulawesi Utara	216	38.631,00
Sulawesi Tengah	162	61.157,49
Sulawesi Selatan	1.473	211.626,00
Sulawesi Tenggara	73	28.268,00
Gorontalo	30	12.620,00
Sulawesi Barat	214	28.442,00
Maluku	35	21.474,00
Maluku Utara	19	7.169,00
Papua Barat	9	4.621,00
Papua	28	5.811,00

Sumber : Lampiran I Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

D. Daerah Rawa

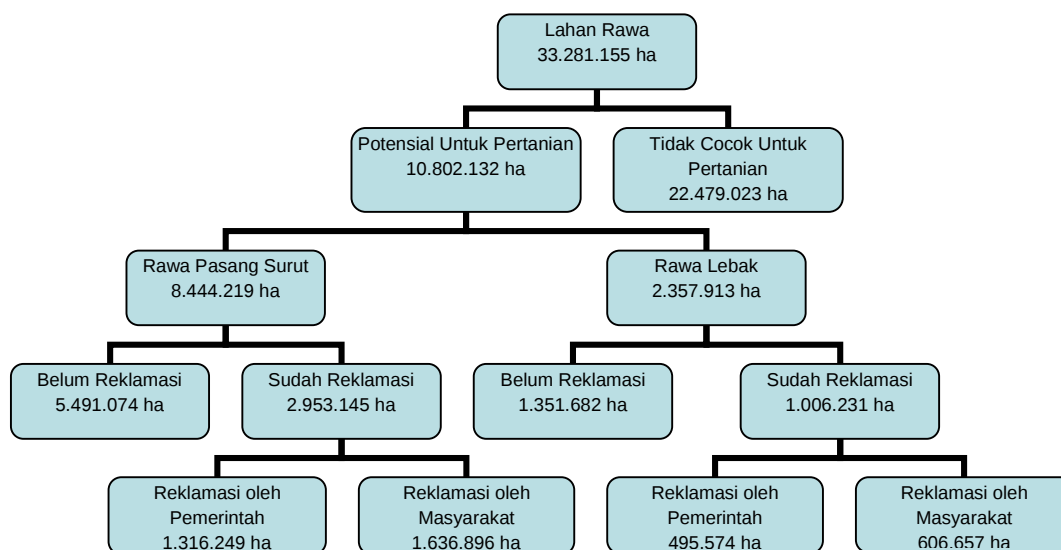
Rawa merupakan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Rawa berfungsi sebagai *reservoir* air yang dapat menjaga elevasi muka air daerah di atasnya maupun daerah genangan yang dapat meredam terjadinya banjir di daerah hilir.

Daerah rawa merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan pemerintah sebagai wilayah pengelolaan sumber air. Daerah rawa mempunyai arti penting dalam menunjang aspek fisik lingkungan suatu daerah aliran sungai.

Ada dua jenis rawa berdasarkan tipe perairannya, yaitu rawa pasang surut dan rawa non pasang surut atau rawa lebak. **Rawa pasang surut** adalah merupakan rawa yang sistem drainase atau sistem pengairannya dipengaruhi oleh gerakan pasang surut muka air sungai terdekat. Sementara **rawa non pasang surut atau rawa lebak** adalah rawa yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Daerah rawa ini merupakan lahan tanah berbentuk cekungan dan pada musim hujan seluruhnya digenangi air. Pada musim kemarau air tersebut berangsur-angsur kering atau bahkan menjadi kering sama sekali dalam masa yang relatif singkat (1-2 bulan).

Luas daerah rawa di Indonesia mencapai 33,28 juta ha dengan 10,8 juta ha diantaranya merupakan lahan rawa yang potensial untuk pertanian dan 22,48 juta ha tidak cocok untuk pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian terdiri dari 8,44 juta ha rawa pasang surut, dan 2,36 juta ha rawa lebak. Pada rawa pasang surut, sebesar 65% di antaranya atau seluas 5,49 juta ha sudah direklamasi. Sementara pada rawa lebak yang sudah direklamasi sebesar 57% atau 1,35 juta ha.

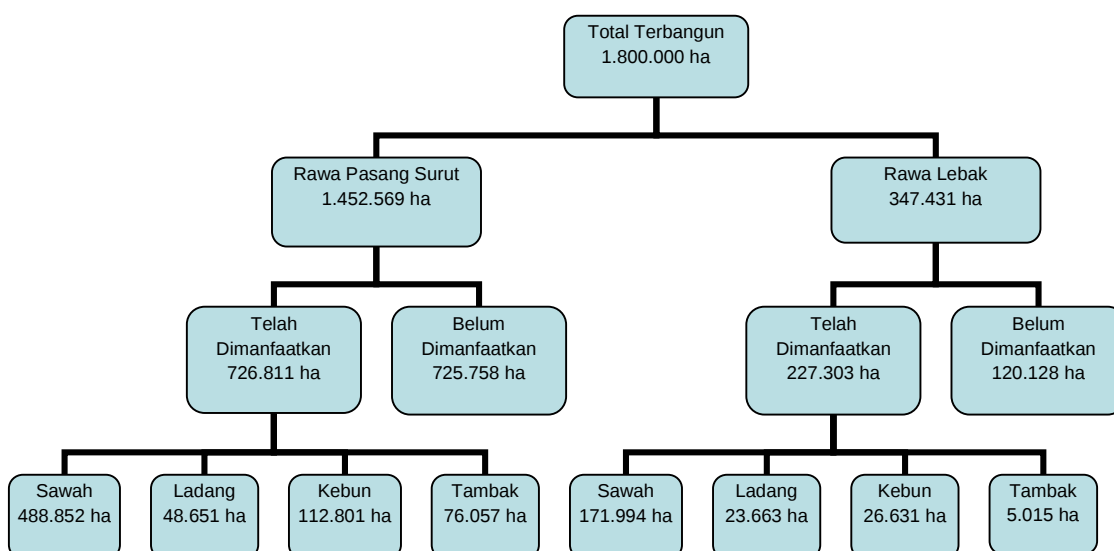
Gambar 3.1. Luas Daerah Rawa di Indonesia



Sumber : Sub Direktorat Data dan Informasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Luas rawa yang telah dibangun di Indonesia mencapai 1,8 juta ha yang terdiri dari 1,45 juta ha merupakan rawa pasang surut, dan 347 ribu ha adalah rawa lebak. Lahan rawa yang telah terbangun ada yang telah dimanfaatkan sebagai sawah, ladang, kebun dan tambak, serta sebagian lagi belum dimanfaatkan. Pohon rawa nasional serta pemanfaatannya dapat dilihat pada Gambar 3.2. di bawah ini.

Gambar 3.2. Pohon Rawa Nasional



Sumber : Sub Direktorat Data dan Informasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Tabel 3.14a. Potensi Daerah Rawa dan Pemanfaatannya di Indonesia

Provinsi	Luas (ha)		Belum Direklamasi (ha)	Sudah Direklamasi (ha)
	Jenis Rawa	Total (ha)		
1	2	3	4	5
Aceh	Pasang Surut	120.309	68.149	52.160
	Lebak	96.049	86.549	9.500
Sumatera Utara	Pasang Surut	247.293	99.793	147.500
	Lebak	70.382	26.553	43.829
Riau	Pasang Surut	640.693	148.666	492.027
	Lebak	50.198	15.284	34.914
Jambi	Pasang Surut	233.033	78.481	154.552
	Lebak	38.321	23.625	14.696
Sumatera Barat	Pasang Surut	40.181	39.756	425
	Lebak	326.113	224.931	101.182
Sumatera Selatan	Pasang Surut	455.949	25.828	430.121
	Lebak	157.846	37.161	120.685
Bengkulu	Pasang Surut	3.072	2.500	572
	Lebak	87.500	55.920	31.580
Lampung	Pasang Surut	201.851	57.640	144.211
	Lebak	72.825	24.000	48.825
Kepulauan Bangka Belitung	Pasang Surut	55.084	53.259	1.825
	Lebak	71.350	12.000	59.350
Banten	Pasang Surut	19.511	5.000	14.511
	Lebak	-	-	-
Jawa Barat	Pasang Surut	52.069	4.630	47.439
	Lebak	-	-	-
Jawa Tengah	Pasang Surut	32.028	1.000	31.028
	Lebak	-	-	-
DI Yogyakarta	Pasang Surut	675	650	25
	Lebak	-	-	-
Jawa Timur	Pasang Surut	62.207	4.233	57.974
	Lebak	18.461	-	18.461
Kalimantan Barat	Pasang Surut	239.541	36.233	203.308
	Lebak	1.585	-	1.585
Kalimantan Tengah	Pasang Surut	658.003	260.837	397.166
	Lebak	78.061	24.028	54.033
Kalimantan Selatan	Pasang Surut	144.700	56.000	88.700
	Lebak	105.124	-	105.124
Kalimantan Timur	Pasang Surut	497.371	95.837	401.534
	Lebak	239.637	-	239.637
Gorontalo	Pasang Surut	11.675	10.675	1.000
	Lebak	22.507	22.507	-
Sulawesi Selatan	Pasang Surut	251.336	25.522	225.814
	Lebak	55.074	17.061	38.013

Provinsi	Luas (ha)		Belum Direklamasi (ha)	Sudah Direklamasi (ha)
	Jenis Rawa	Total (ha)		
1	2	3	4	5
Selawesi Barat	Pasang Surut	61.887	59.887	2.000
	Lebak	10.814	10.814	-
Sulawesi Tengah	Pasang Surut	74.124	69.812	4.312
	Lebak	22.800	5.800	17.000
Sulawesi Tenggara	Pasang Surut	125.352	79.041	46.311
	Lebak	116.620	93.230	23.390
Papua	Pasang Surut	4.216.950	4.208.295	8.655
	Lebak	714.771	671.569	43.202
Papua Barat	Pasang Surut	-	-	-
	Lebak	1.200	-	1.200
Indonesia	Pasang Surut	8.444.219	5.491.074	2.953.145
	Lebak	2.357.913	1.351.682	1.006.231
	Jumlah	10.802.132	6.842.756	3.959.376

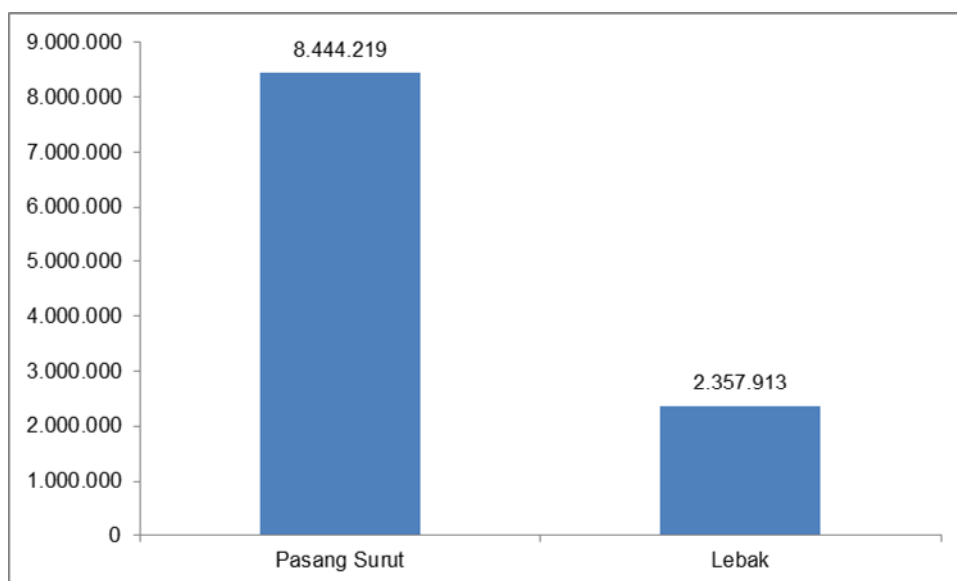
Tabel 3.14b. Potensi Daerah Rawa dan Pemanfaatannya di Indonesia

Provinsi	Pemanfaatan					Belum Dimanfaatkan	Reklamasi Oleh	
	Sawah	Kebun	Tambak	Lainnya	Jumlah		Pemerintah	Rakyat/ Swasta
1	6	7	8	9	10	11	12	13
Aceh	-	-	51.854	-	51.854	306	14.951	37.209
	5.452	705	-	956	7.113	2.387	9.500	
Sumatera Utara	93.990	50.180	3.130	-	147.300	200	28.489	119.011
	36.527	7.530	20	-	44.077	-	11.637	32.192
Riau	75.173	223.585	462	24.938	324.158	167.869	217.748	274.279
	9.205	11.621	-	2.688	23.514	11.400	13.630	21.284
Jambi	-	-	-	-	-	154.552		154.552
	8.342	2.665	-	170	11.177	3.519		14.696
Sumatera Barat			425	-	425	-		425
	14.370	73.820	-	1.330	89.520	11.662	30.584	70.598
Sumatera Selatan	182.763	56.934	7.946	95.504	343.147	86.974	384.334	45.787
	48.782	1.500	-	23.339	73.621	47.064	13.900	106.785
Bengkulu	-	-	572	-	572	-		572
	11.118	4.378	-	588	16.084	15.496	25.600	5.980
Lampung	40.949	-	98.735	2.000	141.684	2.527	65.655	78.556
	33.438	1.615		3.472	38.525	10.300	48.825	
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	1.825	-	1.825	-		1.825
	25.950	8.800	-	14.785	49.535	9.815	6.952	52.398

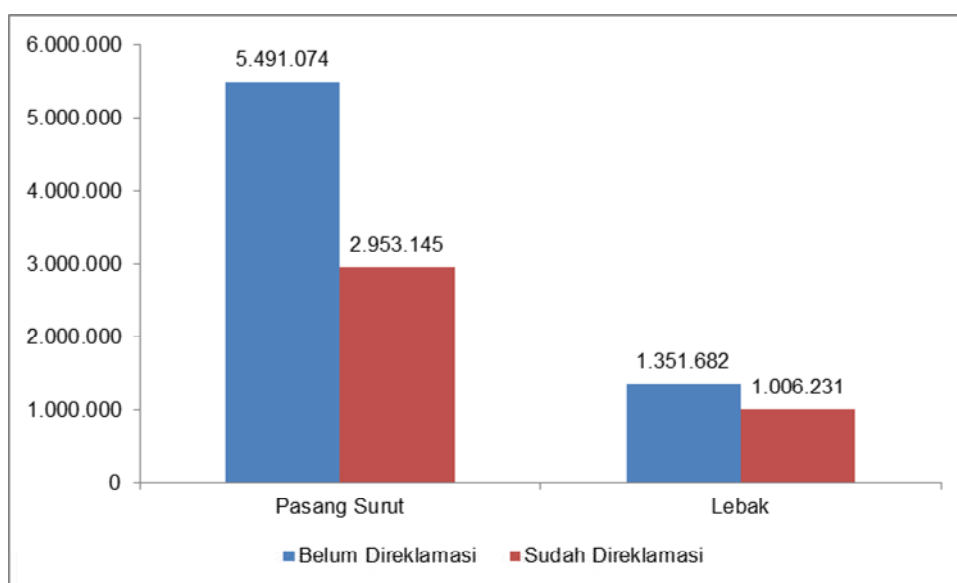
Provinsi	Pemanfaatan					Belum Dimanfaatkan	Reklamasi Oleh	
	Sawah	Kebun	Tambak	Lainnya	Jumlah		Pemerintah	Rakyat/Swasta
1	6	7	8	9	10	11	12	13
Banten	-	-	14.511	-	14.511	-	-	14.511
	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	47.439	-	47.439	-	7.660	39.779
	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	-	31.028	-	31.028	-	14.916	16.112
	-	-	-	-	-	-	-	-
DI Yogyakarta	-	-	25	-	25	-	-	25
	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur		-	57.974	-	57.974	-	13.793	44.181
	18.461	-	-	-	18.461	-	18.461	-
Kalimantan Barat	117.313	-	3.646	654	121.613	121.613	122.886	80.422
	1.585	-	-	-	1.585	1.585	-	1.585
Kalimantan Tengah	163.884	16.046	4.772	57.849	242.551	154.615	292.371	104.795
	24.890	14.449		10.282	49.621	4.412	107.910	42.123
Kalimantan Selatan	52.985	7.593	2.364	11.558	74.500	14.200	81.623	7.077
	77.026	-	-	-	77.026	28.098	95.566	9.558
Kalimantan Timur	10.098	18.165	23.279	10.435	61.977	339.557	6.650	394.884
	12.954	18.183	-	12.000	43.137	196.500	25.693	213.944
Gorontalo	-	-	1.000	-	1.000	-	-	1.000
	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	1.019	-	47.437	9.978	58.434	167.380	26.478	199.336
	9.128	250	630	2.846	12.854	25.159	4.974	33.039
Sulawesi Barat	-	-	1.280	80	1.360	640	1.000	1.000
	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	400	-	3.812	-	4.212	100	3.550	762
	6.600	1.900	-	865	9.365	7.635	17.000	-
Sulawesi Tenggara	2.104	250	29.276	7.521	39.151	7.160	34.145	12.166
	11.690	-	-	4.623	16.313	7.077	20.940	2.450
Papua	8.655	-	-	-	8.655	-	-	8.655
	14.305	-	-	1.480	15.785	25.975	43.202	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	850	1.100	150	1.200	-
Indonesia	749.333	372.753	432.792	220.517	1.775.395	1.217.693	1.316.249	1.636.896
	370.073	147.416	650	80.274	598.413	408.234	495.574	606.657
	1.119.406	520.169	433.442	300.791	2.373.808	1.625.927	1.811.823	2.243.553

Sumber : Sub Direktorat Data dan Informasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Gambar 3.3. Grafik Luas Potensi Daerah Rawa di Indonesia Berdasarkan Jenisnya (ha)



Gambar 3.4. Grafik Luas Potensi Daerah Rawa di Indonesia Berdasarkan Reklamasi dan Jenisnya (ha)



E. Bangunan Pengaman Pantai

Pantai merupakan daerah pertemuan antara laut dan daratan yang diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Daerah pantai menjadi daerah yang penting dan perlu mendapat perhatian karena gelombang laut bisa menyebabkan abrasi dan merusak daerah pesisir pantai. Abrasi yang terjadi, bisa disebabkan oleh kegiatan manusia, bencana alam, maupun perubahan iklim. Untuk mencegah mundurnya garis pantai akibat abrasi gelombang laut, dibangunlah bangunan pengaman pantai.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09 Tahun 2010 tentang Pengamanan Pantai dijelaskan bahwa **pengamanan pantai** adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi dan akresi. Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap:

- masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (*rob*), erosi serta abrasi;
- fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai;
- perairan pantai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perkotaan, limbah industri, dan limbah-limbah lainnya; dan
- pendangkalan muara sungai.

Pada Tabel 3.15. berikut ini ditampilkan data panjang bangunan pengaman pantai di beberapa provinsi di Indonesia.

Tabel 3.15. Panjang Bangunan Pengaman Pantai di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Panjang Bangunan Pengaman Pantai (m)
1	2
Sumatera Barat	37.870
Bengkulu	11.054
Lampung	2.143
Kepulauan Riau	2.260
Jawa Barat	8.259
Jawa Tengah	3.596
Bali	19.207
Nusa Tenggara Barat	2.133
Nusa Tenggara Timur	11.664
Kalimantan Barat	18.976
Kalimantan Tengah	6.174
Kalimantan Selatan	3.621
Sulawesi Utara	1.130
Sulawesi Selatan	976
Gorontalo	11.232
Maluku	7.913
Maluku Utara	36.025
Papua Barat	1.412
Papua	1.765

Sumber : Profil BWS Sumatera V, BWS Sumatera VII, Profil BBWS Mesuji Sekampung
 Profil BWS Sumatera IV, Profil BBWS Citarum, Dinas SDA Jawa Tengah, BWS Bali Penida
 Data dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Lombok dan WS Sumbawa
 BWS Nusa Tenggara II, Profil BWS Kalimantan I, BWS Kalimantan II
 Profil BWS Sulawesi I, BBWS Pompengan Jeneberang, BWS Sulawesi II, BWS Maluku
 Profil BWS Maluku Utara, Profil BWS Papua, Profil BWS Papua

F. Analisis Statistik Infrastruktur Sumber Daya Air

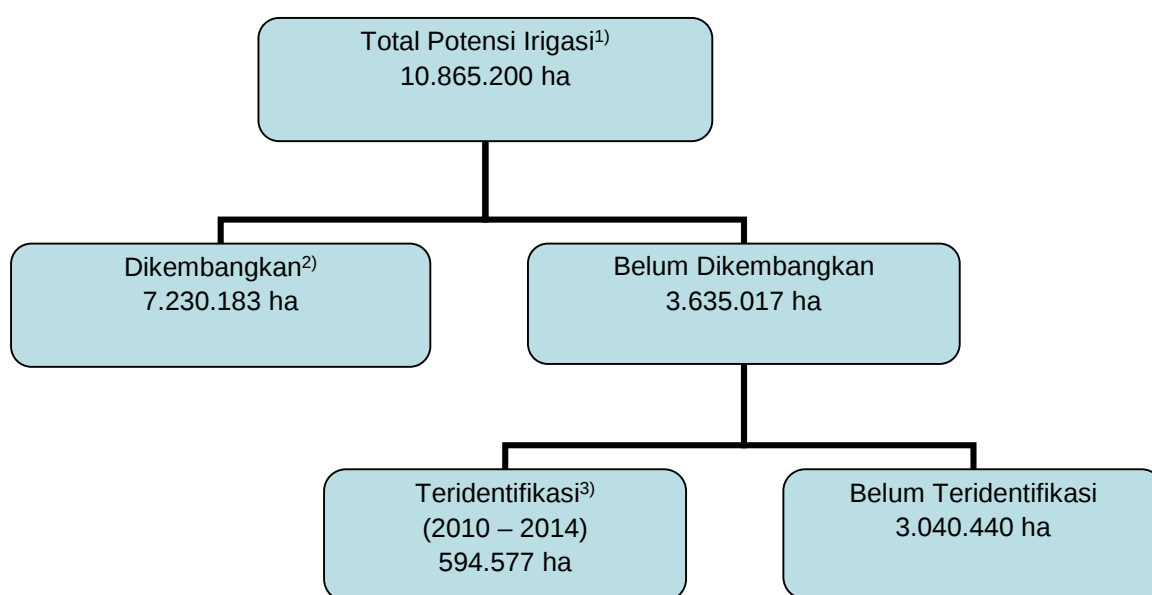
Pengelolaan sumber daya air menjadi tantangan sekaligus persoalan yang penting bagi keberlangsungan bangsa. Air sebagai sumber kehidupan perlu pengelolaan yang bijak agar manfaatnya dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi saat ini, melainkan juga generasi selanjutnya. Namun di samping itu, air juga dapat mendatangkan bencana jika daya rusaknya tidak dikendalikan.

Untuk meminimumkan dampak terjadinya krisis air bersih yang telah dan mungkin akan terjadi, perlu dilakukan upaya penanganan baik secara fisik maupun non fisik terhadap

sumber-sumber air baku yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses terhadap air bersih, penyediaan air baku, pengamanan pantai, dan sebagainya. Salah satu infrastruktur SDA yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional adalah irigasi.

Seperti terlihat pada Gambar 3.6. luas daerah irigasi yang sudah dikembangkan di Indonesia saat ini mencapai 7,23 juta hektar yang terbagi menjadi 32,02% atau seluas 2,315 juta hektar merupakan kewenangan pemerintah pusat, 19,68% atau 1,42 juta hektar kewenangan pemerintah provinsi, dan 48,30% atau 3,49 juta hektar kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 3.5. Potensi Irigasi di Indonesia



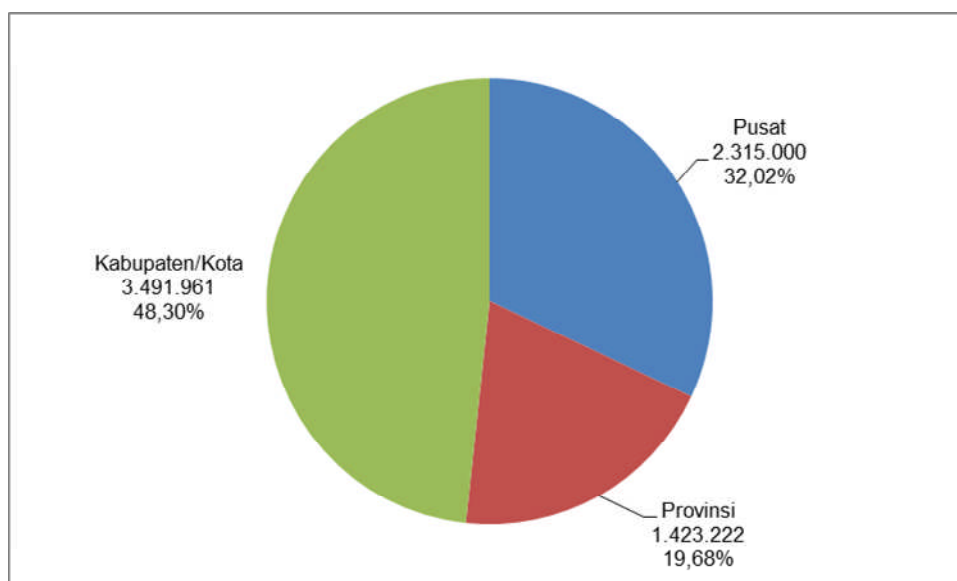
Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PU

Catatan : 1) Formulation of Irrigation Development Program (FIDP) in Indonesia, JICA, 1993

2) Kepmen PU No. 390 Tahun 2007, yang telah direvisi Tahun 2010

3) Identifikasi Direktorat Irigasi Tahun 2009

Gambar 3.6. Luas Daerah Irigasi di Indonesia Berdasarkan Kewenangan (ha)



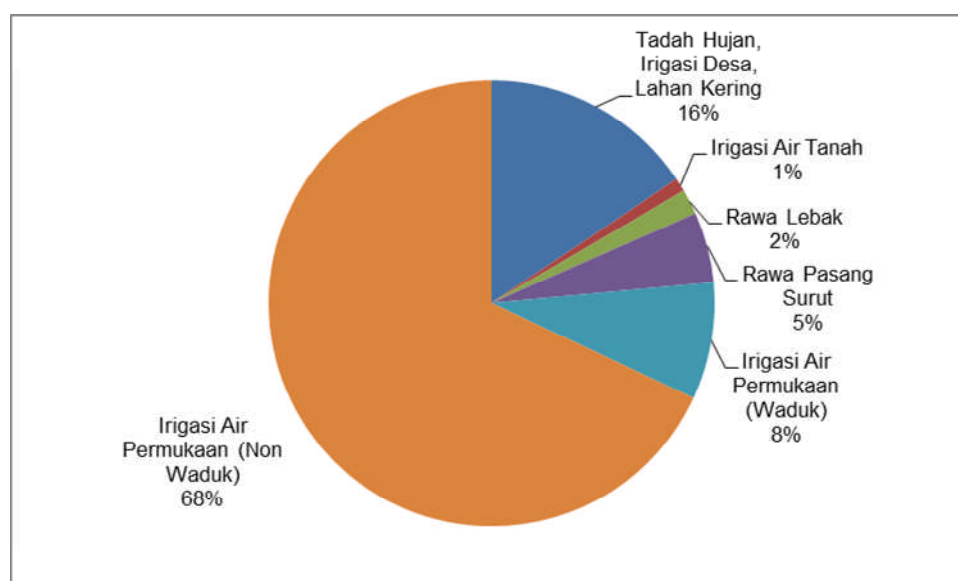
Areal sawah di Indonesia dikelola dengan menggunakan beberapa jenis pengairan, di antaranya adalah sawah tadah hujan, irigasi desa, lahan kering, jaringan irigasi air tanah (JIAT), rawa (rawa lebak dan rawa pasang surut), serta irigasi air permukaan yang berasal dari waduk maupun non waduk. Sampai saat ini, hanya sekitar 800.000 ha daerah irigasi yang pasokan airnya terjamin oleh waduk.

Tabel 3.16. Gambaran Umum Areal Sawah di Indonesia

Areal Sawah	Luas (juta ha)
1	2
Tadah Hujan, Irigasi Desa, Lahan Kering	1,470
Irigasi Air Tanah	0,092
Rawa Lebak	0,172
Rawa Pasang Surut	0,489
Irigasi Air Permukaan (Waduk)	0,799
Irigasi Air Permukaan (Non Waduk)	6,431

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PU

Gambar 3.7. Gambaran Umum Areal Sawah di Indonesia



Dilihat dari sistem pengairannya, jaringan irigasi air permukaan (waduk dan non waduk) memberi kontribusi $\pm 85\%$ terhadap jumlah produksi padi nasional di Tahun 2010, 2011 dan 2012. Kemudian sawah tadah hujan, irigasi desa dan lahan kering sebesar 10%, rawa yang terdiri dari rawa lebak dan pasang surut 4%, dan jaringan irigasi air tanah 1%.

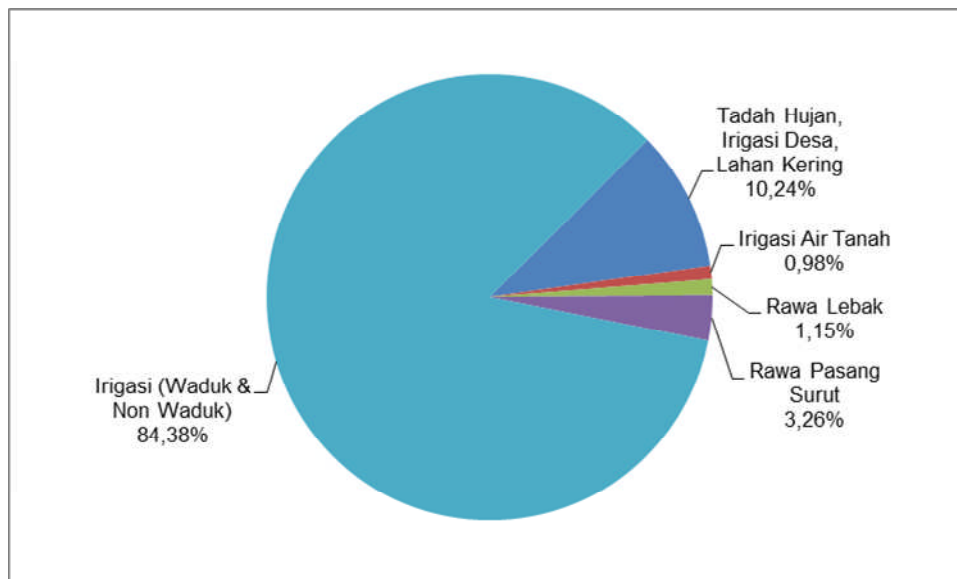
Tabel 3.17. Dukungan Jaringan Irigasi Terhadap Produksi Padi Nasional

Jaringan Irigasi	Jumlah Produksi Padi (ton)		
	2010	2011	2012
1	2	3	4
Tadah Hujan, Irigasi Desa, Lahan Kering	6.650.511,47	6.297.411,14	7.068.961,17
Irigasi Air Tanah	677.782,40	677.782,40	677.782,40
Rawa Lebak	791.172,40	791.172,40	791.172,40
Rawa Pasang Surut	2.248.719,20	2.249.719,20	2.248.719,20
Irigasi (Waduk & Non Waduk)	56.441.642,53	55.741.818,86	58.269.490,83

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PU

Catatan : Diolah berdasarkan BPS ATAP 2010, 2011 dan ASEM 2012

Gambar 3.8. Dukungan Jaringan Irigasi Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2012



Sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan irigasi diantaranya adalah penurunan kondisi *catchment area* yang berdampak pada penurunan debit air pada irigasi non waduk. Kerusakan infrastruktur irigasi terutama pada daerah irigasi kewenangan daerah, dimana irigasi kewenangan daerah merupakan 68% dari total irigasi permukaan di Indonesia. Selain itu sebagian dari irigasi strategis di Indonesia di bangun pada masa awal kemerdekaan, sehingga telah melewati umur ekonomisnya dan telah berubah lingkungan strategisnya. Dibutuhkan upaya-upaya khusus di samping melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi terhadap daerah irigasi strategis tersebut.

BAB IV

STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA

A. Jalan Nasional

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan sistem transportasi di Tanah Air. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Jaringan transportasi yang baik akan membawa dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi program prioritas seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dan kendaraan pengguna jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa **jalan umum** adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Tanggung jawab pembinaan dan pengelolaan jalan nasional berada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur jalan lainnya seperti jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jembatan-jembatan yang ada di ruas-ruas jalan tersebut masing-masing menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

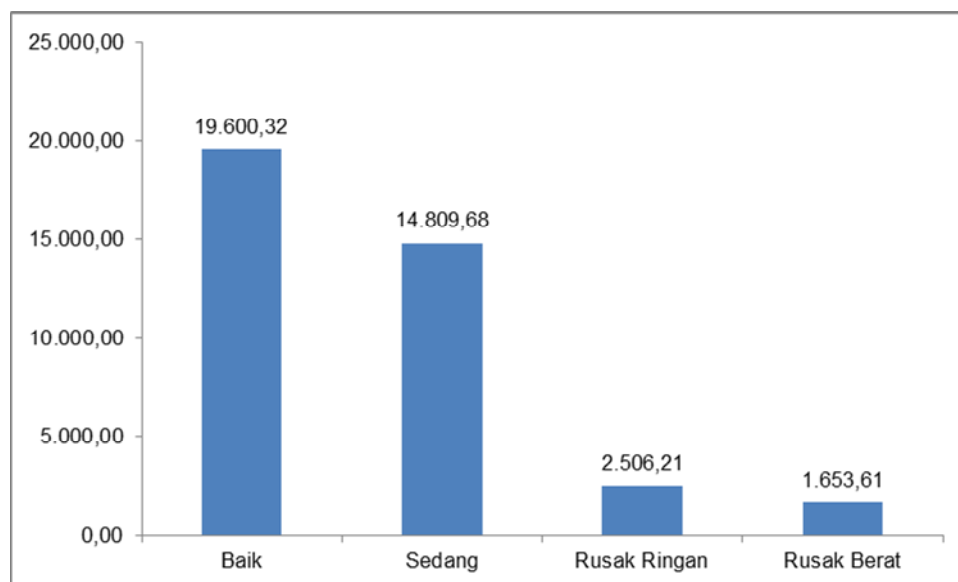
Pada Tabel 4.1 - 4.3 di bawah ini ditampilkan data panjang dan persentase jalan nasional dirinci menurut provinsi dan kondisi umum serta kemantapan jalan. Pada Semester 1 Tahun 2013, jalan nasional dalam kondisi baik sepanjang 19.600,32 km atau 50,82 %; dalam kondisi sedang 14.809,68 km atau 38,40 %; kondisi rusak ringan 2.506,21 km atau 6,50 %; dan kondisi rusak berat sepanjang 1.653,61 km atau 4,29 %.

Tabel 4.1. Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan
Semester ke-1 Tahun 2013

Provinsi	Panjang Total (km)	Kondisi Umum Jalan			
		Kondisi Permukaan Jalan (km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
Aceh	1.803,35	1.048,90	633,08	70,07	51,30
Sumatera Utara	2.249,64	590,07	1.123,19	297,30	239,08
Sumatera Barat	1.212,89	677,09	465,81	54,64	15,34
Riau	1.134,47	566,31	444,65	61,45	62,05
Kepulauan Riau	334,00	240,05	79,43	7,98	6,54
Jambi	936,48	473,40	406,19	50,81	6,07
Bengkulu	783,87	494,27	242,74	33,44	13,42
Sumatera Selatan	1.444,26	160,21	1.196,85	73,86	13,34
Kepulauan Bangka Belitung	509,59	484,20	24,04	1,20	0,15
Lampung	1.159,57	266,00	710,90	116,69	65,98
DKI Jakarta	142,65	37,14	102,68	2,82	0,00
Banten	476,49	266,46	172,58	30,81	6,64
Jawa Barat	1.351,13	803,21	462,48	51,91	33,53
Jawa Tengah	1.390,57	257,55	1.046,63	86,39	0,00
DI Yogyakarta	223,16	213,85	7,31	2,00	0,00
Jawa Timur	2.027,01	328,45	1.456,00	165,09	77,47
Kalimantan Barat	1.664,55	1.124,87	376,54	107,77	55,37
Kalimantan Tengah	1.714,83	968,00	542,62	148,00	56,22
Kalimantan Timur	2.118,17	1.260,47	537,81	176,31	143,58
Kalimantan Selatan	866,09	707,59	142,96	11,04	4,50
Bali	535,23	433,52	100,81	0,90	0,00
Nusa Tenggara Barat	632,17	510,08	118,80	2,62	0,68
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	951,11	381,88	66,96	6,74
Sulawesi Utara	1.319,23	523,23	690,84	28,54	76,63
Gorontalo	606,70	222,89	256,92	85,46	41,43
Sulawesi Tengah	2.181,95	905,12	969,05	161,21	146,56
Sulawesi Barat	571,98	451,86	104,49	10,77	4,86
Sulawesi Selatan	1.722,86	658,72	943,18	80,66	40,29
Sulawesi Tenggara	1.397,05	744,99	314,09	190,20	147,77
Maluku	1.066,65	851,88	78,22	29,50	107,05
Maluku Utara	511,89	489,35	15,66	6,87	0,00
Papua	2.111,44	1.178,74	577,53	205,16	150,00
Papua Barat	963,24	710,74	83,71	87,78	81,01
Indonesia	38.569,82	19.600,32	14.809,68	2.506,21	1.653,61

Sumber : Subdit Informasi dan Komunikasi Ditjen Bina Marga

Gambar 4.1. Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester 1 Tahun 2013 (km)



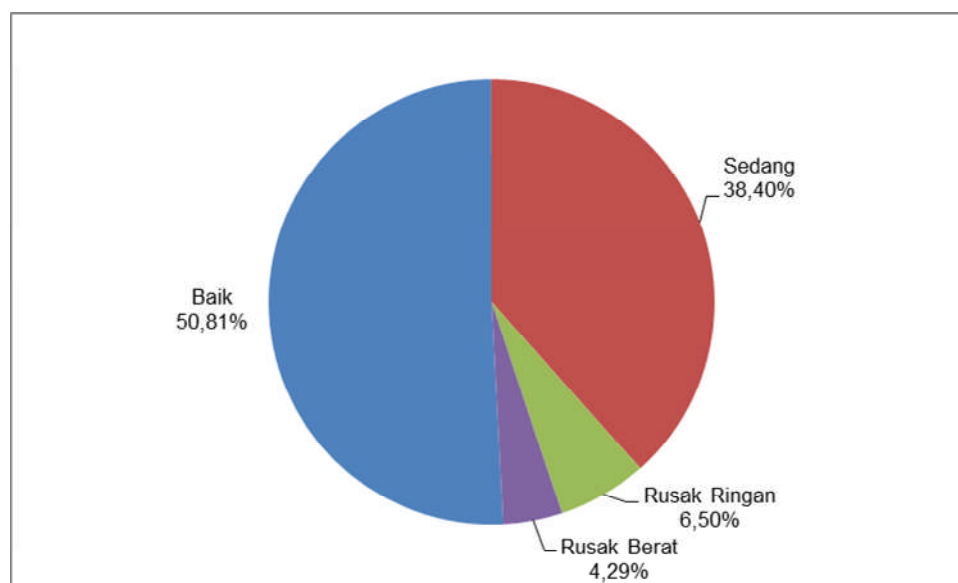
Tabel 4.2. Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester ke-1 Tahun 2013

Provinsi	Kondisi Umum Jalan			
	Kondisi Permukaan Jalan (%)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5
Aceh	58,16	35,11	3,89	2,84
Sumatera Utara	26,23	49,93	13,22	10,63
Sumatera Barat	55,82	38,40	4,51	1,27
Riau	49,92	39,20	5,42	5,47
Kepulauan Riau	71,87	23,78	2,39	1,96
Jambi	50,55	43,37	5,43	0,65
Bengkulu	63,06	30,97	4,27	1,71
Sumatera Selatan	11,09	82,87	5,11	0,92
Kepulauan Bangka Belitung	95,02	4,72	0,23	0,03
Lampung	22,94	61,31	10,06	5,69
DKI Jakarta	26,04	71,98	1,98	0,00
Banten	55,92	36,22	6,47	1,39
Jawa Barat	59,45	34,23	3,84	2,48
Jawa Tengah	18,52	75,27	6,21	0,00
DI Yogyakarta	95,83	3,28	0,90	0,00
Jawa Timur	16,20	71,83	8,14	3,82

Provinsi	Kondisi Umum Jalan			
	Kondisi Permukaan Jalan (%)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5
Kalimantan Barat	67,58	22,62	6,47	3,33
Kalimantan Tengah	56,45	31,64	8,63	3,28
Kalimantan Timur	59,51	25,39	8,32	6,78
Kalimantan Selatan	81,70	16,51	1,27	0,52
Bali	81,00	18,83	0,17	0,00
Nusa Tenggara Barat	80,69	18,79	0,41	0,11
Nusa Tenggara Timur	67,61	27,15	4,76	0,48
Sulawesi Utara	39,66	52,37	2,16	5,81
Gorontalo	36,74	42,35	14,09	6,83
Sulawesi Tengah	41,48	44,41	7,39	6,72
Sulawesi Barat	79,00	18,27	1,88	0,85
Sulawesi Selatan	38,23	54,75	4,68	2,34
Sulawesi Tenggara	53,33	22,48	13,61	10,58
Maluku	79,86	7,33	2,77	10,04
Maluku Utara	95,60	3,06	1,34	0,00
Papua	55,83	27,35	9,72	7,10
Papua Barat	73,79	8,69	9,11	8,41
Indonesia	50,82	38,40	6,50	4,29

Sumber : Subdit Informasi dan Komunikasi Ditjen Bina Marga

Gambar 4.2. Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester 1 Tahun 2013 (%)



Jika dilihat dari kemantapannya, maka jalan yang dikatakan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dalam kondisi baik dan sedang. Sementara jalan tidak mantap terdiri dari rusak ringan dan rusak berat. Jalan nasional dalam kondisi mantap di Semester 1 Tahun 2013 sepanjang 34.410,00 km atau 89,21 % dan dalam kondisi tidak mantap sepanjang 4.159,82 km atau 10,79 %.

Tabel 4.3. Panjang dan Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Kemantapan Jalan Semester ke-1 Tahun 2013

Provinsi	Kondisi Kemantapan			
	Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
1	2	3	4	5
Aceh	1.681,98	93,27	121,37	6,73
Sumatera Utara	1.713,26	76,16	536,39	23,84
Sumatera Barat	1.142,90	94,23	69,99	5,77
Riau	1.010,96	89,11	123,50	10,89
Kepulauan Riau	319,48	95,65	14,52	4,35
Jambi	879,60	93,93	56,88	6,07
Bengkulu	737,01	94,02	46,85	5,98
Sumatera Selatan	1.357,06	93,96	87,20	6,04
Kepulauan Bangka Belitung	508,24	99,74	1,35	0,26
Lampung	976,91	84,25	182,67	15,75
DKI Jakarta	139,83	98,02	2,82	1,98
Banten	439,04	92,14	37,46	7,86
Jawa Barat	1.265,69	93,68	85,44	6,32
Jawa Tengah	1.304,18	93,79	86,39	6,21
DI Yogyakarta	221,16	99,10	2,00	0,90
Jawa Timur	1.784,45	88,03	242,56	11,97
Kalimantan Barat	1.501,41	90,20	163,14	9,80
Kalimantan Tengah	1.510,62	88,09	204,21	11,91
Kalimantan Timur	1.798,28	84,90	319,89	15,10
Kalimantan Selatan	850,55	98,21	15,54	1,79
Bali	534,33	99,83	0,90	0,17
Nusa Tenggara Barat	628,88	99,48	3,30	0,52
Nusa Tenggara Timur	1.332,98	94,76	73,70	5,24
Sulawesi Utara	1.214,06	92,03	105,17	7,97
Gorontalo	479,81	79,09	126,89	20,91
Sulawesi Tengah	1.874,17	85,89	307,77	14,11
Sulawesi Barat	556,35	97,27	15,63	2,73
Sulawesi Selatan	1.601,90	92,98	120,96	7,02
Sulawesi Tenggara	1.059,08	75,81	337,97	24,19
Maluku	930,10	87,20	136,55	12,80

Provinsi	Kondisi Kemantapan			
	Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
1	2	3	4	5
Maluku Utara	505,02	98,66	6,87	1,34
Papua	1.756,27	83,18	355,16	16,82
Papua Barat	794,45	82,48	168,79	17,52
Indonesia	34.410,00	89,21	4.159,82	10,79

Sumber : Subdit Informasi dan Komunikasi Ditjen Bina Marga

B. Jalan Strategis Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga dijelaskan bahwa **Jalan Strategis Nasional** adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Pada Tabel 4.4. di bawah ini disajikan data panjang jalan strategis nasional rencana sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 92/KPTS/M/2011.

Tabel 4.4. Jalan Strategis Nasional Rencana

Provinsi	Panjang Ruas (km)
1	2
Aceh	520,680
Sumatera Utara	483,187
Sumatera Barat	267,406
Riau	270,926
Kepulauan Riau	117,373
Jambi	347,915
Bengkulu	121,400
Sumatera Selatan	137,320
Lampung	18,160
DKI Jakarta	7,600

Provinsi	Panjang Ruas (km)
1	2
Banten	187,224
Jawa Barat	492,268
Jawa Tengah	414,436
DI Yogyakarta	145,521
Jawa Timur	726,841
Kalimantan Barat	528,689
Kalimantan Tengah	538,782
Kalimantan Timur	313,910
Kalimantan Selatan	238,597
Bali	2,330
Nusa Tenggara Barat	202,838
Nusa Tenggara Timur	1,103,585
Sulawesi Utara	293,052
Gorontalo	80,000
Sulawesi Tengah	359,463
Sulawesi Barat	120,750
Sulawesi Selatan	34,173
Sulawesi Tenggara	113,568
Maluku	289,682
Maluku Utara	486,805
Papua	1,387,260
Papua Barat	1,226,066
Indonesia	11,577,807

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 92/KPTS/M/2011

C. Jalan Tol

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan untuk mendorong terciptanya pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. Namun rencana pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jalan membutuhkan dana yang besar, sementara pada sisi lain anggaran untuk pembangunan jalan baru maupun pemeliharaan jalan yang sudah ada sangat terbatas. Untuk mengatasinya, pemerintah memutuskan untuk melibatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Strategi ini membuka peluang investasi bagi sektor swasta yang dimungkinkan dengan adanya rencana pemerintah melakukan percepatan pembangunan jalan tol.

Jalan tol atau disebut jalan bebas hambatan adalah jalan yang masuknya dikendalikan secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, serta paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur setiap arah dengan lebar lajur minimal 3,5 m. Jalan Tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Selain kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan pengembalian investasi dari pendapatan tol, keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan jalan tol memberikan manfaat bagi masyarakat selaku pengguna jalan berupa penghematan biaya operasi kendaraan pengguna jalan tol, penghematan waktu tempuh dan peningkatan kenyamanan bagi pengguna jalan tol maupun non tol karena perpindahan sebagian kendaraan ke jalan tol. Manfaat lain bagi pemerintah adalah pengembangan wilayah serta peningkatan ekonomi sebagai hasil dari pengalihan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari kota besar, pada umumnya, ke daerah yang belum berkembang.

Sampai Tahun 2013 jalan tol yang beroperasi di Indonesia sepanjang 784 km di empat pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Ada pula beberapa ruas jalan tol yang menjadi rencana prioritas, yaitu sepanjang 534 km.

Tabel 4.5. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol di Indonesia (km)

Pulau Besar	Operasi	Rencana			Jumlah
		Program	Prioritas*	Potensial	
1	2	3	4	5	6
Sumatera	43	60	223	2.522	2.848
Jawa	714	1.019	181	486	2.400
Kalimantan	-	-	84	-	84
Bali	10	-	-	-	10
Sulawesi	17	-	46	-	63
Jumlah	784	1.079	534	3.008	5.405

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (September 2013)

Kementerian Pekerjaan Umum

Catatan : * Termasuk dalam PPP Book 2012

** Sesuai dengan SK Menteri Pekerjaan Umum Tentang Jaringan Jalan Nasional No. 567/KPTS/M/2010
JO No. 351/KPTS/M/2012

Pada Tabel 4.6. berikut ini ditampilkan data ruas jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia sampai dengan Tahun 2013 serta masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelolanya.

Tabel 4.6. Jalan Tol di Indonesia yang Sudah Beroperasi

Nama Ruas	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)	Panjang (km)	Masa Konsesi (tahun)
1	2	3	4	5
Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	59,00	40
Jakarta - Tangerang	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	33,00	40
Cawang - Tomang - Grogol - Pluit	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	23,55	40
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	14,30	40
JORR (W2S - E1 - E2 - E3)	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	31,12	40
JORR Seksi S	PT Jasa Marga (Persero), Tbk		14,25	
Pondok Aren - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	5,55	40
Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	83,00	40
Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	64,40	40
Cikampek - Purwakarta - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	58,50	40
Palimanan - Plumbon - Kanci	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	26,30	40
Semarang Seksi A, B, C	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	24,75	40
Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	49,00	40
Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	07 Juli 2006	43,00	40
Jembatan Surabaya - Madura	PT Jasa Marga (Persero), Tbk	11 November 2010	5,40	
Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jbt. Tiga/Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	05 Juni 2007	27,05	31
Tangerang - Merak	PT Marga Mandala Sakti	16 April 2009	73,00	40
Surabaya - Gresik	PT Margabumi Matraraya	09 Oktober 2012	20,70	35
Serpong - Pondok Aren	PT Bintaro Serpong Damai	31 Agustus 2010	7,25	20
SS Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12 Februari 2007	12,80	35
Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	04 Desember 2007	35,00	35
JORR W1	PT Jakarta Lingkar Baratsatu	02 Februari 2007	9,85	35
Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	13 Februari 2007	6,05	35
Ujung Pandang Seksi I dan II	PT Bosowa Marga Nusantara	31 Agustus 2010	11,60	21
Semarang - Solo Seksi I (Semarang - Ungaran)	PT Trans Marga Jateng	15 Desember 2006	11,00	45
Surabaya - Mojokerto Seksi 1A (Waru - Sepanjang)	PT Marga Nujyasumo Agung	November 2006	1,89	42
Bogor Ring Road Seksi I (Sentul Selatan - Kedung Halang)	PT Marga Sarana Jabar	29 Mei 2006	3,85	45

Nama Ruas	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)	Panjang (km)	Masa Konsesi (tahun)
1	2	3	4	5
Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)	PT Translingkar Kita Jaya	13 Februari 2007	3,50	35
Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa	PT Jasamaraga Bali Tol	16 Desember 2011	10,00	45

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (September 2013)
Kementerian Pekerjaan Umum

Pada Tabel 4.7 dan 4.8 ditampilkan rencana pembangunan ruas-ruas jalan tol Tahun 2010-2014. Untuk jalan tol Trans Jawa ada sebanyak 10 ruas dengan rencana yang diselesaikan sepanjang 273,62 km dari 591,56 km RPJMN. Sementara untuk jalan tol Non Trans Jawa ada sebanyak 32 ruas dengan rencana yang diselesaikan 56,05 km dari 773,96 km RPJMN. Ada beberapa ruas tol tersebut yang sudah beroperasi, seperti Kanci - Pejagan, Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa, dan JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan).

Tabel 4.7. Rencana Pembangunan Jalan Tol 2010 – 2014 (Trans Jawa)

Ruas	Panjang (km)	Target RPJMN (2010-2014) (km)	Rencana Selesai (2010-2014) (km)	Progres Konstruksi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Cikampek - Palimanan	116,75	116,75	75,00	6,76	Pengadaan Tanah 100%
Kanci - Pejagan	35,00	35,00	35,00	100,00	Operasi 26 Januari 2010
Pejagan - Pemalang	57,50	57,50	20,20	-	Pengadaan Tanah 30,26%
Pemalang - Batang	39,20	39,20	-	-	Pengadaan Tanah 1,86%
Batang - Semarang	75,00	75,00	-	-	Pengadaan Tanah 3,33%
Semarang - Solo	72,64	72,64	52,85	30,67	Pengadaan Tanah 37,78%
Solo - Ngawi Segmen Karanganyar - Ngawi	69,20	69,20	13,80	*)	Pengadaan Tanah 84,17%
Ngawi Kertosono Segmen Ngawi - Saradan	49,50	49,50	-	-	Pengadaan Tanah 56,85%
Kertosono - Mojokerto	40,50	40,50	40,50	39,83	Pengadaan Tanah 86,89%
Mojokerto - Surabaya	36,27	36,27	36,27	32,08	Pengadaan Tanah 64,71%
Jumlah Trans Jawa	591,56	591,56	273,62		

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (September 2013)
Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 4.8. Rencana Pembangunan Jalan Tol 2010 – 2014 (Non Trans Jawa)

Ruas	Panjang (km)	Target RPJMN (2010-2014) (km)	Rencana Selesai (2010-2014) (km)	Progres Konstruksi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Cileunyi - Sumedang - Dawuan Segemen	29,33	29,33	-	-	Persiapan Pengadaan Tanah
Sumedang - Dawuan					
Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi Segmen	42,20	42,20	-	-	Pengadaan Tanah 74,24%
Lb Pakam - Tebing Tinggi					
JORR W2 Utara	7,67	7,67	7,67	77,27	Pengadaan Tanah 87,07%
Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	14,19	14,19	-	-	Pengadaan Tanah 0,08%
Kunciran - Serpong	11,19	11,19	-	-	Pengadaan Tanah 3,83%
Serpong - Cinere	10,14	10,14	-	-	Persiapan Pengadaan Tanah
Cinere - Jagorawi	14,64	14,64	5,20	29,92	Pengadaan Tanah 50,76%
Cimanggis - Cibitung	25,39	25,39	-	-	Persiapan Pengadaan Tanah
Cibitung - Cilincing	34,02	34,02	-	-	Pengadaan Tanah 0,72%
Depok - Antasari	21,54	21,54	-	-	Pengadaan Tanah 10,26%
Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	21,04	21,04	-	-	Pengadaan Tanah 5,25%
Bogor Ring Road	7,15	7,15	1,95	34,30	Pengadaan Tanah 91,03%
Ciawi - Sukabumi	54,00	54,00	-	-	Pengadaan Tanah 7,17%
Gempol - Pandaan	13,61	13,61	12,05	61,86	Pengadaan Tanah 99,87%
Gempol - Pasuruan	34,15	34,15	7,70	8,28	Pengadaan Tanah 36,11%
Pasuruan - Probolinggo	31,30	31,30	-	-	Persiapan Pengadaan Tanah
Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak	18,20	18,20	-	-	Kepastian Trase dari Walikota Surabaya
Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena	10,00	10,00	10,00	100,00	Operasi 23 September 2013
JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9,70	9,70	9,70	100,00	Operasi 22 Februari 2010
Binjai - Medan	15,80	15,80	-	-	Persiapan Pengadaan Tanah
Palembang - Indralaya	22,00	22,00	-	-	Persiapan Pengadaan Tanah
Manado - Bitung	46,00	46,00	-	-	Persiapan Pengadaan Tanah
Pandaan - Malang	37,62	37,62	-	-	Pengadaan Tanah 10,28%
Pasirkoja - Soreang	10,57	10,57	-	-	Pengadaan Tanah 26,62%
Pekanbaru - Kandis - Dumai	135,00	82,28	-	-	Pengadaan Tanah (Sosialisasi dan Inventarisasi)
Porong - Gempol	10,00	10,00	1,78	21,24	Pengadaan Tanah : On Off Ketapang 100%, Kejapanan - Gempol 91%
Kemayoran - Kampung Melayu	9,65	9,65	-	-	Finalisasi PPJT

Ruas	Panjang (km)	Target RPJMN (2010-2014) (km)	Rencana Selesai (2010-2014) (km)	Progres Konstruksi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Duri Pulo - Kampung Melayu	11,38	11,38	-	-	Finalisasi PPJT
Sunter - Rawa Buaya - Batuceper	22,92	22,92	-	-	Finalisasi PPJT
Sunter - Pulo Gebang - Tembelang	25,73	9,23	-	-	Finalisasi PPJT
Pasar Minggu - Casablanca	9,56	9,56	-	-	Finalisasi PPJT
Ulujami - Tanah Abang	8,27	8,27	-	-	Finalisasi PPJT
Jumlah Trans Jawa	773,96	704,74	56,05		

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (September 2013)
Kementerian Pekerjaan Umum

D. Jembatan

Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat, laut, jalan raya dan jalan kereta api. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan, memiliki banyak sungai, dan juga lembah mengakibatkan keberadaan jembatan sangat dibutuhkan. Teknologi pembangunan jembatan juga telah berkembang dengan pesat, mulai dari perencanaan, teknologi bahan (beton, baja, kabel), teknologi perencanaan dan pelaksanaan serta teknologi rehabilitasi dan perkuatan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan jembatan yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Jembatan (*Bridge Management System/BMS*). Peran dari sistem ini terutama untuk penyimpanan data pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi serta data inspeksi. Berdasarkan data BMS Tahun 2012, terdapat sebanyak 16.509 unit jembatan pada ruas jalan nasional dengan total panjang 391,35 ribu m.

Tabel 4.9. Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional
BMS Semester 2 Tahun 2012

Provinsi	Jumlah Jembatan (unit)						Total
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	
1	2	3	4	5	6	7	8
Aceh	378	240	191	77	17	0	903
Sumatera Utara	177	274	429	102	20	3	1.005
Sumatera Barat	217	115	80	57	10	10	489
Riau	81	88	126	56	8	1	360
Kepulauan Riau	10	5	42	27	3	0	87
Jambi	65	45	76	41	3	0	230
Bengkulu	58	91	106	80	28	2	365
Sumatera Selatan	345	130	144	37	9	12	677
Kepulauan Bangka Belitung	34	32	30	8	1	1	106
Lampung	146	212	59	12	2	0	431
DKI Jakarta	77	19	23	6	1	0	126
Banten	103	24	32	22	1	2	184
Jawa Barat	458	112	80	30	5	6	691
Jawa Tengah	363	97	148	50	6	2	666
DI Yogyakarta	119	18	11	7	0	2	157
Jawa Timur	373	213	103	29	6	4	728
Kalimantan Barat	182	66	253	86	34	0	621
Kalimantan Tengah	214	75	26	15	160	9	499
Kalimantan Timur	291	132	59	29	6	8	525
Kalimantan Selatan	316	84	60	87	26	2	575
Bali	225	27	35	11	0	3	301
Nusa Tenggara Barat	165	65	60	15	0	20	325
Nusa Tenggara Timur	208	116	124	33	3	4	488
Sulawesi Utara	248	165	209	29	6	7	664
Gorontalo	56	14	141	15	1	0	227
Sulawesi Tengah	747	73	86	8	1	0	915
Sulawesi Barat	156	67	45	38	34	27	367
Sulawesi Selatan	264	154	148	38	3	1	608
Sulawesi Tenggara	156	278	97	64	20	23	638
Maluku	101	339	71	21	8	0	540
Maluku Utara	316	18	141	35	6	4	520
Papua	329	183	178	269	88	76	1.123
Papua Barat	353	0	0	0	0	15	368
Indonesia	7.331	3.571	3.413	1.434	516	244	16.509

Sumber : Subdit Informasi dan Komunikasi Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Bina Marga

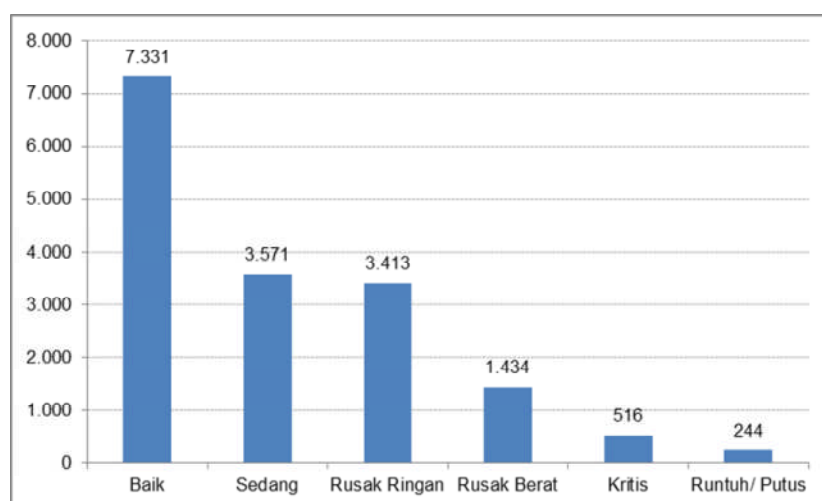
Tabel 4.10. Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional
BMS Semester 2 Tahun 2012

Provinsi	Panjang Jembatan (m)						
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Aceh	8.269,00	5.004,00	6.436,00	2.288,00	296,00	0,00	22.293,00
Sumatera Utara	3.317,00	4.695,00	9.073,00	2.134,40	355,00	85,00	19.659,40
Sumatera Barat	5.275,80	2.639,80	2.414,10	2.371,60	243,20	476,00	13.420,50
Riau	1.756,50	1.924,00	4.188,50	2.865,00	888,30	61,00	11.683,30
Kepulauan Riau	189,50	58,60	1.800,70	2.907,40	21,50	0,00	4.977,70
Jambi	916,20	1.140,60	2.700,50	1.513,30	137,40	0,00	6.408,00
Bengkulu	1.140,30	2.252,40	4.166,50	2.672,90	707,70	160,00	11.099,80
Sumatera Selatan	7.943,10	4.397,80	4.923,70	951,80	164,90	1.200,20	19.581,50
Kepulauan Bangka Belitung	527,50	434,60	964,20	238,00	6,40	30,00	2.200,70
Lampung	3.500,70	4.242,60	2.101,20	448,70	24,50	0,00	10.317,70
DKI Jakarta	4.452,60	707,00	644,70	213,10	10,20	0,00	6.027,60
Banten	2.771,60	317,50	840,80	442,60	112,00	81,00	4.565,50
Jawa Barat	12.189,00	2.723,40	2.268,70	1.047,40	402,50	703,00	19.334,00
Jawa Tengah	9.689,40	3.127,30	3.638,60	1.173,50	245,90	70,40	17.945,10
DI Yogyakarta	4.069,90	1.235,60	162,20	584,70	0,00	188,70	6.241,10
Jawa Timur	8.043,80	5.076,30	3.100,70	622,20	238,00	240,00	17.321,00
Kalimantan Barat	4.197,90	1.857,50	6.081,10	1.440,20	554,60	0,00	14.131,30
Kalimantan Tengah	4.874,10	3.583,80	760,40	338,30	2.420,60	203,50	12.180,70
Kalimantan Timur	8.153,60	2.573,10	2.104,40	1.675,50	133,00	510,00	15.149,60
Kalimantan Selatan	5.285,60	1.778,80	1.431,30	1.601,10	650,00	235,00	10.981,80
Bali	6.254,60	682,50	796,60	404,60	0,00	130,00	8.268,30
Nusa Tenggara Barat	3.381,40	1.307,00	1.014,30	270,50	0,00	660,00	6.633,20
Nusa Tenggara Timur	4.310,80	2.066,30	1.900,80	371,10	67,00	169,10	8.885,10
Sulawesi Utara	5.508,80	3.448,10	3.311,10	616,50	103,00	161,90	13.149,40
Gorontalo	1.095,20	404,90	2.890,40	262,90	7,00	0,00	4.660,40
Sulawesi Tengah	16.792,80	1.439,60	873,40	115,60	15,00	0,00	19.236,40
Sulawesi Barat	3.710,30	1.536,00	1.485,40	1.002,90	679,70	746,60	9.160,90
Sulawesi Selatan	4.832,60	3.277,70	5.016,30	908,00	172,80	125,00	14.332,40
Sulawesi Tenggara	3.271,10	4.163,90	1.332,20	780,40	365,80	355,50	10.268,90
Maluku	4.574,10	8.932,00	1.782,30	295,50	252,50	0,00	15.836,40
Maluku Utara	5.371,70	601,70	2.312,50	532,60	114,00	99,50	9.032,00
Papua	6.993,00	4.757,60	4.556,30	5.637,20	1.570,00	2.447,00	25.961,10
Papua Barat	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	407,00
Indonesia	163.048,50	82.387,00	87.072,90	38.727,50	10.958,50	9.156,40	391.350,80

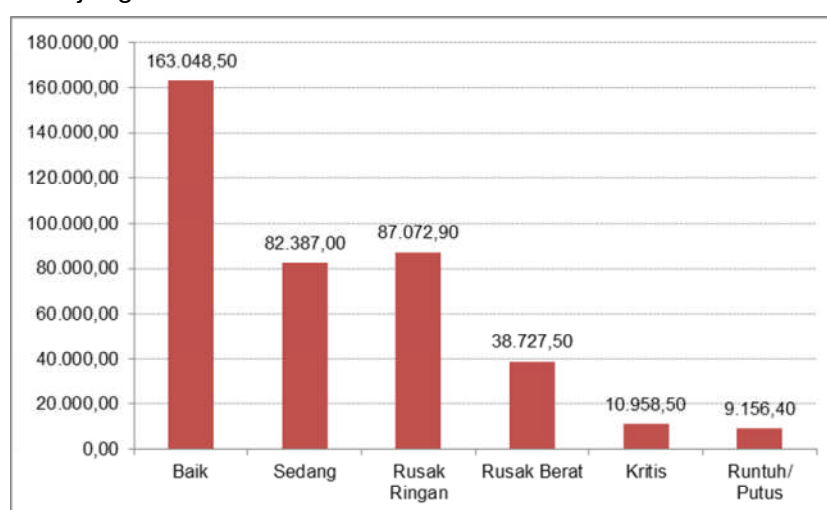
Sumber : Subdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga

Jembatan yang termasuk dalam kondisi mantap adalah kondisi baik, sedang dan rusak ringan, sementara kondisi rusak berat, kritis dan runtuh/putus adalah kondisi tidak mantap. Dilihat dari kemantapannya, sebanyak 14.315 unit atau 332.508 m jembatan dalam kondisi mantap dan 2.194 unit atau 58.842 m dalam kondisi tidak mantap. Jembatan dalam kondisi mantap terdiri dari 7.331 unit atau 163.048 m kondisi baik, 3.571 unit atau 82.387 m kondisi sedang, dan 3.413 unit atau 87.072 m kondisi rusak ringan. Sedangkan jembatan dalam kondisi tidak mantap terdiri dari 1.434 unit atau 38.727 m kondisi rusak berat, 516 unit atau 10.958 m kondisi kritis, dan 244 unit atau 9.156 m kondisi runtuh/putus.

Gambar 4.3. Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional Semester 2 Tahun 2012 (unit)



Gambar 4.4. Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional Semester 2 Tahun 2012 (m)



Tabel 4.11. Jumlah Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional
BMS Semester 2 Tahun 2012

Provinsi	Jumlah Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
1	2	3	4	5	6	7
Aceh	41,86	26,58	21,15	8,53	1,88	0,00
Sumatera Utara	17,61	27,26	42,69	10,15	1,99	0,30
Sumatera Barat	44,38	23,52	16,36	11,66	2,04	2,04
Riau	22,50	24,44	35,00	15,56	2,22	0,28
Kepulauan Riau	11,49	5,75	48,28	31,03	3,45	0,00
Jambi	28,26	19,57	33,04	17,83	1,30	0,00
Bengkulu	15,89	24,93	29,04	21,92	7,67	0,55
Sumatera Selatan	50,96	19,20	21,27	5,47	1,33	1,77
Kepulauan Bangka Belitung	32,08	30,19	28,30	7,55	0,94	0,94
Lampung	33,87	49,19	13,69	2,78	0,46	0,00
DKI Jakarta	61,11	15,08	18,25	4,76	0,79	0,00
Banten	55,98	13,04	17,39	11,96	0,54	1,09
Jawa Barat	66,28	16,21	11,58	4,34	0,72	0,87
Jawa Tengah	54,50	14,56	22,22	7,51	0,90	0,30
DI Yogyakarta	75,80	11,46	7,01	4,46	0,00	1,27
Jawa Timur	51,24	29,26	14,15	3,98	0,82	0,55
Kalimantan Barat	29,31	10,63	40,74	13,85	5,48	0,00
Kalimantan Tengah	42,89	15,03	5,21	3,01	32,06	1,80
Kalimantan Timur	55,43	25,14	11,24	5,52	1,14	1,52
Kalimantan Selatan	54,96	14,61	10,43	15,13	4,52	0,35
Bali	74,75	8,97	11,63	3,65	0,00	1,00
Nusa Tenggara Barat	50,77	20,00	18,46	4,62	0,00	6,15
Nusa Tenggara Timur	42,62	23,77	25,41	6,76	0,61	0,82
Sulawesi Utara	37,35	24,85	31,48	4,37	0,90	1,05
Gorontalo	24,67	6,17	62,11	6,61	0,44	0,00
Sulawesi Tengah	81,64	7,98	9,40	0,87	0,11	0,00
Sulawesi Barat	42,51	18,26	12,26	10,35	9,26	7,36
Sulawesi Selatan	43,42	25,33	24,34	6,25	0,49	0,16
Sulawesi Tenggara	24,45	43,57	15,20	10,03	3,13	3,61
Maluku	18,70	62,78	13,15	3,89	1,48	0,00
Maluku Utara	60,77	3,46	27,12	6,73	1,15	0,77
Papua	29,30	16,30	15,85	23,95	7,84	6,77
Papua Barat	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
Indonesia	44,41	21,63	20,67	8,69	3,13	1,48

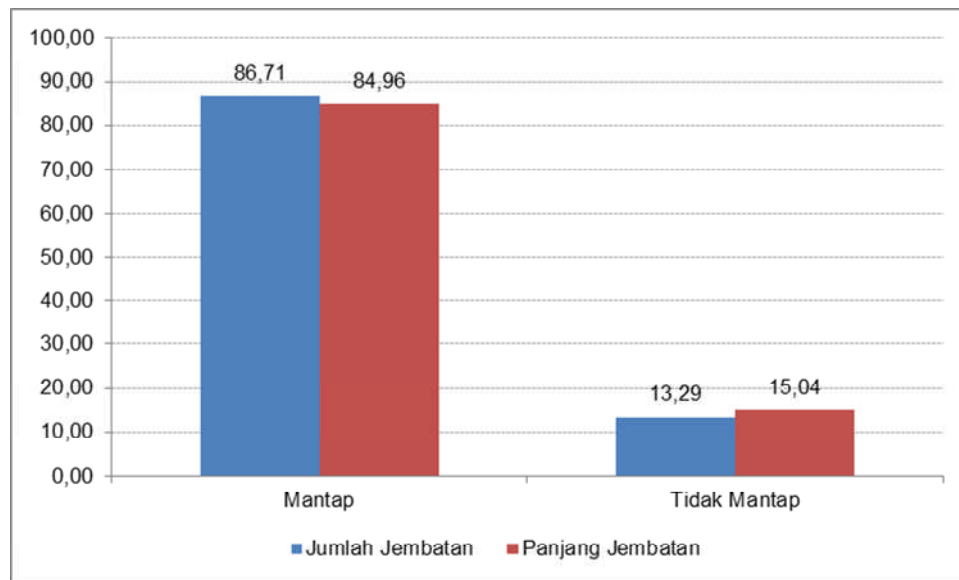
Sumber : Subdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga

Tabel 4.12. Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional
BMS Semester 2 Tahun 2012

Provinsi	Panjang Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
1	2	3	4	5	6	7
Aceh	37,09	22,45	28,87	10,26	1,33	0,00
Sumatera Utara	16,87	23,88	46,15	10,86	1,81	0,43
Sumatera Barat	39,31	19,67	17,99	17,67	1,81	3,55
Riau	15,03	16,47	35,85	24,52	7,60	0,52
Kepulauan Riau	3,81	1,18	36,18	58,41	0,43	0,00
Jambi	14,30	17,80	42,14	23,62	2,14	0,00
Bengkulu	10,27	20,29	37,54	24,08	6,38	1,44
Sumatera Selatan	40,56	22,46	25,14	4,86	0,84	6,13
Kepulauan Bangka Belitung	23,97	19,75	43,81	10,81	0,29	1,36
Lampung	33,93	41,12	20,37	4,35	0,24	0,00
DKI Jakarta	73,87	11,73	10,70	3,54	0,17	0,00
Banten	60,71	6,95	18,42	9,69	2,45	1,77
Jawa Barat	63,04	14,09	11,73	5,42	2,08	3,64
Jawa Tengah	53,99	17,43	20,28	6,54	1,37	0,39
DI Yogyakarta	65,21	19,80	2,60	9,37	0,00	3,02
Jawa Timur	46,44	29,31	17,90	3,59	1,37	1,39
Kalimantan Barat	29,71	13,14	43,03	10,19	3,92	0,00
Kalimantan Tengah	40,01	29,42	6,24	2,78	19,87	1,67
Kalimantan Timur	53,82	16,98	13,89	11,06	0,88	3,37
Kalimantan Selatan	48,13	16,20	13,03	14,58	5,92	2,14
Bali	75,65	8,25	9,63	4,89	0,00	1,57
Nusa Tenggara Barat	50,98	19,70	15,29	4,08	0,00	9,95
Nusa Tenggara Timur	48,52	23,26	21,39	4,18	0,75	1,90
Sulawesi Utara	41,89	26,22	25,18	4,69	0,78	1,23
Gorontalo	23,50	8,69	62,02	5,64	0,15	0,00
Sulawesi Tengah	87,30	7,48	4,54	0,60	0,08	0,00
Sulawesi Barat	40,50	16,77	16,21	10,95	7,42	8,15
Sulawesi Selatan	33,72	22,87	35,00	6,34	1,21	0,87
Sulawesi Tenggara	31,85	40,55	12,97	7,60	3,56	3,46
Maluku	28,88	56,40	11,25	1,87	1,59	0,00
Maluku Utara	59,47	6,66	25,60	5,90	1,26	1,10
Papua	26,94	18,33	17,55	21,71	6,05	9,43
Papua Barat	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
Indonesia	41,66	21,05	22,25	9,90	2,80	2,34

Sumber : Subdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga

Gambar 4.5. Persentase Jumlah dan Panjang Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional Berdasarkan Kemantapannya
BMS Semester 2 Tahun 2012 (%)



E. Analisis Statistik Infrastruktur Jalan

Jaringan jalan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi nasional. Pemeliharaan dan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan jaringan jalan. Jaringan jalan juga merupakan penunjang utama dalam melakukan kegiatan perekonomian dan dapat menjadi media untuk menjalin komunikasi dan interaksi antar masyarakat agar terjaga kesatuan dan dapat berkembang secara lebih merata.

Berdasarkan rencana tata ruang pulau/kepulauan yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem. Pulau-pulau besar tersebut meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sementara gugusan pulau meliputi Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Tahun 2012 berjumlah 251,86 juta jiwa dengan penyebaran 54,39% di Pulau Jawa dan Bali, 23,51% di Pulau Sumatera, 8,08% di Pulau Sulawesi, 6,41% di Pulau Kalimantan, 4,27% di Nusa Tenggara, 2,11% di Papua dan Papua Barat, serta 1,24% di Maluku dan Maluku Utara. Sementara penyebaran kendaraan bermotor umumnya mengikuti penyebaran penduduk karena berkaitan dengan media transportasi masyarakat. Penyebaran penduduk dan kendaraan bermotor seperti terlihat pada Tabel 4.14 dan Gambar 4.6.

Melihat kondisi serta tingkat perkembangan yang belum merata, pembangunan jalan dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan tingkat perkembangan masing-masing wilayah. Dari “Jaringan Jalan Nasional” di Indonesia, diketahui bahwa ada tiga kawasan perkembangan jalan di Indonesia, yaitu wilayah sudah berkembang, wilayah sedang berkembang, dan wilayah akan berkembang.

Wilayah sudah berkembang meliputi Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Di wilayah sudah berkembang, kegiatan ekonominya relatif telah maju, begitu pula dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang begitu besar, maka mobilitas penduduk di wilayah ini juga tinggi.

Wilayah sedang berkembang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Di wilayah sedang berkembang, pertumbuhan ekonominya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan yang mulai berkembang. Keberadaan jaringan jalan akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Selain itu, keberadaan jaringan jalan di wilayah sedang berkembang, terutama di Pulau Kalimantan, juga sebagai identitas bangsa. Hal ini mengingat di Pulau Kalimantan terdapat perbatasan darat langsung dengan negara tetangga.

Wilayah akan berkembang meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah akan berkembang, lokasi kegiatan ekonominya lebih banyak menyebar dan terisolasi satu dengan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian, sumber

daya air dan potensi kelautan memerlukan sistem transportasi terpadu. Keberadaan jaringan jalan selain akan membantu kegiatan ekonomi, juga sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghubungkan daerah-daerah yang masih terisolasi.

Tabel 4.13. Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2011

Pulau Besar	Panjang Jalan (km)				Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8
Sumatera	11.568,12	15.247	142.974	169.789,12	59.205.916	480.793,28	20.857.274
Jawa & Bali	6.146,24	16.153	103.572	125.871,24	136.986.487	135.218,34	47.722.599
Nusa Tenggara	2.038,85	3.580	21.934	27.552,85	10.742.475	67.290,42	2.564.534
Kalimantan	6.363,64	5.730	42.520	54.613,64	16.134.139	544.150,07	6.377.665
Sulawesi	7.799,77	6.274	67.993	82.066,77	20.348.918	188.522,36	7.176.980
Maluku & Maluku	1.578,54	3.479	7.508	12.565,54	3.124.602	78.896,53	561.893
Papua & Papua Barat	3.074,68	3.179	17.894	24.147,68	5.315.403	416.060,32	630.051
Indonesia	38.569,84	53.642	404.395	496.606,84	251.857.940	1.910.931,32	85.890.996

Sumber : Jalan Nasional : Subdit Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Bina Marga

Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Statistik Indonesia 2012

Jumlah Penduduk : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012

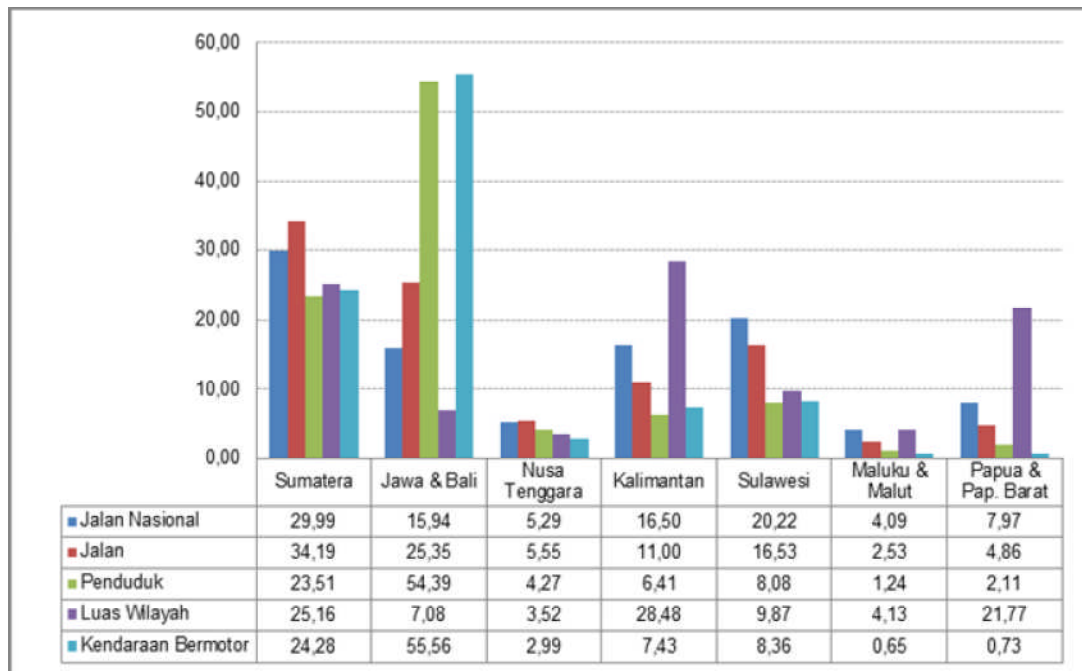
Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor : Statistik Indonesia 2012

Catatan : Jumlah Kendaraan Bermotor terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor

Tabel 4.14. Persentase Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2011

Pulau Besar	Persentase				
	Panjang Jalan Nasional	Panjang Jalan	Penduduk	Luas Wilayah	Kendaraan Bermotor
1	2	3	4	5	6
Sumatera	29,99	34,19	23,51	25,16	24,28
Jawa & Bali	15,94	25,35	54,39	7,08	55,56
Nusa Tenggara	5,29	5,55	4,27	3,52	2,99
Kalimantan	16,50	11,00	6,41	28,48	7,43
Sulawesi	20,22	16,53	8,08	9,87	8,36
Maluku & Maluku	4,09	2,53	1,24	4,13	0,65
Papua & Papua Barat	7,97	4,86	2,11	21,77	0,73

Gambar 4.6. Persentase Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Pulau Besar



Dalam Tabel 4.15 disajikan angka rasio panjang jalan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) menurut pulau besar. Sementara angka rasio panjang jalan nasional terdapat pada Tabel 4.16. Nilai tersebut menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk, luas wilayah, dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalan nasional maupun panjang jalan di pulau-pulau besar di Indonesia. Perbandingan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalan dapat digunakan sebagai informasi tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah. Jika nilai perbandingan antara jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalan tinggi, maka volume penggunaan jalan di wilayah tersebut juga semakin tinggi.

Dari Tabel 4.15, nilai rasio jumlah penduduk terhadap panjang jalan yang paling tinggi berada di Jawa dan Bali. Begitu pula dengan urutan rasio pada jalan nasional. Untuk nilai rasio jumlah kendaraan bermotor terhadap panjang jalan, yang paling tinggi berada di Jawa dan Bali, Sumatera dan Kalimantan. Sementara pada rasio terhadap panjang jalan

nasionalnya, paling tinggi berada di Jawa dan Bali, Sumatera dan Nusa Tenggara. Walaupun Nusa Tenggara dan Kalimantan termasuk dalam wilayah yang akan berkembang dan sedang berkembang, namun ternyata volume penggunaan jalannya cukup tinggi dilihat dari jumlah penduduk dan kendaraan bermotornya.

Nilai rasio berikutnya adalah perbandingan luas wilayah terhadap panjang jalan yang dapat digunakan sebagai informasi proporsi jalan terhadap luas wilayah. Nilai rasio luas wilayah terhadap panjang jalan yang besar, berarti proporsi panjang jalan terhadap luas wilayahnya masih kecil. Papua dan Papua Barat sebagai pulau yang nilai perbandingan luas wilayah terhadap panjang jalan paling besar, berarti panjang jalan di wilayah ini relatif masih kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya, baik untuk panjang jalan keseluruhan maupun jalan nasional saja.

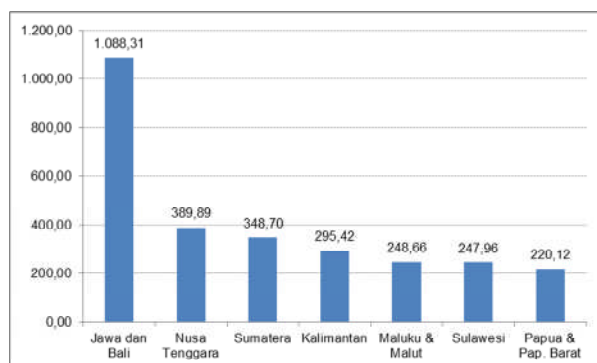
Tabel 4.15. Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Pulau Besar

Pulau Besar	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan
1	2	3	4
Sumatera	348,70	2,83	122,84
Jawa dan Bali	1.088,31	1,07	379,14
Nusa Tenggara	389,89	2,44	93,08
Kalimantan	295,42	9,96	116,78
Sulawesi	247,96	2,30	87,45
Maluku & Malut	248,66	6,28	44,72
Papua & Pap. Barat	220,12	17,23	26,09
Indonesia	507,16	3,85	172,96

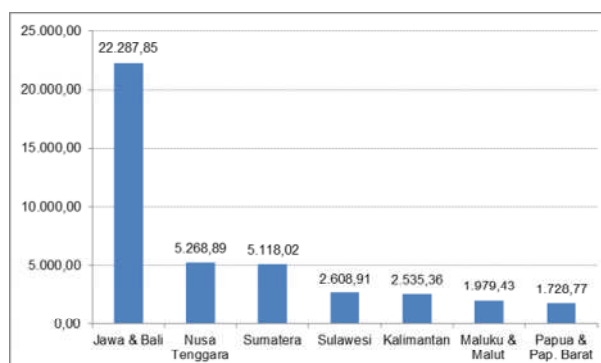
Tabel 4.16. Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Pulau Besar

Pulau Besar	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional
1	2	3	4
Sumatera	5.118,02	41,56	1.803,00
Jawa & Bali	22.287,85	22,00	7.764,52
Nusa Tenggara	5.268,89	33,00	1.257,83
Kalimantan	2.535,36	85,51	1.002,20
Sulawesi	2.608,91	24,17	920,15
Maluku & Malut	1.979,43	49,98	355,96
Papua & Pap. Barat	1.728,77	135,32	204,92
Indonesia	6.529,92	49,54	2.226,90

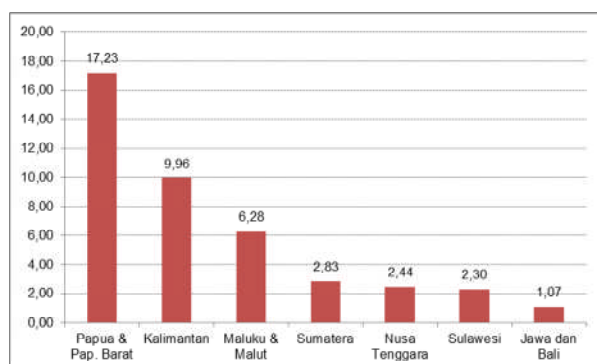
Gambar 4.7. Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jalan Menurut Pulau Besar



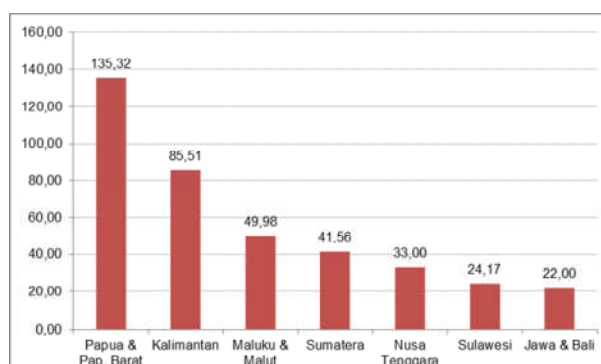
Gambar 4.8. Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jalan Nasional Menurut Pulau Besar



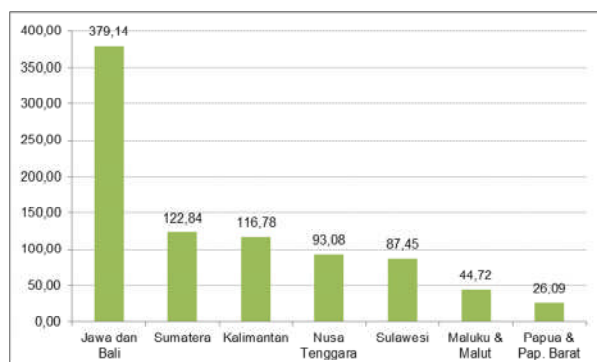
Gambar 4.9. Rasio Luas Wilayah terhadap Jalan Menurut Pulau Besar



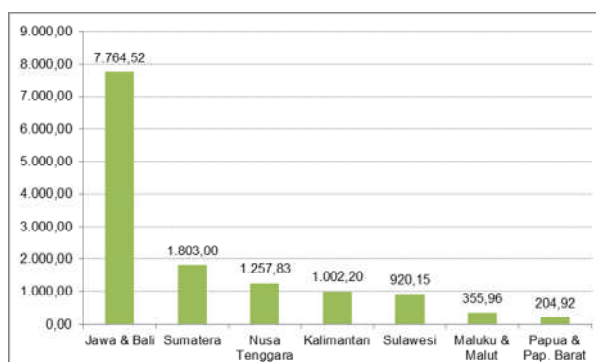
Gambar 4.10. Rasio Luas Wilayah terhadap Jalan Nasional Menurut Pulau Besar



Gambar 4.11. Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Jalan Menurut Pulau Besar



Gambar 4.12. Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Jalan Nasional Menurut Pulau Besar



Rasio jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah kendaraan bermotor terhadap panjang jalan juga dapat dilihat pada tingkat provinsi. Untuk rasio jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalannya, beberapa provinsi yang paling tinggi nilainya pada umumnya ada di Pulau Jawa dan Bali, yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Sementara untuk perbandingan luas wilayah terhadap panjang jalan, provinsi yang nilainya paling tinggi adalah Papua, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Maluku Utara.

Tabel 4.17. Panjang Jalan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Panjang Jalan				Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8
Aceh	1.803,35	1.702	18.952	22.457	5.015.234	57.956,00	2.185.400
Sumatera Utara	2.249,64	2.752	31.047	36.049	15.227.719	72.981,23	4.524.681
Sumatera Barat	1.212,89	1.154	19.667	22.034	5.617.977	42.012,89	1.600.796
Riau	1.134,47	1.872	20.708	23.714	6.456.322	87.023,66	2.113.847
Kepulauan Riau	334,00	512	3.668	4.514	1.895.590	8.201,72	840.085
Jambi	936,48	1.025	10.475	12.436	3.532.126	50.058,16	3.031.417
Sumatera Selatan	1.444,26	1.748	13.170	16.362	8.528.719	91.592,43	3.500.866

Provinsi	Panjang Jalan				Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepulauan Bangka Belitung	509,59	551	3.855	4.916	1.349.199	16.424,06	585.744
Bengkulu	783,87	1.563	5.419	7.766	1.996.538	19.919,33	781.805
Lampung	1.159,57	2.368	16.013	19.541	9.586.492	34.623,80	1.692.633
DKI Jakarta	142,65	6.951	-	7.094	9.603.417	664,01	11.912.526
Jawa Barat	1.351,13	2.199	21.950	25.500	39.910.274	35.377,76	5.674.974
Banten	476,49	889	5.091	6.456	9.938.820	9.662,92	982.532
Jawa Tengah	1.390,57	2.540	25.179	29.110	32.578.357	32.800,69	10.451.916
DI Yogyakarta	223,16	690	3.679	4.592	3.458.029	3.133,15	3.322.638
Jawa Timur	2.027,01	2.001	41.561	45.589	37.269.885	47.799,75	11.846.189
Bali	535,23	883	6.112	7.530	4.227.705	5.780,06	3.531.824
Nusa Tenggara Barat	632,17	1.843	5.614	8.089	5.398.573	18.572,32	1.556.310
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	1.737	16.320	19.464	5.343.902	48.718,10	1.008.224
Kalimantan Barat	1.664,55	1.656	11.417	14.738	5.193.272	147.307,00	1.663.185
Kalimantan Tengah	1.714,83	1.708	10.342	13.765	2.640.070	153.564,50	931.088
Kalimantan Selatan	866,09	812	9.666	11.344	4.145.843	38.744,23	1.711.519
Kalimantan Timur	2.118,17	1.554	11.095	14.767	4.154.954	204.534,34	2.071.873
Sulawesi Utara	1.319,23	941	5.759	8.019	2.617.155	13.851,64	1.046.621
Gorontalo	606,70	408	3.584	4.599	1.147.528	11.257,07	305.965
Sulawesi Tengah	2.181,95	2.037	14.168	18.387	2.935.343	61.841,29	1.970.016
Sulawesi Selatan	1.722,86	1.260	29.570	32.553	9.368.107	46.717,48	2.741.128
Sulawesi Barat	571,98	441	5.806	6.819	1.589.162	16.787,18	
Sulawesi Tenggara	1.397,05	1.187	9.106	11.690	2.691.623	38.067,70	1.113.250
Maluku	1.066,65	1.612	4.539	7.218	1.866.248	46.914,03	517.410
Maluku Utara	511,89	1.867	2.969	5.348	1.258.354	31.982,50	44.483
Papua	2.111,44	1.873	12.165	16.149	4.224.232	319.036,05	630.051
Papua Barat	963,24	1.306	5.729	7.998	1.091.171	97.024,27	
Indonesia	38.569,84	53.642	404.395	496.607	251.857.940	1.910.931,32	85.890.996

Sumber : Jalan Nasional : Subdit Informasi dan Komunikasi Ditjen Bina Marga

Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Statistik Indonesia 2012

Jumlah Penduduk : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012

Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor : Statistik Indonesia 2012

Catatan : Jumlah Kendaraan Bermotor terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor

Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Sulawesi Barat, dan Papua termasuk Papua Barat

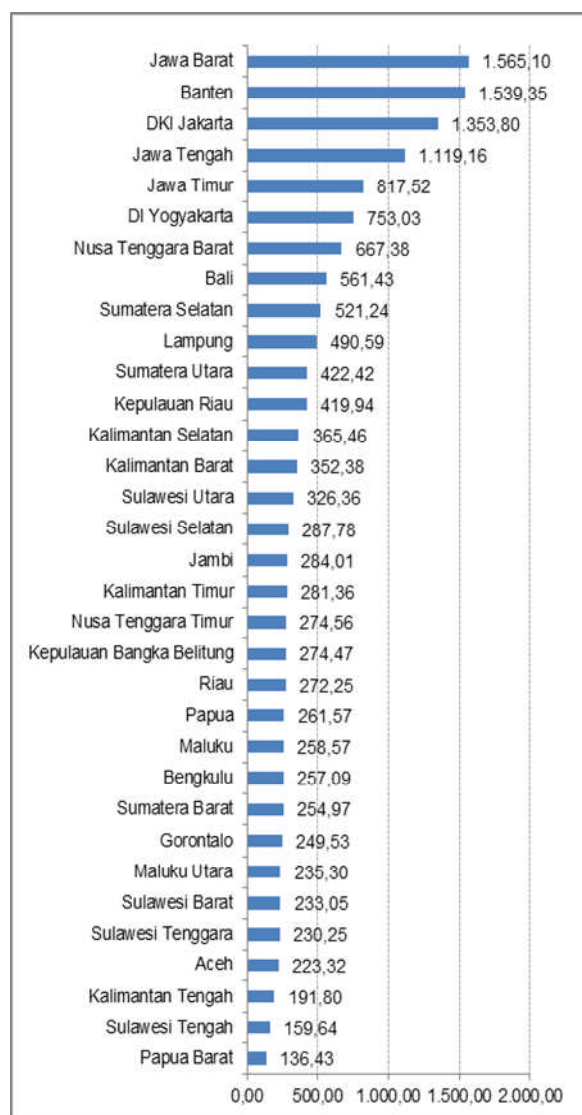
Tabel 4.18. Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan
1	2	3	4
Aceh	223,32	2,58	97,31
Sumatera Utara	422,42	2,02	125,52
Sumatera Barat	254,97	1,91	72,65
Riau	272,25	3,67	89,14
Kepulauan Riau	419,94	1,82	186,11
Jambi	284,01	4,03	243,75
Sumatera Selatan	521,24	5,60	213,96
Kepulauan Bangka Belitung	274,47	3,34	119,16
Bengkulu	257,09	2,56	100,67
Lampung	490,59	1,77	86,62
DKI Jakarta	1.353,80	0,09	1.679,32
Jawa Barat	1.565,10	1,39	222,55
Banten	1.539,35	1,50	152,18
Jawa Tengah	1.119,16	1,13	359,05
DI Yogyakarta	753,03	0,68	723,55
Jawa Timur	817,52	1,05	259,85
Bali	561,43	0,77	469,02
Nusa Tenggara Barat	667,38	2,30	192,39
Nusa Tenggara Timur	274,56	2,50	51,80
Kalimantan Barat	352,38	10,00	112,85
Kalimantan Tengah	191,80	11,16	67,64
Kalimantan Selatan	365,46	3,42	150,87
Kalimantan Timur	281,36	13,85	140,30
Sulawesi Utara	326,36	1,73	130,51
Gorontalo	249,53	2,45	66,53
Sulawesi Tengah	159,64	3,36	107,14
Sulawesi Selatan	287,78	1,44	84,21
Sulawesi Barat	233,05	2,46	
Sulawesi Tenggara	230,25	3,26	95,23
Maluku	258,57	6,50	71,69
Maluku Utara	235,30	5,98	8,32
Papua	261,57	19,76	39,01
Papua Barat	136,43	12,13	

Tabel 4.19. Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional
1	2	3	4
Aceh	2.781,07	32,14	1.211,86
Sumatera Utara	6.768,96	32,44	2.011,29
Sumatera Barat	4.631,89	34,64	1.319,82
Riau	5.691,05	76,71	1.863,29
Kepulauan Riau	5.675,42	24,56	2.515,22
Jambi	3.771,70	53,45	3.237,03
Sumatera Selatan	5.905,25	63,42	2.423,99
Kepulauan Bangka Belitung	2.647,62	32,23	1.149,44
Bengkulu	2.547,03	25,41	997,37
Lampung	8.267,28	29,86	1.459,71
DKI Jakarta	67.321,54	4,65	83.508,77
Jawa Barat	29.538,44	26,18	4.200,17
Banten	20.858,40	20,28	2.062,02
Jawa Tengah	23.428,06	23,59	7.516,28
DI Yogyakarta	15.495,74	14,04	14.889,04
Jawa Timur	18.386,63	23,58	5.844,17
Bali	7.898,86	10,80	6.598,70
Nusa Tenggara Barat	8.539,75	29,38	2.461,85
Nusa Tenggara Timur	3.798,95	34,63	716,74
Kalimantan Barat	3.119,93	88,50	999,18
Kalimantan Tengah	1.539,55	89,55	542,96
Kalimantan Selatan	4.786,85	44,73	1.976,14
Kalimantan Timur	1.961,58	96,56	978,14
Sulawesi Utara	1.983,85	10,50	793,36
Gorontalo	1.891,43	18,55	504,31
Sulawesi Tengah	1.345,28	28,34	902,87
Sulawesi Selatan	5.437,53	27,12	1.591,03
Sulawesi Barat	2.778,35	29,35	
Sulawesi Tenggara	1.926,65	27,25	796,86
Maluku	1.749,63	43,98	485,08
Maluku Utara	2.458,25	62,48	86,90
Papua	2.000,64	151,10	298,40
Papua Barat	1.132,81	100,73	

Gambar 4.13. Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi



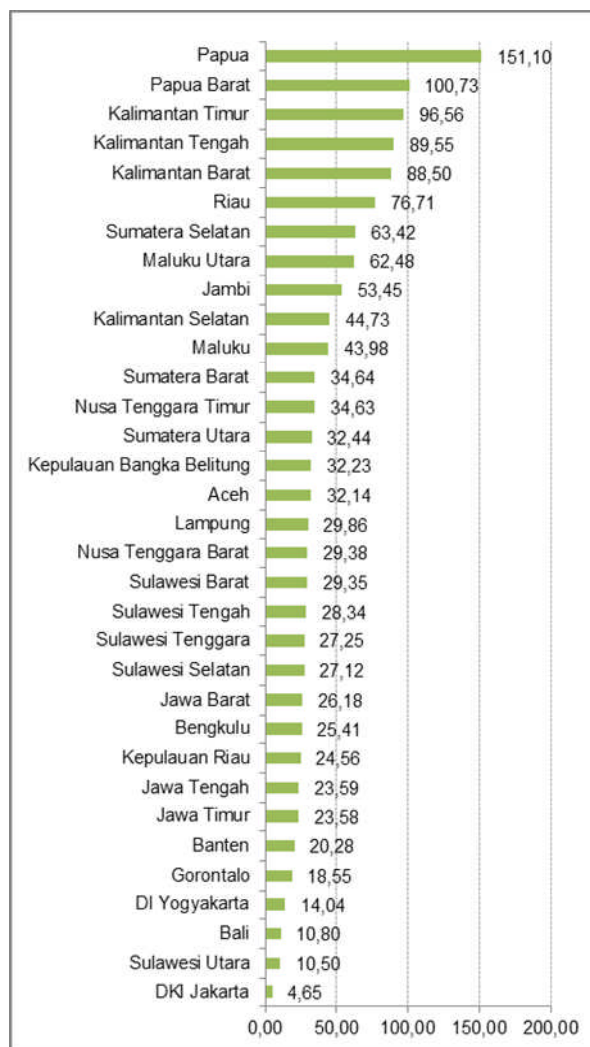
Gambar 4.14. Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi



Gambar 4.15. Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi



Gambar 4.16. Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi



Gambar 4.17. Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi



Gambar 4.18. Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi



BAB V**STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA****A. Sistem Penyediaan Air Minum**

Air minum adalah air yang dikonsumsi oleh rumah tangga melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menurut PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didefinisikan sebagai satu kesatuan fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air minum saat ini antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan. Rendahnya cakupan pelayanan tersebut secara operasional merupakan refleksi dari pengelolaan yang kurang efisien maupun kurangnya pendanaan untuk pengembangan sistem yang ada.

Berdasarkan data Perpamsi Tahun 2011, jumlah seluruh PDAM di Indonesia mencapai 378 PDAM. Pada Tahun 2012 BPPSPAM melakukan pemutakhiran dan diperoleh hasil bahwa jumlah PDAM di Indonesia menjadi 375 PDAM, tiga diantaranya tidak lagi berbentuk PDAM,

yaitu KPAM Halmahera Tengah, UPTD Kabupaten Bangka Selatan dan UPTD Kabupaten Sekadau.

Pada Tabel 5.1a dan 5.1b di bawah ini ditampilkan data jumlah serta kapasitas terpasang dan produksi, jumlah pelanggan serta jumlah penduduk terlayani dari 342 PDAM di Indonesia yang diperoleh dari Kinerja PDAM 2011 dan 2012.

Tabel 5.1a. Penyelenggaraan SPAM PDAM di Indonesia

Provinsi	Jumlah PDAM	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)
1	2	3	4
Aceh	14	3.069,0	2.072,0
Sumatera Utara	14	10.106,0	8.540,0
Sumatera Barat	14	4.126,0	2.573,0
Riau	5	1.479,0	707,0
Jambi	9	2.491,0	1.405,0
Sumatera Selatan	12	5.406,0	4.140,0
Bengkulu	6	1.378,0	764,0
Lampung	8	2.189,0	850,0
Kepulauan Bangka Belitung	4	293,0	787,0
Kepulauan Riau	3	317,0	224,0
DKI Jakarta	1	18.075,0	15.153,0
Jawa Barat	22	18.578,0	14.007,0
Jawa Tengah	35	18.455,0	12.709,0
DI Yogyakarta	5	2.171,0	1.262,0
Jawa Timur	38	26.399,0	18.717,0
Banten	6	6.276,0	5.944,0
Bali	9	5.432,0	4.178,0
Nusa Tenggara Barat	7	2.536,0	2.107,0
Nusa Tenggara Timur	14	1.992,0	1.115,0
Kalimantan Barat	11	2.730,0	1.821,0
Kalimantan Tengah	14	1.421,5	984,0
Kalimantan Selatan	12	4.037,0	2.802,0
Kalimantan Timur	12	6.418,5	5.159,5
Sulawesi Utara	7	1.414,5	845,5
Sulawesi Tengah	9	1.507,0	869,0
Sulawesi Selatan	18	5.776,0	4.342,0
Sulawesi Tenggara	9	1.561,0	670,0
Gorontalo	4	593,0	453,0
Sulawesi Barat	4	262,0	198,0

Provinsi	Jumlah PDAM	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)
1	2	3	4
Maluku	6	928,0	345,0
Maluku Utara	5	549,0	453,0
Papua Barat	2	108,0	105,0
Papua	3	970,0	924,0
Indonesia	342	159.043,5	117.225,0

Tabel 5.1b. Penyelenggaraan SPAM PDAM di Indonesia

Provinsi	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
1	5	6	7
Aceh	143.410	3.371.857	810.477
Sumatera Utara	625.821	7.296.876	3.701.798
Sumatera Barat	186.047	3.506.802	1.210.425
Riau	48.840	1.900.480	326.858
Jambi	129.001	2.196.314	785.421
Sumatera Selatan	271.947	3.900.053	1.956.849
Bengkulu	49.732	933.223	302.114
Lampung	58.853	1.908.619	398.399
Kepulauan Bangka Belitung	11.402	413.892	71.490
Kepulauan Riau	21.588	235.055	132.253
DKI Jakarta	802.636	9.059.099	5.580.387
Jawa Barat	1.084.682	23.553.595	8.480.545
Jawa Tengah	1.107.002	21.389.975	7.381.400
DI Yogyakarta	121.067	2.595.886	974.391
Jawa Timur	1.382.886	22.625.748	8.839.933
Banten	203.816	5.477.435	1.298.839
Bali	299.821	3.151.832	1.734.629
Nusa Tenggara Barat	157.004	3.057.524	1.211.132
Nusa Tenggara Timur	96.692	2.914.609	618.385
Kalimantan Barat	141.390	2.190.466	801.510
Kalimantan Tengah	93.768	1.257.304	560.237
Kalimantan Selatan	265.592	3.060.862	1.663.064
Kalimantan Timur	321.775	2.914.506	1.938.183
Sulawesi Utara	61.577	907.200	472.940
Sulawesi Tengah	71.512	1.415.483	576.521
Sulawesi Selatan	306.882	4.508.018	2.022.177
Sulawesi Tenggara	62.015	1.358.746	370.588
Gorontalo	35.575	623.519	389.420
Sulawesi Barat	21.004	644.898	140.310

Provinsi	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
1	5	6	7
Maluku	24.976	765.684	148.056
Maluku Utara	31.746	408.030	195.244
Papua Barat	9.130	106.148	54.780
Papua	32.749	371.100	177.974
Indonesia	8.281.938	140.020.838	55.326.729

Sumber : Kinerja PDAM 2011, 2012

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Catatan : SL : Sambungan Langsung

Untuk dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, kondisi PDAM harus sehat sehingga mampu mengoperasikan SPAM secara efektif dan efisien melalui manajemen internal PDAM yang kuat. Evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat, dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah diterapkan sejak Tahun 2010 dengan melibatkan empat aspek penilaian, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, jumlah PDAM yang dievaluasi oleh BPPSPAM mengalami perubahan. Pada Tahun 2010, BPPSPAM mengevaluasi 341 PDAM, sementara pada Tahun 2011 sebanyak 335 PDAM, dan Tahun 2012 sebanyak 328 PDAM.

Hasil evaluasi kinerja PDAM yang dilakukan oleh BPPSPAM Tahun 2012 terhadap 328 PDAM dari 375 PDAM yang ada di Indonesia, diperoleh hasil bahwa 171 atau 52,13 % PDAM di Indonesia memiliki kinerja sehat; 101 atau 30,79 % PDAM dalam kinerja kurang sehat; dan 56 atau 17,07 % PDAM dalam kinerja sakit. Dari jumlah PDAM yang dievaluasi, Tahun 2012 merupakan yang paling sedikit selama kurun 3 tahun, namun jumlah PDAM yang masuk dalam kinerja sehat merupakan yang tertinggi dibanding Tahun 2010 dan 2011 seperti tampak pada Tabel 5.3 di bawah ini.

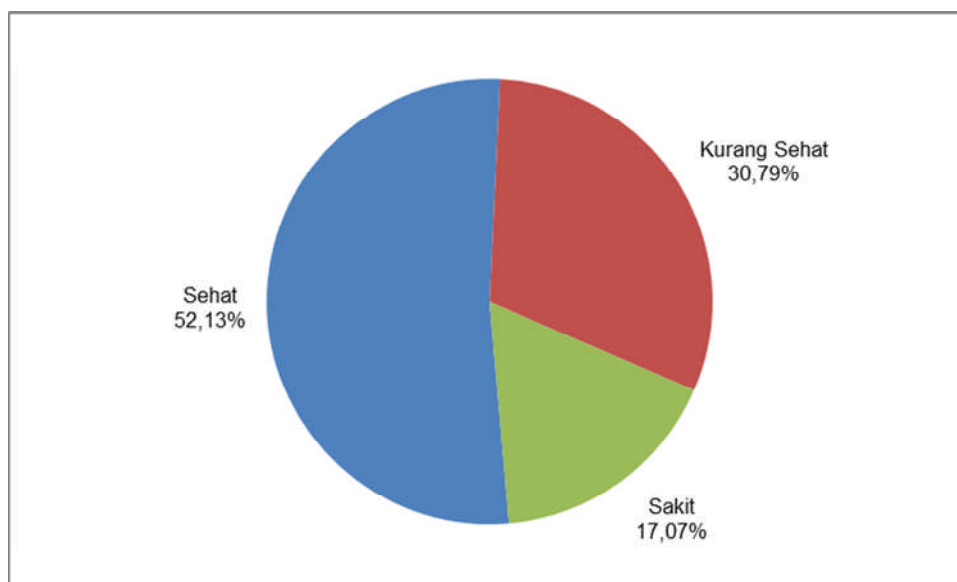
Tabel 5.2. Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia
Tahun 2012

Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
1	2	3	4	5
Aceh	3	5	5	13
Sumatera Utara	5	4	5	14
Sumatera Barat	6	4	2	12
Riau	0	1	4	5
Kepulauan Riau	1	2	0	3
Jambi	1	5	3	9
Sumatera Selatan	3	8	1	12
Kepulauan Bangka Belitung	0	1	3	4
Bengkulu	2	1	3	6
Lampung	1	1	5	7
DKI Jakarta	1	0	0	1
Banten	6	0	0	6
Jawa Barat	20	2	0	22
Jawa Tengah	31	4	0	35
DI Yogyakarta	3	2	0	5
Jawa Timur	22	12	4	38
Kalimantan Barat	1	4	6	11
Kalimantan Tengah	4	6	2	12
Kalimantan Selatan	12	0	0	12
Kalimantan Timur	9	2	0	11
Gorontalo	2	2	0	4
Sulawesi Tengah	3	5	1	9
Sulawesi Selatan	7	7	1	15
Sulawesi Barat	2	1	0	3
Sulawesi Utara	1	5	0	6
Sulawesi Tenggara	0	6	3	9
Bali	8	1	0	9
Nusa Tenggara Barat	4	1	1	6
Nusa Tenggara Timur	5	6	2	13
Maluku	2	0	4	6
Maluku Utara	3	2	0	5
Papua	2	0	1	3
Papua Barat	1	1	0	2
Indonesia	171	101	56	328

Sumber : Kinerja PDAM 2012

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Gambar 5.1. Persentase Kinerja PDAM di Indonesia
Tahun 2012



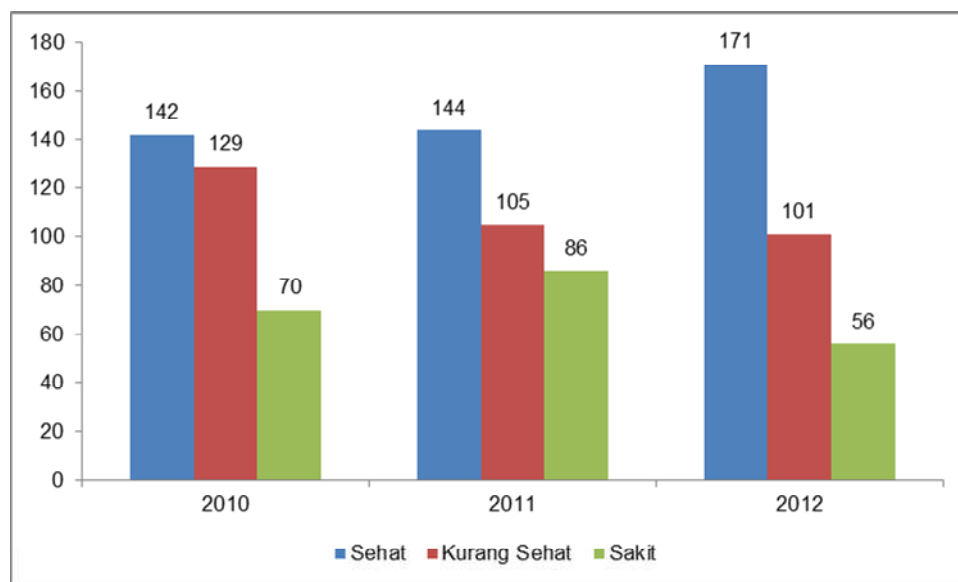
Tabel 5.3. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia
Tahun 2010, 2011 dan 2012

Kategori	Jumlah PDAM			Persentase		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
Sehat	142	144	171	41,64	42,99	52,13
Kurang Sehat	129	105	101	37,83	31,34	30,79
Sakit	70	86	56	20,53	25,67	17,07
Jumlah	341	335	328	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kinerja PDAM 2012

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Gambar 5.2. Perkembangan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia
Tahun 2010, 2011 dan 2012



Tabel 5.4. Jumlah Fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum
Menurut Provinsi dan Kapasitasnya

Provinsi	Kapasitas				Jumlah
	< 20 l/dt	20 - 50 l/dt	50 - 100 l/dt	> 100 l/dt	
1	2	3	4	5	6
Aceh	98	6	28	10	142
Sumatera Utara	79	1	8	8	96
Sumatera Barat	62	6	24	6	98
Riau	49	7	11	0	67
Jambi	42	2	12	7	63
Sumatera Selatan	79	4	11	13	107
Bengkulu	42	1	6	3	52
Lampung	45	1	27	0	73
Kepulauan Bangka Belitung	23	1	7	1	32
Kepulauan Riau	8	2	3	2	15
DKI Jakarta	0	2	0	0	2
Jawa Barat	121	29	37	24	211
Jawa Tengah	177	29	76	37	319
DI Yogyakarta	28	5	18	5	56
Jawa Timur	180	48	54	21	303
Banten	36	5	12	1	54
Bali	15	13	7	2	37

Provinsi	Kapasitas				Jumlah
	< 20 l/dt	20 - 50 l/dt	50 - 100 l/dt	> 100 l/dt	
1	2	3	4	5	6
Nusa Tenggara Barat	25	0	11	4	40
Nusa Tenggara Timur	117	0	6	2	125
Kalimantan Barat	68	7	13	2	90
Kalimantan Tengah	72	3	5	4	84
Kalimantan Selatan	55	3	10	4	72
Kalimantan Timur	53	6	8	3	70
Sulawesi Utara	31	3	7	4	45
Sulawesi Tengah	57	0	4	1	62
Sulawesi Selatan	61	7	12	9	89
Sulawesi Tenggara	32	1	11	1	45
Gorontalo	24	1	8	0	33
Sulawesi Barat	10	1	3	2	16
Maluku	24	2	3	1	30
Maluku Utara	4	1	2	1	8
Papua Barat	8	0	1	1	10
Papua	29	0	4	1	34

Sumber : SIGI PU

B. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didefinisikan bahwa sampah adalah barang sisa yang harus dibuang. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sementara sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Sampah yang merupakan barang sisa butuh untuk dikelola dengan tepat agar dapat menghasilkan keuntungan secara finansial, kesehatan sekaligus kelestarian lingkungan.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Di tempat tersebut sampah serta residu hasil pengolahannya dikembalikan ke media lingkungan secara aman yang didahului dengan dilakukan pengolahan untuk merubah karakteristik, komposisi dan jumlah/volume sampah.

Operasi TPA di Indonesia pada awalnya, dan sampai saat ini sebagian besar masih tergolong *open dumping* yang berakibat pada tercemarnya lingkungan. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan termasuk air tanah. Namun saat ini sistem tersebut mulai dilarang seiring dengan terbitnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi TPA secara lebih memadai. Keterbatasan lahan TPA di kota-kota besar juga mengakibatkan kebutuhan pengelolaan TPA bersama secara regional. Percontohan TPA *sanitary landfill* regional masih terbatas di beberapa daerah seperti di Yogyakarta (Kartamantul), Denpasar (Sarbagita) Kab. Bangli, dan Gorontalo.

Tabel 5.5. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Indonesia

Propinsi	Jumlah TPA	Luas TPA (ha)
1	2	3
Aceh	16	32,5
Sumatera Utara	13	39,0
Sumatera Barat	9	50,9
Riau	12	29,0
Jambi	14	167,3
Sumatera Selatan	14	148,5
Bengkulu	7	24,9
Lampung	12	33,8
Kepulauan Bangka Belitung	4	24,7
Kepulauan Riau	5	38,5
Jawa Barat	47	236,0
Jawa Tengah	38	4.861,0
DI Yogyakarta	4	14,9
Jawa Timur	55	1.247,8
Banten	6	37,9
Bali	9	24,8
Nusa Tenggara Barat	8	57,0
Nusa Tenggara Timur	9	34,3
Kalimantan Barat	16	84,9
Kalimantan Tengah	13	94,5
Kalimantan Selatan	11	78,1
Kalimantan Timur	10	73,3
Sulawesi Utara	4	19,0
Sulawesi Tengah	11	40,8
Sulawesi Tenggara	3	7,7
Gorontalo	2	20,6

Propinsi	Jumlah TPA	Luas TPA (ha)
1	2	3
Sulawesi Barat	9	10,7
Maluku	4	506,0
Maluku Utara	4	48,0
Papua Barat	6	28,9
Papua	6	29,9

Sumber : SIGI PU

C. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi ke kawasan perkotaan mendorong meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana permukiman. Tempat tinggal yang sehat menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Lingkungan yang sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang terbebas dari pencemaran air, udara, dan tanah. Kondisi lingkungan yang sehat akan tercipta apabila limbah di lingkungan permukiman dapat dikelola dengan baik, termasuk limbah cair. Sebaliknya, air limbah yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan termasuk pada sumber air baku baik air permukaan maupun air tanah.

Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan dan strategi pelayanan pengelolaan air limbah yang tepat. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat secara aktif sangat diperlukan. Selain itu, masyarakat juga harus menerapkan pola hidup bersih agar prasarana yang telah terbangun dapat berfungsi maksimal.

Di kota-kota besar, dikembangkan sistem pengelolaan air limbah terpusat (*sewerage system*) yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran oleh air buangan/limbah rumah tangga dengan cara menyalurkannya melalui jaringan perpipaan untuk kemudian dioleh ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tabel 5.6. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah IPAL/IPLT	Kapasitas (m ³)	Luas (ha)	Layanan (jiwa)	Layanan (KK)
1	2	3	4	5	6
Aceh	9				
Sumatera Barat	14	2.417,6			
Riau	4				
Sumatera Selatan	9	52,0			
Jawa Barat	18	946.272,0			
Jawa Tengah	35	429,0			
DI Yogyakarta	2		7,67		
Jawa Timur	10				
Bali	4	51.081,4			
Nusa Tenggara Barat	25	1.018,3			
Nusa Tenggara Timur	3		0,24		
Kalimantan Barat	6	269,0			
Kalimantan Tengah	9	32,3			770
Kalimantan Selatan	9	13.000,0			
Sulawesi Tengah	2		1,3		
Gorontalo	4	435,0	45,4		
Sulawesi Barat	6		5		
Maluku	4			372.678	1.105
Papua Barat	2				

Sumber : Satker PPLP Aceh, Satker PPLP Sumatera Barat, Satker PPLP Riau, Satker PPLP Sumatera Selatan
Dinas PU Jawa Barat, Satker PPLP Jawa Tengah, Satker PPLP DI Yogyakarta, Satker PPLP Jawa Timur
Satker PPLP Bali, Satker PPLP NTB, Satker PPLP Kalimantan Barat, Satker PPLP Kalimantan Tengah
Satker Randal Kalimantan Selatan, Satker Randal Sulawesi Tengah, Satker PPLP Gorontalo
Satker PPLP Sulawesi Barat, Satker Randal Maluku, Satker PPLP Papua Barat

D. Kawasan Agropolitan dan Minapolitan

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa **kawasan agropolitan** adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sementara **kawasan minapolitan** merupakan turunan dari kawasan agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya

alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterikatan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan potensi lokal sebagai roda pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan termasuk daerah pesisir agar tercipta pemerataan pembangunan dan tidak hanya tumbuh pesat di wilayah perkotaan. Dengan demikian, kawasan agropolitan dan minapolitan mampu memainkan berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing di tingkat interregional maupun intraregional.

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan juga berorientasi pada kekuatan pasar yang dilaksanakan melalui pemberdayaan dan kegiatan agribisnis/minabisnis hulu sampai hilir. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sistem agribisnis/minabisnis yang utuh dan terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) seperti peningkatan jalan lingkungan poros desa, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, saluran drainase, pasar gudang penyimpanan, Stasiun Terminal Agribisnis (STA), peningkatan pasar ikan dan pembangunan lainnya.

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berlangsung sejak Tahun 2002. Sampai dengan Tahun 2011 telah terbangun sebanyak 382 kawasan agropolitan dan minapolitan di sejumlah desa pedalaman di Indonesia.

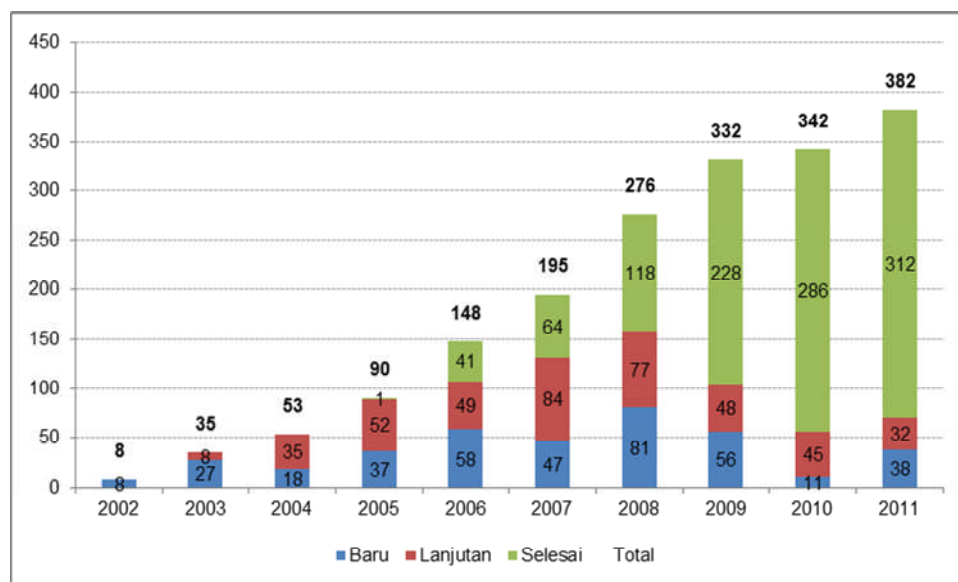
Tabel 5.7. Pencapaian Kawasan Agropolitan dan Minapolitan
Tahun 2002 - 2011

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Baru	8	27	18	37	58	47	81	56	11	38
Lanjutan		8	35	52	49	84	77	48	45	32
Selesai				1	41	64	118	228	286	312
Total	8	35	53	90	148	195	276	332	342	382

Sumber : Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonian, 2012

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 5.3. Pencapaian Kawasan Agropolitan dan Minapolitan
Tahun 2002 – 2011



Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada awal pelaksanaannya di Tahun 2002, telah berhasil dikembangkan sebanyak 8 kawasan. Sampai dengan Tahun 2011, sebanyak 292 kawasan telah selesai difasilitasi, 12 kawasan difasilitasi secara berlanjut, dan 20 kawasan baru memulai program fasilitasi. Jumlah kawasan yang menerima program agropolitan setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 5.8 serta Gambar 5.4 berikut ini.

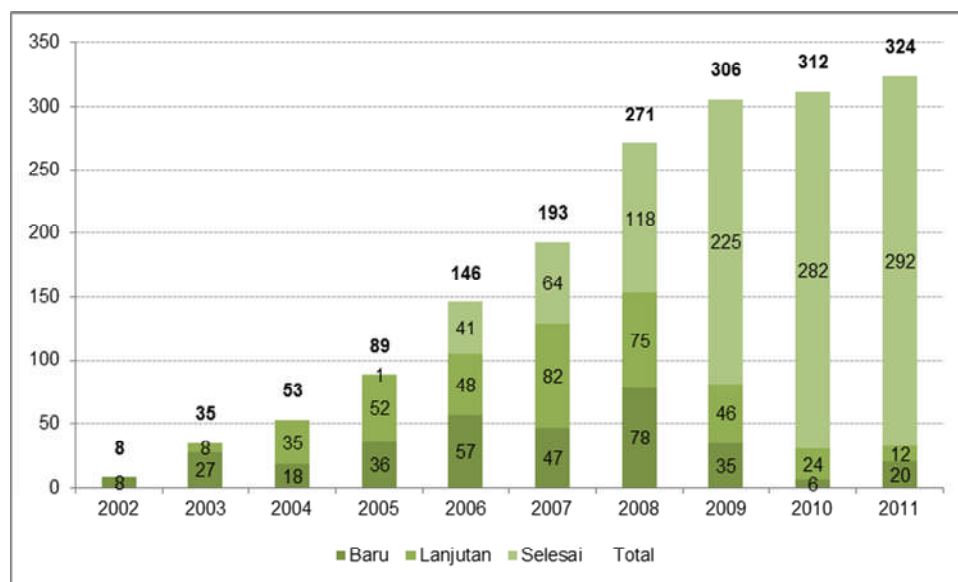
Tabel 5.8. Pencapaian Kawasan Agropolitan
Tahun 2002 - 2011

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Baru	8	27	18	36	57	47	78	35	6	20
Lanjutan		8	35	52	48	82	75	46	24	12
Selesai				1	41	64	118	225	282	292
Total	8	35	53	89	146	193	271	306	312	324

Sumber : Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonian, 2012

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 5.4. Pencapaian Kawasan Agropolitan
Tahun 2002 – 2011



Pengembangan kawasan minapolitan dimulai pada Tahun 2005 dengan hanya memfasilitasi 1 kawasan yang terus dilanjutkan hingga Tahun 2006. Sampai dengan Tahun 2011, terdapat 48 kawasan minapolitan dengan 10 kawasan yang telah selesai difasilitasi, 18 kawasan baru, dan 20 kawasan yang menerima fasilitasi lanjutan. Kinerja pengembangan kawasan minapolitan sejak Tahun 2005 hingga 2011 dapat dilihat pada Tabel 5.9 dan Gambar 5.5 berikut ini.

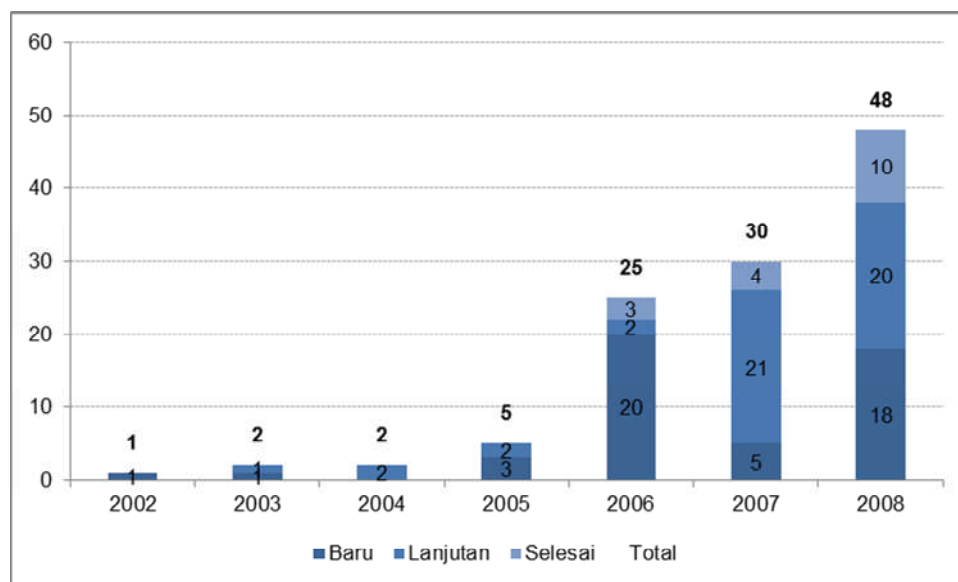
Tabel 5.9. Pencapaian Kawasan Minapolitan
Tahun 2005 - 2011

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Baru	1	1		3	20	5	18
Lanjutan		1	2	2	2	21	20
Selesai					3	4	10
Total	1	2	2	5	25	30	48

Sumber : Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonian, 2012

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 5.5. Pencapaian Kawasan Minapolitan
Tahun 2005 – 2011



Pada Tabel 5.10 – 5.6 di bawah ini disajikan data kabupaten/kota serta kawasan yang menerima program agropolitan dan minapolitan menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 5.10. Pencapaian Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Agropolitan
Tahun Anggaran 2003 – 2012

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5	6
Aceh	Aceh Besar, Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireun	6		Indrapuri, Lembah Seulawah, Mutiara, Peudada, Kluet, Idi	6
Sumatera Utara	Karo, Asahan, Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Berdagai, Mandailing Natal, Batubara, Kota Medan	11	1	Merek, Tanjung Sigoni, Lumban Julu, Pematang Cengkering, Silimakuta, Parbuluan, Medan Deras, Tanjung Tiram, Siborong-Borong, Dolok Sanggul, Harian, Tanjung Beringin, Sikara-Kara, Medan Utara	14

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5	6
Sumatera Barat	Agam, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Lima Puluh Koto, Dharmasraya, Pasaman, Sijunjung, Payakumbuh	9	1	IV Angkat Candung, Koto Gadang, Lembah Gumanti, X Koto, Sutea, VII Koto, Mungka, Sitiung, Mandeh, Rao, Palangki, Bukit P. Sembilan, Kamang Magek	13
Riau	Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hulu, Kuantan Senggigi, Pelalawan, Dumai	7		Tempuling, Rambah Samo, Tapung Hilir, XII Koto Kampar, Rengat Barat, Benai, Kebun Durian Gunung Sahilan, Sei Bagan, Sungai Sembilan, Sei Upih Teluk Beringin	13
Jambi	Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Kerinci, Sorolangun, Merangin, Batanghari	6		Rantau Rasau, Kumpeh Hulu, Kayu Aro, Singkut, Batang Mesumai, Pemayung	6
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Induk, Banyu Asin, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Palembang	8	2	Martapura, Dempo Utara, Lengkiti, Pulau Beringin, Banyu Urip, Tugu Mulyo, Tanjung Lago, Muara Beliti, Gandus, Bakung, Baturaja Timur, Lempuing	12
Bengkulu	Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kepahiang, Bengkulu Selatan, Lebong, Seluma, Kaur	7		Selupu Rejang, Padang Jaya, Ujan Mas, Seginim, Lebong Tengah, Seluma Selatan, Maje dan Kaur Selatan, Maje dan Nasal	8
Lampung	Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Barat, Pesawaran, Pringsewu	8		Terbagi Besar, Gisting, Sribawono, Jati Ayu, Ketapang, Sidomulyo, Mesuji Atas, Batu Brak, Srikaton, Padang Cermin-Punduh Pidada	10
Kepulauan Bangka Belitung	Belitung, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan	4		Mambalong, Tanjung Binga, Pangkalan Baru, Sungai Selatan, Sungailiat, Tanjung Gunung, Mendo Barat, Salepliat	8
Kepulauan Riau	Karimun, Bintan, Natuna	3		Kundur, Tuapaya, Mantang, Serasan	4

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5	6
Jawa Barat	Cianjur, Indramayu, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Bandung, Garut, Ciamis, Sukabumi, Subang, Majalengka, Cirebon, Karawang	13		Pacet, Jatinyuat, Karangsong, Eretan, Cigugur, Leuwiliang, Ciseeng, Bojong, Pangalengan, Cisirup, Panumbangan, Kadudampit, Sukamaju, Ciemas, Sagala Herang, Serang Panjang, Lemah Sugih, Losari, Cilamaya	18
Jawa Tengah	Semarang, Pemalang, Wonosobo, Batang, Magelang, Purbalingga, Karanganyar, Brebes, Boyolali, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purworejo, Pekalongan	14		Sumowono, Belik, Rojonoto, Surbanwali, Merapi Merbabu, Larangan, Bunga Kondang, Sutomadansih, Goasebo, Beji, Jayabaya, Bagelen, Majenang, Talang Kerido	14
DI Yogyakarta	Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul	4		Kali Bawang, Temon, Turi, Karangmojo, Playen, Bejiharjo, Girisobo, Imogiri, Gading Sari	9
Jawa Timur	Ngawi, Banyuwangi, Mojokerto, Lumajang, Tulungagung, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Pacitan, Madiun, Pamekasan, Ponorogo, Trenggalek, Nagnjuk, Malang, Lamongan, Tuban, Gresik	18		Paron, Bangorejo, Muncar, Pacet, Senduro, Sendang, Soburbang, Kanigoro, Nglegok, Tutur, Nawangan, Bandar Tamperan, Gedangsari, Pakong dan Waru, Ngebel, Bendungan, Sukomoro, Wajak, Poncokusumo, Ngimbang, Paseban, Sidayu	21
Banten	Pandeglang, Serang, Tangerang, Lebak	4		Menes, Mandalawangi, Pontang, Waringin Kurung, Pabuaran, Baros, Gunung Sari, Sepatan, Kronjo, Wanasalam	10
Bali	Bangli, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Badung, Karang Asem, Klungkung	8		Catur-Kintamani, Payangan, Baturiti, Melaya, Depeha, Sibeta (Bebandem), Plaga, Nusa Penida	8
Nusa Tenggara Barat	Dompu, Lombok Timur, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Bima	7		Manggelawa, Sikur, Alas Utan, Aik Meneng, Pekat, Lembah Sempage Akar-Akar Kuripan, Sembalun, Keruwak Jerowaru, Kemuter Telu, Woha	10
Nusa Tenggara Timur	Kupang, Manggarai, Bellu, Sumba Timur, Sikka, Sumba Barat	6		Oesao, Iteng, Betun, Koba Lima, Kambaniru, Pesisir Sikka, Lamboya	7

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5	6
Kalimantan Barat	Sambas, Pontianak, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Singkawang, Kubu Raya, Kota Pontianak	7	1	Sepinggan-Semparuk, Pontianak Utara, Sungai Kakap, Sanggau Ledo, Rasau Jaya, Sei Tebelian, Matan Hilir Selatan, Pangmilang, Rasau Jaya, Sungai Rengas, Jawai Selatan, Semparuk, Matan Hilir Sel. Pasaguan	13
Kalimantan Tengah	Kapuas, Barito Timur, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Pulau Pisau, Katingan	8		Basarang, Dusun Tengah, Pangkalan Lada, Jelai, Seruyan Hilir, Teluk Sampit, Sei Bakau, Sebuai, Teluk Sampit, Katingan Kuala	10
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Banjar, Tabalong	6		Labuhan Amas Utara, Terantang, Pelaihari, Amuntal, Cindai Alus, Tanjung	6
Kalimantan Timur	Kutai Timur, Bulungan, Paser, Paser Utara, Malinau, Berau	6		Sanggata, Pasopati, Padang Pangprapat, Penajam, Rantau Pulung, Kaliyamok, Sabitta	7
Sulawesi Utara	Minahasa Selatan, Minahasa, Sangihe, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Tomohon, Bolaang Mongondow Utara, Bitung, Bolaang Mongondow Timur	9		Modoinding, Tengasinonsayang, Ngasaan, Tatapaan, Pakakaan, Dagho, Tabukan Selatan, Klabat, Managabata, Dumoga, Lolayan, Tomohon, Bolaang Mongondow Utara, Mondayag, PPN Bitung	15
Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi Moutong, Banggai, Toli-Toli, Tojo Una-Una, Poso, Morowali	7		Biromaru, Labean, Bolano Lambunu, Kasimbar, Desa Kasimbar, Tolli, Galang, Wakai, Napu, Witaponda	10
Sulawesi Selatan	Barru, Enrekang, Soppeng, Tana Toraja, Bulukumba, Selayar, Bone, Sidrap, Gowa, Luwu Timur, Jeneponto, Pangkep, Sinjai, Luwu	14		Barru, Maiwa, Lajoa, Rindingallo, Gantarang, Bontomanai, Pasaka, Alakuang, Bontonompo, Malili, Kelar Rumbia, Labakkang, Sinjai Timur, Belopa	14
Sulawesi Tenggara	Kendari, Bombana, Muna, Buton, Konawe Selatan, Kolaka	6		Bondoala, Lantari, Kabangka, Lasalimu Selatan, Tinanggea, Lelembuu, Wolo	7
Gorontalo	Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara	5		Randangan, Bongo Nol, Pulubala, Kabila, Tumbilato, Kwandang, Anggrek	7
Sulawesi Barat	Polewali Mandar, Mamuju Utara, Majene, Mamuju	4		Matakali, Pasang Kayu, Sendana, PPI Bonda	4

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5	6
Maluku	Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Ambon	6		Waihatu, Waimital & Piru, Kairatu, Wrinama & Bula, Kairatu & Buano, PPN Ambon	5
Maluku Utara	Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Ternate	5	1	Sahu, Wairoro, Toliwang, Wasile, Mekar Sari, Manggayoang, PPN Ternate	7
Papua Barat	Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak	4		Prafi, Aimas, Selat Segawin, Bomberai	4
Papua	Jayapura, Nabire, Yapen, Waropen, Kota Jayapura	4	1	Grime Sekori, Wanggar, Distrik Kosiwo, Distrik Waropen, Koya Distrik Muara Tami	5

Sumber : Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonian, 2012

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 5.11. Pencapaian Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun Anggaran 2005 – 2012

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten	Kawasan	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5
Aceh	Aceh Selatan	1	Kluet, Idie	2
Sumatera Utara	Serdang Berdagai	1	Tanjung Beringin	1
Sumatera Barat	Pesisir Selatan	1	Mandeh	1
Riau	Kampar, Kuantan Senggigi	2	XIII Koto Kampar, Teso Benai	2
Jambi	Batang Hari, Muaro Jambi	2	Pemayung, Kumpeh Ulu	2
Sumatera Selatan	Ogan Ilir, Palembang	2	Bakung, Gandus	2
Bengkulu	Kaur	1	Nasal	1
Lampung	Lampung Selatan	1	Ketapang	1
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka, Bangka Selatan	2	Sungai Liat, Salepliat	2
Kepulauan Riau	Bintan	1	Mantang	1
Jawa Barat	Bogor, Sukabumi	2	Leuwiliang, Ciseeng, Pelabuhan	3
Jawa Tengah	Banyumas, Cilacap	2	Beji, Majenang	2
DI Yogyakarta	Gunung Kidul	1	Playen	1
Jawa Timur	Malang, Blitar, Pacitan	3	Wajak, Nglegok, PPI Tamperang	3
Banten	Serang	1	Pontang, Pabuaran	2
Bali	Klungkung	1	Nusa Penida	1

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten	Kawasan	Jumlah Kawasan
1	2	3	4	5
Nusa Tenggara Barat	Bima, Lombok Timur	2	Woha, Keruak Jerowaru	2
Nusa Tenggara Timur	Sikka, Belu	2	Pesisir Sikka, Koba Lima	2
Kalimantan Barat	Sambas	1	Jawal	1
Kalimantan Selatan	Pulau Pisang, Banjar	2	Telok Gohong, Cindai Alus	2
Kalimantan Timur	Malinau	1	Kaliamok	1
Sulawesi Utara	Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Sangihe	3	Klabat, Managabata, Tatapaan, Tabukan Selatan	3
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una, Donggala	2	Wakai, Labean	2
Sulawesi Selatan	Luwu Timur, Gowa, Pangkep	3	Malili, Bontonompo, Pangkajene	1
Sulawesi Tenggara	Kolaka, Konawe Selatan	2	Wolo, Tinanggea	3
Gorontalo	Gorontalo Utara	1	Anggrek	1
Sulawesi Barat	Mamuju	1	Bonda	1
Papua Barat	Raja Ampat	1	Selat Segawin	1
Papua	Waropen, Jayapura	2	Waropen Bawah, Muara Tami	2

Sumber : Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonian, 2012

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

E. Rumah Susun Sederhana Sewa

Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) adalah rumah susun yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (< Rp 2,5 juta/bulan). Selain rusunawa, ada pula rumah susun sederhana milik (rusunami) yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan menengah.

Dibangunnya rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya menjadi bagian dari upaya penataan/peremajaan kawasan kumuh di kota yang memiliki lahan terbatas. Pembangunan rusunawa juga dimaksudkan untuk mengatasi beberapa permasalahan permukiman, yaitu:

- Penyediaan tempat hunian yang layak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- Penanggulangan permukiman perkotaan yang berkembang tidak sehat (kumuh).

- Menjembatani masyarakat yang belum mempunyai rumah untuk mendapatkan tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai kondisi dan kemampuan pendapatan termasuk hunian untuk mahasiswa.

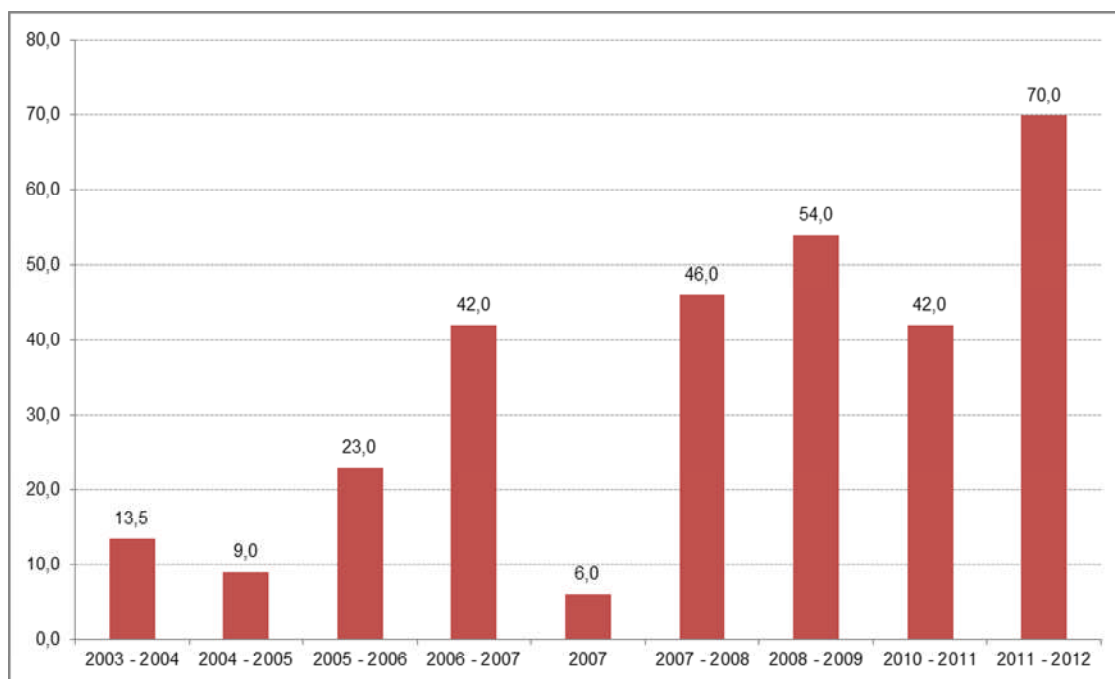
Rusunawa telah dirintis oleh Kementerian PU sejak Tahun 2003. Ketika itu hanya tujuh provinsi yang menjadi lokasi pembangunan Rusunawa, yaitu Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tak kurang dari 1.240 unit hunian dibangun pada waktu itu, dan mendapat tanggapan positif baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Hingga Tahun 2012 ada sebanyak 305,5 *twin block* dengan 29.738 unit rusunawa yang telah terbangun di 26 provinsi. Pada Tabel 5.12 serta Gambar 5.6 dan 5.7 di bawah ini ditampilkan jumlah rusunawa terbangun menurut tahun anggaran dan provinsi di Indonesia.

Tabel 5.12. Pembangunan Rusunawa di Indonesia
Tahun 2003 - 2012

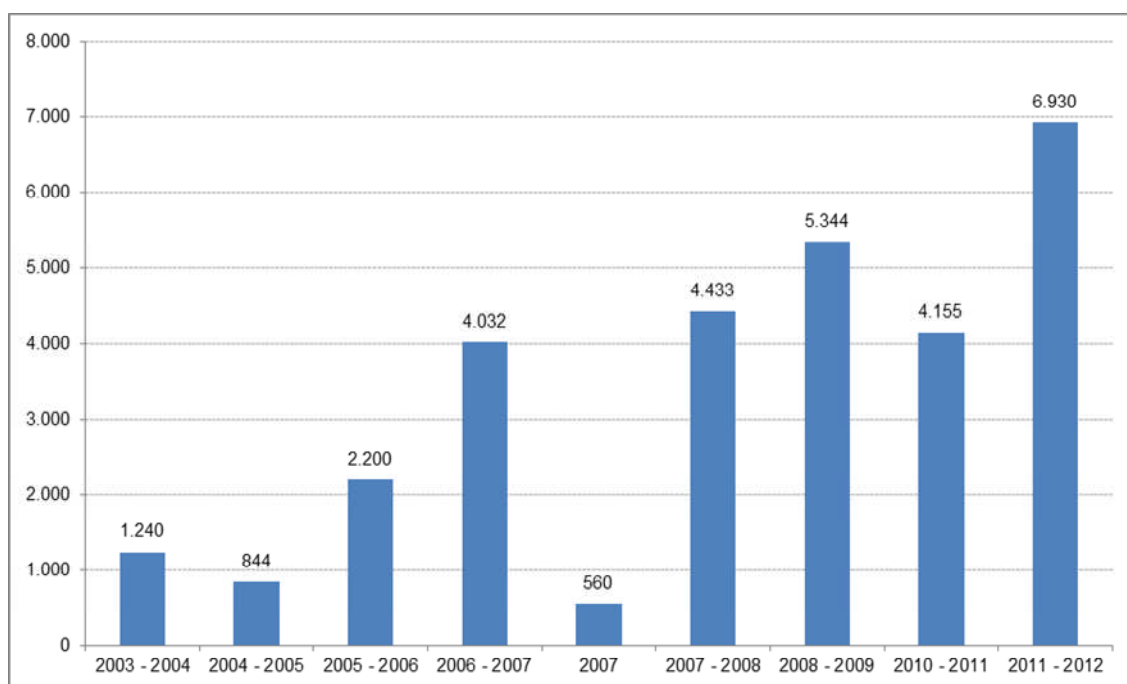
Tahun Anggaran	Jumlah Terbangun	
	Twin Block (TB)	Unit
1	2	3
2003 - 2004	13,5	1.240
2004 - 2005	9,0	844
2005 - 2006	23,0	2.200
2006 - 2007	42,0	4.032
2007	6,0	560
2007 - 2008	46,0	4.433
2008 - 2009	54,0	5.344
2010 - 2011	42,0	4.155
2011 - 2012	70,0	6.930
Jumlah	305,5	29.738

Sumber : Direkap dari : Data Pembangunan Rusunawa Tahun Anggaran 2003 - 2012
Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU

Gambar 5.6. Pembangunan Rusunawa di Indonesia
Tahun 2003 – 2012 (twin block)



Gambar 5.7. Pembangunan Rusunawa di Indonesia
Tahun 2003 – 2012 (unit)



Tabel 5.13. Jumlah Rusunawa Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2003 – 2012

Provinsi	Jumlah Twin Block (TB)	Jumlah Unit
1	2	3
Aceh	4,0	396
Sumatera Utara	18,0	1.761
Sumatera Barat	5,0	492
Riau	5,0	457
Jambi	0,0	0
Sumatera Selatan	8,0	783
Bengkulu	1,0	96
Lampung	4,0	390
Kepulauan Bangka Belitung	4,0	396
Kepulauan Riau	14,0	1.386
DKI Jakarta	20,0	1.959
Jawa Barat	39,0	3.721
Jawa Tengah	51,0	4.986
DI Yogyakarta	21,0	2.022
Jawa Timur	56,0	5.478
Banten	6,5	636
Bali	0,0	0
Nusa Tenggara Barat	1,0	99
Nusa Tenggara Timur	1,0	96
Kalimantan Barat	3,0	294
Kalimantan Tengah	1,0	96
Kalimantan Selatan	3,0	291
Kalimantan Timur	6,0	588
Sulawesi Utara	4,0	393
Sulawesi Tengah	2,0	198
Sulawesi Selatan	18,0	1.746
Sulawesi Tenggara	7,0	690
Gorontalo	0,0	0
Sulawesi Barat	0,0	0
Maluku	0,0	0
Maluku Utara	0,0	0
Papua Barat	0,0	0
Papua	3,0	288
Indonesia	305,5	29.738

Sumber : Direkap dari : Data Pembangunan Rusunawa Tahun Anggaran 2003 - 2012
 Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis
 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU

F. Analisis Statistik Infrastruktur Cipta Karya

Air sebagai kebutuhan dasar hidup manusia, menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan permukiman layak huni. Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yang salah satunya adalah PDAM berupaya untuk menyediakan air bersih untuk melayani kepentingan masyarakat. Data mengenai penyediaan air minum melalui PDAM Tahun 2011 dan 2012 menginformasikan tentang kapasitas terpasang, kapasitas produksi, jumlah penduduk di wilayah pelayanan, dan jumlah penduduk terlayani.

Sebuah analisa dilakukan untuk melihat cakupan pelayanan, rata-rata tingkat kehilangan air dan rasio antara kapasitas produksi dengan jumlah penduduk terlayani menurut provinsi. Cakupan pelayanan merupakan persentase jumlah penduduk terlayani terhadap penduduk di wilayah pelayanan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu memberikan pelayanan terhadap wilayah pelayanan teknisnya. Rata-rata tingkat kehilangan air untuk melihat kemampuan PDAM dalam mengendalikan penjualan air minumnya melalui sistem distribusi perpipaan. Sementara rasio kapasitas produksi dengan jumlah penduduk terlayani sebagai informasi untuk mengetahui kemampuan PDAM dalam memproduksi air (l/dt) per 1000 pelanggan. Semakin tinggi nilai rasio kapasitas produksi terhadap jumlah penduduk terlayani, maka kemampuan PDAM dalam memproduksi air untuk melayani pelanggannya semakin baik dari sisi kuantitas.

Jika dibandingkan menurut provinsi, cakupan pelayanan PDAM di Indonesia paling tinggi adalah Kalimantan Timur yang mencapai 66,5% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Untuk rata-rata tingkat kehilangan air, provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan nilai rata-rata tingkat kehilangan air yang paling kecil (di bawah 25%), yaitu 22,81%. Kemudian untuk rasio kapasitas produksi dengan jumlah penduduk terlayani yang paling tinggi adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 11,01 l/dt per 1000 pelanggan.

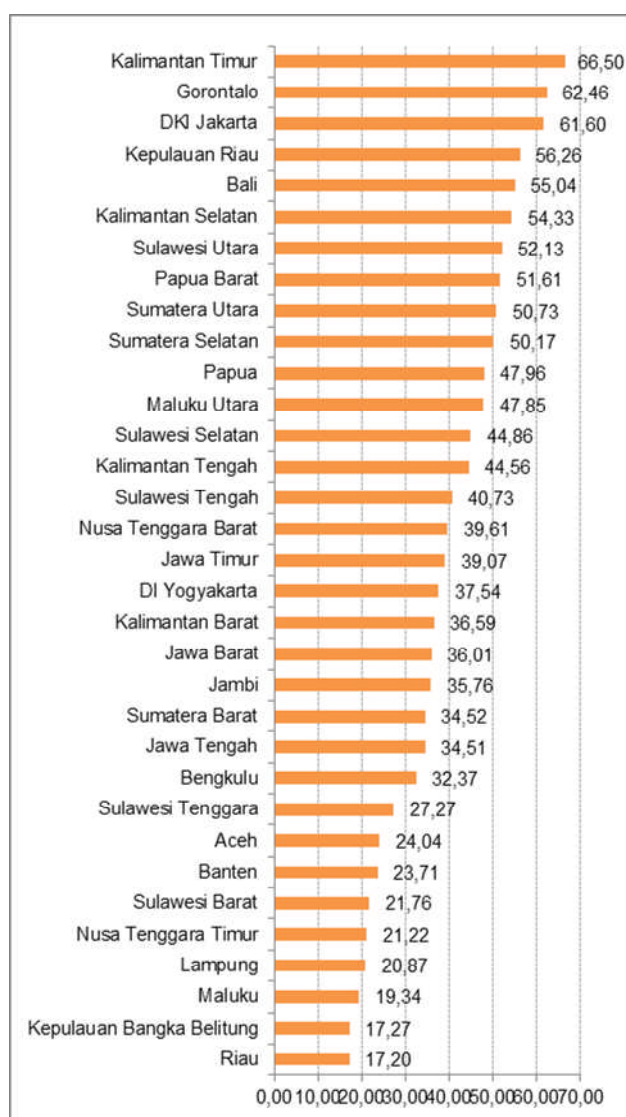
Tabel 5.14. Layanan PDAM di Indonesia

Provinsi	Cakupan Pelayanan (%)	Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air (%)	Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (litr/dtk per 1000 pelanggan)
1	2	3	4
Aceh	24,04	40,42	2,56
Sumatera Utara	50,73	40,58	2,31
Sumatera Barat	34,52	29,86	2,13
Riau	17,20	40,94	2,16
Jambi	35,76	33,10	1,79
Sumatera Selatan	50,17	26,72	2,12
Bengkulu	32,37	35,77	2,53
Lampung	20,87	44,16	2,13
Kepulauan Bangka Belitung	17,27	29,68	11,01
Kepulauan Riau	56,26	45,10	1,69
DKI Jakarta	61,60	43,60	2,72
Jawa Barat	36,01	31,90	1,65
Jawa Tengah	34,51	30,72	1,72
DI Yogyakarta	37,54	35,12	1,30
Jawa Timur	39,07	30,89	2,12
Banten	23,71	28,13	4,58
Bali	55,04	27,40	2,41
Nusa Tenggara Barat	39,61	32,31	1,74
Nusa Tenggara Timur	21,22	31,94	1,80
Kalimantan Barat	36,59	39,84	2,27
Kalimantan Tengah	44,56	24,60	1,76
Kalimantan Selatan	54,33	22,81	1,68
Kalimantan Timur	66,50	26,88	2,66
Sulawesi Utara	52,13	45,83	1,79
Sulawesi Tengah	40,73	32,31	1,51
Sulawesi Selatan	44,86	31,12	2,15
Sulawesi Tenggara	27,27	38,34	1,81
Gorontalo	62,46	39,05	1,16
Sulawesi Barat	21,76	23,48	1,41
Maluku	19,34	42,82	2,33
Maluku Utara	47,85	28,18	2,32
Papua Barat	51,61	32,85	1,92
Papua	47,96	45,97	5,19

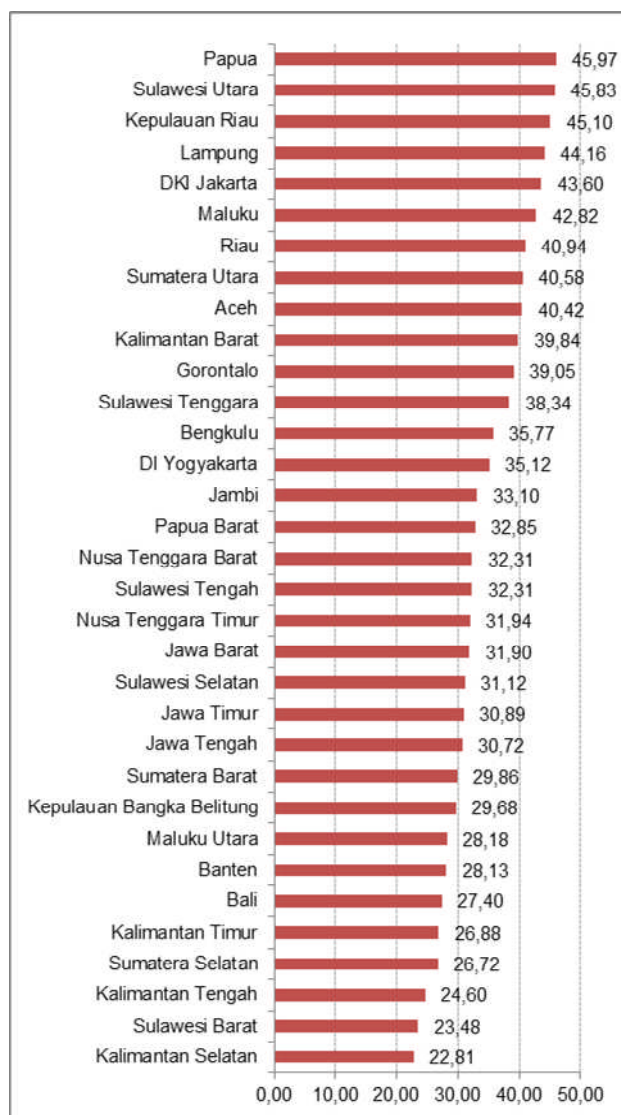
Sumber : Diolah dari : Kinerja PDAM 2011, 2012

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

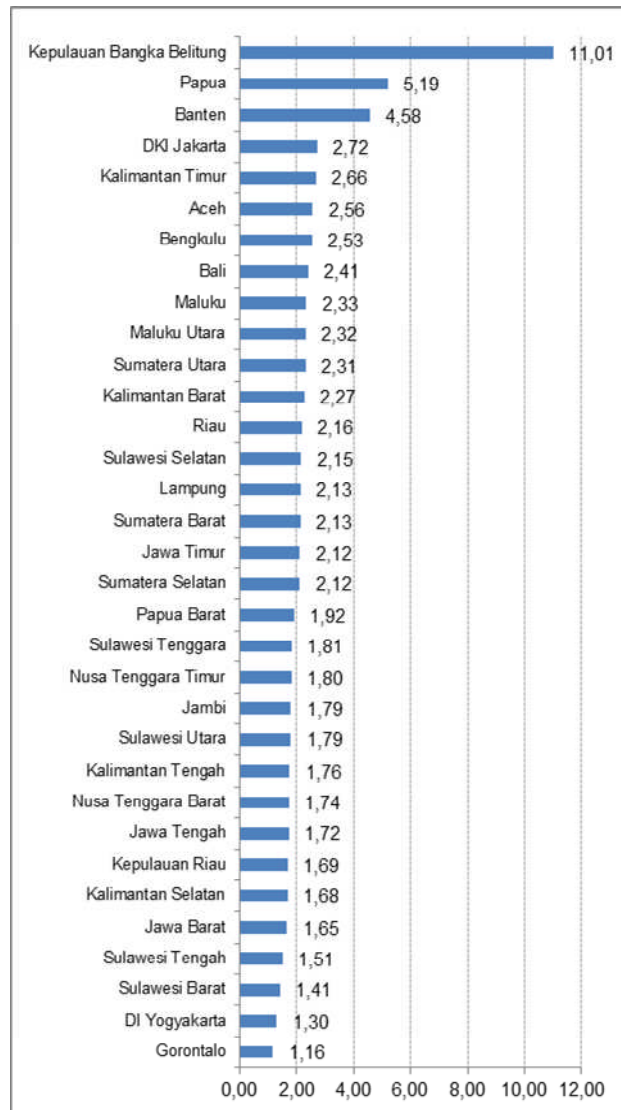
Gambar 5.8. Cakupan Pelayanan PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)



Gambar 5.9. Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)



Gambar 5.10. Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (ltr/dtk per 1000 pelanggan)



Tingkat kehilangan air yang relatif tinggi pada sistem perpipaan PDAM serta rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan air minum masih terjadi dalam sistem penyediaan air minum di Indonesia. Tingkat kehilangan air yang relatif tinggi terjadi akibat faktor teknis dan non teknis serta menjadi refleksi dari pengelolaan PDAM yang kurang efisien. Sedangkan pertumbuhan perluasan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan yang rendah tidak

dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu kualitas dalam penyediaan air minum juga harus diperhatikan agar meminimumkan terjadinya kontaminasi pada jaringan distribusi yang menyebabkan kualitas air tidak layak dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan air minum, maka dibutuhkan suatu alat untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan SPAM yang aman bagi masyarakat. Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan organisasi kesehatan dunia telah mengembangkan pendekatan pengendalian kualitas pelayanan air minum dari hulu hingga hilir dengan pendekatan manajemen berbasis resiko. Pendekatan ini dikenal dengan *Water Safety Plan (WPS)* atau Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang kemudian diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan SPAM.

BAB VI

PENATAAN RUANG

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa **penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang melingkupi struktur ruang dan pola ruang. **Struktur ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara **pola ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana tata ruang kemudian dijadikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar memiliki ketetapan hukum. RTRW Nasional (RTRWN) menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Perda RTRW menjadi pedoman pembangunan di daerah agar lebih fokus dan terarah.

Sampai dengan September 2013 progres penyelesaian Perda RTRW menghasilkan 17 dari 33 Perda RTRW Provinsi, 243 dari 398 Perda RTRW Kabupaten, dan 64 dari 93 Perda RTRW Kota. Dapat dikatakan progress Perda RTRW Provinsi mencapai 51,5%; Perda RTRW Kabupaten 61,1%; dan Perda RTRW Kota 68,8% seperti tertera pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Status Perda RTRW di Indonesia
September 2013

Status Perda RTRW	Provinsi	Kabupaten	Kota
1	2	3	4
Proses Revisi	0	1	1
Proses Rekomendasi Gubernur	0	0	1
Sudah Pembahasan BKPRN	0	0	2
Sudah Mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri PU	16	154	25
Perda	17	243	64
Jumlah	33	398	93
Progres Persetujuan Substansi	100,0%	99,7%	95,7%
Progres Perda RTRW	51,5%	61,1%	68,8%

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tabel 6.2a. Status Perda RTRW di Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2013

Provinsi	Jumlah	Lingkup		
		Provinsi	Kab	Kota
1	2	3	4	5
Aceh	24	1	18	5
Sumatera Utara	34	1	25	8
Sumatera Barat	20	1	12	7
Riau	13	1	10	2
Jambi	12	1	9	2
Sumatera Selatan	16	1	11	4
Bengkulu	11	1	9	1
Lampung	15	1	12	2
Kepulauan Bangka Belitung	8	1	6	1
Kepulauan Riau	8	1	5	2
DKI Jakarta	1	1	0	0
Jawa Barat	27	1	17	9
Jawa Tengah	36	1	29	6
DI Yogyakarta	6	1	4	1
Jawa Timur	39	1	29	9
Banten	9	1	4	4
Bali	10	1	8	1
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2
Nusa Tenggara Timur	22	1	20	1
Kalimantan Barat	15	1	12	2

Provinsi	Jumlah	Lingkup		
		Provinsi	Kab	Kota
1	2	3	4	5
Kalimantan Tengah	15	1	13	1
Kalimantan Selatan	14	1	11	2
Kalimantan Timur	15	1	10	4
Sulawesi Utara	16	1	11	4
Sulawesi Tengah	12	1	10	1
Sulawesi Selatan	25	1	21	3
Sulawesi Tenggara	13	1	10	2
Gorontalo	7	1	5	1
Sulawesi Barat	6	1	5	0
Maluku	12	1	9	2
Maluku Utara	10	1	7	2
Papua Barat	12	1	10	1
Papua	30	1	28	1
Indonesia	524	33	398	93

Tabel 6.2b. Status Perda RTRW di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2013

Provinsi	Proses RTRW				Perda
	Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi dari Menteri PU	
1	6	7	8	9	10
Aceh	1	1	0	18	4
Sumatera Utara	0	0	0	30	4
Sumatera Barat	0	0	0	1	19
Riau	1	0	0	12	0
Jambi	0	0	0	7	5
Sumatera Selatan	0	0	0	4	12
Bengkulu	0	0	0	1	10
Lampung	0	0	0	2	13
Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	5	3
Kepulauan Riau	0	0	0	5	3
DKI Jakarta	0	0	0		1
Jawa Barat	0	0	0	3	24
Jawa Tengah	0	0	0	0	36
DI Yogyakarta	0	0	0	0	6

Provinsi	Proses RTRW				Perda
	Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi dari Menteri PU	
1	6	7	8	9	10
Jawa Timur	0	0	1	3	35
Banten	0	0	0	0	9
Bali	0	0	0	4	6
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	11
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	2	20
Kalimantan Barat	0	0	0	13	2
Kalimantan Tengah	0	0	0	14	1
Kalimantan Selatan	0	0	0	9	5
Kalimantan Timur	0	0	0	10	5
Sulawesi Utara	0	0	0	15	1
Sulawesi Tengah	0	0	0	2	10
Sulawesi Selatan	0	0	0	1	24
Sulawesi Tenggara	0	0	0	5	8
Gorontalo	0	0	0	2	5
Sulawesi Barat	0	0	0	4	2
Maluku	0	0	0	2	10
Maluku Utara	0	0	0	1	9
Papua Barat	0	0	1	4	7
Papua	0	0	0	16	14
Indonesia	2	1	2	195	324

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, September 2013

Suatu daerah yang belum memiliki Perda RTRW dapat menimbulkan dampak buruk seperti semakin menyempit atau bahkan habisnya lahan-lahan produktif strategis karena dialihfungsikan menjadi kawasan lainnya. Namun membuat Perda RTRW membutuhkan proses yang panjang karena harus melalui persetujuan pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai rencana rinci dari RTRWN berisi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, strategi operasionalisasi perwujudan struktur dan pola ruang, serta

indikasi program jangka menengah lima tahun. Salah satu isi penting dalam RTR Pulau/Kepulauan adalah strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Strategi operasionalisasi tersebut dimaksudkan sebagai langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional.

Dalam RTR Pulau, dikenal beberapa jenis fungsi kota, yaitu:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Dalam Tabel 6.3. di bawah ini disajikan Rencana Tata Ruang Pulau beserta jenis dan fungsi dari kawasannya berdasarkan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan.

Tabel 6.3. Rencana Tata Ruang Pulau

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Sumatera	Aceh	Lhokseumawe	PKN	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pertanian
Sumatera	Aceh	Sabang	PKW/ PKSN	Pariwisata, Industri, Perikanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara
Sumatera	Aceh	Banda Aceh	PKW	Industri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata
Sumatera	Aceh	Langsa	PKW	Pertanian, Perikanan, Industri
Sumatera	Aceh	Takengon	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Aceh	Meulaboh	PKW	Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Mebidangro (Medan-Binjai-Deli-Serdang-Karo)	PKN	Industri, Perkebunan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Hutan, Pertambangan
Sumatera	Sumatera Utara	Tebingtinggi	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Utara	Sidikalang	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Utara	Pematang Siantar	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri, Pariwisata

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Sumatera	Sumatera Utara	Balige	PKW	Pertanian, Pariwisata, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Rantau Prapat	PKW	Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Kisaran	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri, Kehutanan
Sumatera	Sumatera Utara	Gunung Sitoli	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Padang Sidempuan	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan
Sumatera	Sumatera Utara	Sibolga	PKW	Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Barat	Padang	PKN	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Barat	Pariaman	PKW	Industri, Pertanian, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Barat	Sawahlunto	PKW	Industri, Perkebunan, Pertambangan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Barat	Muarasiberut	PKW	Industri, Perikanan, Pariwisata, Pertanian
Sumatera	Sumatera Barat	Bukittinggi	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Barat	Solok	PKW	Perkebunan, Pertambangan, Pertanian, Pariwisata, Industri
Sumatera	Riau	Pekanbaru	PKN	Industri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sumatera	Riau	Dumai	PKN/ PKSN	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara
Sumatera	Riau	Bangkinang	PKW	Industri, Perkebunan
Sumatera	Riau	Taluk Kuantan	PKW	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Industri
Sumatera	Riau	Bengkalis	PKW	Industri, Perkebunan
Sumatera	Riau	Bagan Siapi-api	PKW	Industri, Perikanan
Sumatera	Riau	Tembilahan	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Riau	Rengat	PKW	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Industri
Sumatera	Riau	Pangkalan Kerinci	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri, Kehutanan
Sumatera	Riau	Pasir Pangarayan	PKW	Industri migas, Perkebunan, Industri
Sumatera	Riau	Siak Sri Indrapura	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Kepulauan Riau	Batam	PKN/ PKSN	Perikanan, Pariwisata, Industri, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara
Sumatera	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	PKW	Pariwisata, Perikanan, Industri
Sumatera	Kepulauan Riau	Tarempa	PKW	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata, Pertambangan
Sumatera	Kepulauan Riau	Daik Lingga	PKW	Perikanan, Pertambangan
Sumatera	Kepulauan Riau	Dabo-Pulau Singkep	PKW	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sumatera	Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun	PKW	Perikanan, Pertambangan, Industri

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Sumatera	Kepulauan Riau	Ranai	PKSN	Industri, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara
Sumatera	Jambi	Jambi	PKN	Perkebunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perikanan, Pariwisata
Sumatera	Jambi	Kuala Tungkal	PKW	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pertanian
Sumatera	Jambi	Sarolangun	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Jambi	Muara Bungo	PKW	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Industri
Sumatera	Jambi	Muara Bulian	PKW	Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Pariwisata, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Palembang	PKN	Pertanian, Industri, Kehutanan, Pertambangan, Perikanan, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Selatan	Muara Enim	PKW	Pertanian, Pertambangan, Perkebunan, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Kayuagung	PKW	Industri, Perikanan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Selatan	Baturaja	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Selatan	Prabumulih	PKW	Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Lubuk Linggau	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Sekayu	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Selatan	Lahat	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Bengkulu	Bengkulu	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan
Sumatera	Bengkulu	Manna	PKW	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri
Sumatera	Bengkulu	Mukomuko	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri
Sumatera	Bengkulu	Curup	PKW	Pertanian, Industri
Sumatera	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri
Sumatera	Bangka Belitung	Muntok	PKW	Perikanan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera	Bangka Belitung	Tanjungpandan	PKW	Perkebunan, Pariwisata, Pertanian, Industri
Sumatera	Bangka Belitung	Manggar	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Lampung	Bandar Lampung	PKN	Perkebunan, Pariwisata, Industri, Pertanian, Perikanan
Sumatera	Lampung	Metro	PKW	Perkebunan, Industri, Pertanian
Sumatera	Lampung	Kalianda	PKW	Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Industri
Sumatera	Lampung	Liwa	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera	Lampung	Menggala	PKW	Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri
Sumatera	Lampung	Kotabumi	PKW	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri
Sumatera	Lampung	Kota Agung	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Jawa-Bali	DKI Jakarta-Jawa Barat-Banten	Jabodetabek	PKN	Industri, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Banten	Serang	PKN	Industri, Pariwisata, Pertanian, Perikanan
Jawa-Bali	Banten	Cilegon	PKW	Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Banten	Pandeglang	PKW	Pertanian
Jawa-Bali	Banten	Rangkas Bitung	PKW	Pertanian
Jawa-Bali	Jawa Barat	Bandung Raya	PKN	Industri, Pertanian, Pariwisata, Perkebunan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Barat	Cirebon	PKN	Pertanian, Industri, Perikanan, Pertambangan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Barat	Sukabumi	PKW	Pertanian, Perkebunan, Industri
Jawa-Bali	Jawa Barat	Cikampek-Cikopo	PKW	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Palabuhan Ratu	PKW	Perikanan, Pariwisata, Industri
Jawa-Bali	Jawa Barat	Indramayu	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan, Pertambangan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Kadipaten	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Tasikmalaya	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Pangandaran	PKN	Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Surakarta	PKN	Industri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur)	PKN	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Cilacap	PKN	Pertanian, Pariwisata, Pertambangan, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Boyolali	PKW	Industri, Pertanian
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Klaten	PKW	Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Salatiga	PKW	Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Tegal	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Pekalongan	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kudus	PKW	Pertanian, Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Cepu	PKW	Pertambangan, Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Magelang	PKW	Pariwisata, Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Wonosobo	PKW	Industri, Pertanian
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kebumen	PKW	Industri, Pertanian, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Purwokerto	PKW	Industri
Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Yogyakarta	PKN	Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Bantul	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Sleman	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Jawa-Bali	Jawa Timur	Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila)	PKN	Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Timur	Malang	PKW	Pertanian, Perikanan, Industri, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Timur	Probolinggo	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Tuban	PKW	Industri, Pariwisata, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Kediri	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Madiun	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Banyuwangi	PKW	Industri, Pertanian, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Jember	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Blitar	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Pamekasan	PKW	Industri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Perkebunan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Bojonegoro	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Pertambangan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Pacitan	PKW	Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata
Jawa-Bali	Bali	Denpasar-Bandung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita)	PKN	Pariwisata, Pertanian, Industri, Perikanan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Bali	Singaraja	PKW	Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Industri
Jawa-Bali	Bali	Semarapura	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri
Jawa-Bali	Bali	Negara	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri
Kalimantan	Kalimantan Barat	Pontianak	PKN	Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Barat	Mempawah	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Barat	Singkawang	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Sambas	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Ketapang	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Putussibau	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Barat	Entikong	PKW/PSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas negara, Pertahanan dan keamanan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Kalimantan	Kalimantan Barat	Sanggau	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Sintang	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Paloh-Aruk	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas negara, Pertahanan dan keamanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Jagoibabang	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Pertahanan dan keamanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Nanga Badau	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Pertahanan dan keamanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Jasa	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Pertahanan dan keamanan
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	PKN	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kuala Kapuas	PKW	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Buntok	PKW	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Muara Teweh	PKW	Perkebunan, Pertanian, Pertambangan, Kehutanan
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Sampit	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	PKN	Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Amuntai	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Pertanian
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Martapura	PKW	Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Marabahan	PKW	Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kotabaru	PKW	Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang	PKN	Industri, Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tarakan	PKN	Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanjung Redeb	PKW	Industri, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Timur	Sangata	PKW	Industri, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan, Perkebunan

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Kalimantan	Kalimantan Timur	Nunukan	PKW/ PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas negara, Pertahanan dan keamanan, Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanjung Selor	PKW	Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Malinau	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanlumbis	PKW	Kehutanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanah Grogot	PKW	Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Timur	Sendawar	PKW	Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Timur	Simanggaris	PKSN	Perkebunan, Pertahanan dan keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Long Midang	PKSN	Perkebunan, Pertahanan dan keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Long Pahangai	PKSN	Perkebunan, Pertahanan dan keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Long Nawan	PKSN	Pariwisata, Pertahanan dan keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri
Sulawesi	Gorontalo	Gorontalo	PKN	Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata, Permukiman, Pendidikan, Perdagangan dan jasa
Sulawesi	Gorontalo	Isimu	PKW	Agroindustri, Pertanian
Sulawesi	Gorontalo	Kuandang	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan
Sulawesi	Gorontalo	Tilamuta	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Utara	Manado-Bitung	PKN	Perdagangan dan jasa, Industri, Perikanan, Pariwisata, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Utara	Tomohon	PKW	Agroindustri, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Utara	Tondano	PKW	Agroindustri, Pertanian, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Utara	Kotamobagu	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Utara	Melonguane	PKSN	Pertahanan dan keamanan, Industri, Perdagangan dan jasa, Perikanan, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Utara	Tahuna	PKSN	Pertahanan dan keamanan, Industri, Perikanan, Perkebunan

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
1	2	3	4	5
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Palu	PKN	Perdagangan dan jasa, Industri, Perkebunan, Kelautan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Poso	PKW	Agroindustri, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Luwuk	PKW	Pariwisata, Industri, Pengolahan migas, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Buol	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perkebunan, Perikanan tangkap
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Kolonedale	PKW	Industri, Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Toli-toli	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Donggala	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata)	PKN	Perdagangan dan jasa, Industri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Pangkajene	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Jeneponto	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Palopo	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Watampone	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Bulukumba	PKW	Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Barru	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Barat	Mamuju	PKW	Perdagangan dan jasa, Industri, Pariwisata, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Barat	Majene	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Barat	Pasangkayu	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Kendari	PKN	Perdagangan dan jasa, Pariwisata, Industri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Unaaha	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Lasolo	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	PKW	Pariwisata, Pertambangan, Industri
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Raha	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Kolaka	PKW	Industri, Perkebunan, Pertambangan

Sumber: Lampiran III Perpres RI No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
 Lampiran III Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
 Lampiran III Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
 Lampiran III Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi

Catatan: PKN = Pusat Kegiatan Nasional
 PKW = Pusat Kegiatan Wilayah
 PKSN = Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Salah satu unsur pembentuk fungsi ruang dalam penataan ruang kita adalah adanya kawasan lindung. **Kawasan lindung** merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budi daya mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan. Penurunan fungsi kawasan lindung dapat mengancam keberadaan kawasan-kawasan di bawahnya. Dalam Tabel 6.4. disajikan daftar kawasan lindung di Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Tabel 6.4. Kawasan Lindung Nasional

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Aceh	Suaka Margasatwa Rawa Singkil	I/B/2
Aceh	Cagar Alam Hutan Pinus Jhanto	I/B/3
Aceh	Taman Nasional Gunung Leuser	I/A/4
Aceh	Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien (Pocut Meurah Intan)	II/B/5
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh	I/A/6
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak	II/A/6
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha (Pisipi)	I/A/6
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Sabang	I/B/6
Aceh	Taman Buru Lingga Isaq	I/F
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Karang Gading & Langkat Timur Laut	II/B/2
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Barumun	I/B/2
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Siranggas	II/B/2
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Dolok Surungan	II/B/2
Sumatera Utara	Cagar Alam Dolok Sibual-buali	II/A/3
Sumatera Utara	Cagar Alam Dolok Sipirok	I/A/3
Sumatera Utara	Cagar Alam Lubuk Raya	II/B/3
Sumatera Utara	Cagar Alam Sei Ledong	II/B/3
Sumatera Utara	Taman Nasional Gunung Leuser	I/A/4
Sumatera Utara	Taman Nasional Batang Gadis	II/A/4
Sumatera Utara	Taman Hutan Raya Bukit Barisan	I/B/5
Sumatera Utara	Taman Wisata Alam Holiday Resort	I/B/6
Sumatera Utara	Taman Buru Pulau Pini	I/F
Sumatera Barat	Suaka Margasatwa Pagai Selatan	II/B/2
Sumatera Barat	Cagar Alam Rimbo Panti Reg. 75	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Lembah Anai	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Batang Pangean I	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Batang Pangean II Reg. 49	III/B/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Sumatera Barat	Cagar Alam Arau Hilir	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Melampah Alahan Panjang	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Gunung Sago	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Maninjau Utara Dan Selatan	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Gunung Merapi	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Air Putih	III/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Barisan I	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Air Terusan	II/B/3
Sumatera Barat	Taman Nasional Siberut	II/A/4
Sumatera Barat	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
Sumatera Barat	Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta	II/B/5
Sumatera Barat	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Pieh	II/B/6
Riau	Suaka Margasatwa Kerumutan	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah	I/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling	III/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Balai Raja	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Metas	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Belat	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Bukit Batu	II/B/2
Riau	Cagar Alam Bukit Bungkuk	I/B/3
Riau	Taman Nasional Teso Nilo	I/A/4
Riau	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	I/A/4
Riau	Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Minas)	II/B/5
Riau	Taman Wisata Alam Sungai Dumai	I/A/6
Jambi	Cagar Alam Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur	I/A/3
Jambi	Cagar Alam Cempaka	II/B/3
Jambi	Cagar Alam Sungai Batara	III/B/3
Jambi	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	I/A/4
Jambi	Taman Nasional Bukit Dua Belas	I/A/4
Jambi	Taman Nasional Berbak	I/A/4
Jambi	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
Jambi	Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin	II/B/5
Jambi	Taman Wisata Alam Sungai Bengkal	II/B/6
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Gumai Pasemah	II/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Gunung Raya	I/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah	II/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Bentayan	I/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Dangku	II/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Padang Sugihan	II/B/2
Sumatera Selatan	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Sumatera Selatan	Taman Nasional Sembilang	II/A/4
Bengkulu	Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61	III/B/3
Bengkulu	Cagar Alam Air Ketebat Danau Tes Reg. 57	II/B/3
Bengkulu	Cagar Alam Teluk Klowe Reg. 96	III/B/3
Bengkulu	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
Bengkulu	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	I/A/4
Bengkulu	Taman Hutan Raya Raja Lelo	II/B/5
Bengkulu	Taman Wisata Alam Bukit Kaba	II/B/6
Bengkulu	Taman Wisata Alam Pantai Panjang - Pulau Baai	I/B/6
Bengkulu	Taman Wisata Alam Laut Enggano	II/B/6
Bengkulu	Taman Buru Semidang Bukit Kabu	II/F
Bengkulu	Taman Buru Gunung Nanu'ua	II/F
Lampung	Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau	I/A/3
Lampung	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	I/A/4
Lampung	Taman Nasional Way Kambas	I/A/4
Lampung	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	I/B/5
Lampung	Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat	I/B/6
Bangka Belitung	Cagar Alam G. Lalang, G. Menumbing, G. Maras, G. Mangkol, G. Permisan, Jening Mendayung	I/B/3
Bangka Belitung	Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung	II/B/6
Kepulauan Riau	Taman Nasional Laut Anambas	II/B/4
Kepulauan Riau	Taman Wisata Alam Muka Kuning (Batam)	I/B/6
DKI Jakarta	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	I/A/4
Jawa Barat	Suaka Margasatwa Cikepuh	II/B/2
Jawa Barat	Suaka Margasatwa Gunung Sawal	II/B/2
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu	I/A/3
Jawa Barat	Cagar Alam Leuweung Sancang	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Tilu	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Papandayan	I/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Burangrang	I/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Kawah Kamojang	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Simpang	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Laut Leuweung Sancang	II/B/3
Jawa Barat	Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango	I/A/4
Jawa Barat	Taman Nasional Halimun - Salak	I/A/4
Jawa Barat	Taman Nasional Gunung Ciremai	I/A/4
Jawa Barat	Taman Wisata Alam Gunung Tampomas	I/B/6
Jawa Barat	Taman Wisata Alam Laut Cijulang	I/A/6
Jawa Barat	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	II/F
Jawa Tengah	Cagar Alam Gunung Celering	I/B/3
Jawa Tengah	Cagar Alam Geologi Karangsembung	II/B/3
Jawa Tengah	Taman Nasional Gunung Merapi	I/A/4
Jawa Tengah	Taman Nasional Gunung Merbabu	I/A/4
Jawa Tengah	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	I/B/4
Jawa Tengah	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban	I/B/6

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
DI Yogyakarta	Taman Nasional Gunung Merapi	I/A/4
Jawa Timur	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang	I/B/2
Jawa Timur	Suaka Margasatwa Pulau Bawean	I/B/2
Jawa Timur	Cagar Alam Pulau Nusa Barong	II/B/3
Jawa Timur	Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup	II/B/3
Jawa Timur	Taman Nasional Alas Purwo	I/A/4
Jawa Timur	Taman Nasional Baluran	II/A/4
Jawa Timur	Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru	I/A/4
Jawa Timur	Taman Nasional Meru Betiri	I/A/4
Jawa Timur	Taman Hutan Raya R. Suryo	I/B/5
Banten	Cagar Alam Rawa Danau	II/B/3
Banten	Cagar Alam Gunung Tukung Gede	I/B/3
Banten	Taman Nasional Halimun - Salak	I/A/4
Banten	Taman Nasional Ujung Kulon	I/A/4
Banten	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	I/A/6
Bali	Cagar Alam Batukahu I/II/III	I/B/3
Bali	Taman Nasional Bali Barat	I/A/4
Bali	Taman Hutan Raya Ngurah Rai	I/B/5
Bali	Taman Wisata Alam Sangeh	I/B/6
Bali	Taman Wisata Alam Danau Buyan Dan Danau Tamblingan	I/B/6
Bali	Taman Wisata Alam Laut Buleleng	I/A/6
Nusa Tenggara Barat	Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan	I/B/2
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Toffo Kota Lambu	II/A/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Pulau Sangiang	I/A/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Gunung Tambora Selatan	I/B/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Pulau Panjang	II/B/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Jereweh (Sekongkang)	II/B/3
Nusa Tenggara Barat	Taman Nasional Gunung Rinjani	I/A/4
Nusa Tenggara Barat	Taman Hutan Raya Nurasaka	I/A/5
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Bangko Bangko	II/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Tanjung Tanpa	II/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang	II/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Gili Meno, Gili Ayer, Gili Trawangan	I/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo	I/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda	II/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Gilin Sulat dan Gili Lawang	II/A/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta	II/A/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Buru Gunung Tambora Selatan	I/F
Nusa Tenggara Barat	Taman Buru Pulau Moyo	I/F
Nusa Tenggara Timur	Suaka Alam Laut Sawu	I/B/1
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Perhatu	III/B/2
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Kateri	III/B/2
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Harlu	III/B/2
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Ale Asisio	II/B/2

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Riung	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Maubesi (RTK. 189)	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Way Wuul/ Mburak	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Watu Ata	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Wolo Tadhó	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Tambora	I/A/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Gunung Mutis	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Kelimutu	I/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti	II/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Manupeu - Tanah Daru	II/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Komodo	I/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Laut Komodo	I/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Laut Selat Pantar	II/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes	I/A/5
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Tuti Adagae	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Kemang Beleng	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Pulau Besar	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Pulau Menipo	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Ruteng	I/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Egon Illimedo	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang	I/A/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	I/A/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung	III/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Buru Dataran Bena	II/F
Nusa Tenggara Timur	Taman Buru Pulau Rusa	I/F
Nusa Tenggara Timur	Taman Buru Pulau Ndana	II/F
Kalimantan Barat	Suaka Alam Laut Sambas	I/B/1
Kalimantan Barat	Cagar Alam Mandor	II/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Gunung Raya Pasi	I/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Muara Kendawangan	II/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Niyut-Penrissen	I/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata	I/B/3
Kalimantan Barat	Taman Nasional Betung Kerihun	I/A/4
Kalimantan Barat	Taman Nasional Danau Sentarum	I/A/4
Kalimantan Barat	Taman Nasional Gunung Palung	II/A/4
Kalimantan Barat	Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya	I/A/4
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Belimbing	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Asuansang	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Dungan	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Gunung Melintang	I/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang	II/B/6
Kalimantan Tengah	Suaka Margasatwa Lamandau	I/B/2
Kalimantan Tengah	Cagar Alam Bukit Sapat Hawung	II/B/3
Kalimantan Tengah	Cagar Alam Bukit Tangkiling	II/B/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Kalimantan Tengah	Cagar Alam Pararawen I/II	I/B/3
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya	I/A/4
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Tanjung Puting	I/A/4
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Sebangau	I/A/4
Kalimantan Tengah	Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/ Teluk Keluang	II/B/6
Kalimantan Selatan	Suaka Margasatwa Pleihari Martapura	I/B/2
Kalimantan Selatan	Suaka Margasatwa Kuala Lupak	II/B/2
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku	I/B/3
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Teluk Pamukan	II/B/3
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Sungai Lulan Dan Sungai Bulan	I/B/3
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Teluk Pamukan	I/B/3
Kalimantan Selatan	Taman Hutan Raya Sultan Adam	II/B/5
Kalimantan Selatan	Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut	II/B/6
Kalimantan Selatan	Taman Wisata Alam Laut P. Laut Barat-Selatan & P. Sembilan	II/B/6
Kalimantan Timur	Suaka Alam Laut Pulau Sebatik	I/B/1
Kalimantan Timur	Cagar Alam Muara Kaman Sedulang	II/B/3
Kalimantan Timur	Cagar Alam Padang Luwai	II/B/3
Kalimantan Timur	Cagar Alam Teluk Apar	I/B/3
Kalimantan Timur	Cagar Alam Teluk Adang	I/B/3
Kalimantan Timur	Taman Nasional Kayan Mentarang	I/A/4
Kalimantan Timur	Taman Nasional Kutai	I/A/4
Kalimantan Timur	Taman Hutan Raya Bukit Suharto	I/B/6
Kalimantan Timur	Taman Wisata Alam Laut Berau	II/B/6
Sulawesi Utara	Suaka Alam Laut Sidat	II/B/1
Sulawesi Utara	Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung	I/B/1
Sulawesi Utara	Suaka Margasatwa Gunung Manembo-nembo	II/B/2
Sulawesi Utara	Suaka Margasatwa Karakelang Utara-Selatan	I/B/2
Sulawesi Utara	Cagar Alam Gunung Ambang	I/B/3
Sulawesi Utara	Cagar Alam Dua Saudara	II/B/3
Sulawesi Utara	Cagar Alam Tangkoko Batu Angus	II/B/3
Sulawesi Utara	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	I/A/4
Sulawesi Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	I/A/4
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Tanjung Santigi	I/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Pati Pati	II/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Lombuyan I/II	II/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Bangkiriang	II/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Pinjan/ Tanjung Matop	II/B/2
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Morowali	I/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Pangi Binangga	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Pamona	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Gunung Tinombala	I/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Gunung Sojol	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Gunung Dako	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Tanjung Api	II/B/3
Sulawesi Tengah	Taman Nasional Lore Lindu	I/A/4

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Sulawesi Tengah	Taman Nasional Laiut Kepulauan Banggai	II/B/4
Sulawesi Tengah	Taman Hutan Raya Poboya Paneki (Palu)	III/B/5
Sulawesi Tengah	Taman Wisata Alam Bancea	II/B/6
Sulawesi Tengah	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan P. Batudaka	I/A/6
Sulawesi Tengah	Taman Buru Landusa Tomata	II/F
Sulawesi Selatan	Suaka Margasatwa Komara	II/B/2
Sulawesi Selatan	Cagar Alam Faruhumpenai	II/B/3
Sulawesi Selatan	Cagar Alam Kalaena	II/B/3
Sulawesi Selatan	Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung	II/A/4
Sulawesi Selatan	Taman Nasional Laut Taka Bonerate	I/A/4
Sulawesi Selatan	Taman Hutan Raya Bontobahari	II/B/5
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Danau Matano	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Danau Mahalona	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Danau Towuti	I/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Malino	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Cani Sirenrang	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Lejja	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang	I/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Buru Komara	II/F
Sulawesi Selatan	Taman Buru Bangkala	II/F
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Buton Utara	II/B/2
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo	II/B/2
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Tanjung Peropa	II/B/2
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Lambusango	III/B/2
Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai	I/A/4
Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi	I/A/4
Sulawesi Tenggara	Taman Hutan Raya Murhum	II/B/5
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Mangolo	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Telok Lasolo	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi (Buton)	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Buru Padang Mata Osu	III/F
Gorontalo	Suaka Margasatwa Nantu	II/B/2
Gorontalo	Cagar Alam Panua	II/B/3
Gorontalo	Cagar Alam Tanjung Panjang	II/B/3
Gorontalo	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	I/A/4
Sulawesi Barat	Suaka Margasatwa Mampie Lampoko	II/B/2
Maluku	Suaka Margasatwa Pulau Baun	II/B/2
Maluku	Suaka Margasatwa Pulau Kobror	I/B/2
Maluku	Suaka Margasatwa Tanimbar	I/B/2
Maluku	Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa	III/B/2
Maluku	Cagar Alam Pulau Nustaram	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Pulau Nuswotar	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Masbait	II/B/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Maluku	Cagar Alam Daab	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Pulau Larat	I/B/3
Maluku	Cagar Alam Bekau Huhun	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Tafermaar	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Gunung Sahuwai	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Masarete	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Tanjung Sial	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara	I/B/3
Maluku	Cagar Alam Laut Banda	I/B/3
Maluku	Taman Nasional Manusela	I/A/4
Maluku	Taman Wisata Alam Laut Laut Banda	I/B/6
Maluku	Taman Wisata Laut Pulau Kasa	II/B/6
Maluku	Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	II/B/6
Maluku	Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	II/B/6
Maluku Utara	Cagar Alam Tobalai	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Pulau Seho	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Gunung Sibela	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Lifamatola	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Pulau Obi	I/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Taliabu	II/B/3
Maluku Utara	Taman Nasional Aketajawe - Lolobata	I/A/4
Papua Barat	Suaka Alam Laut Kaimana	II/B/1
Papua Barat	Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani - Sidei - Wibain I - II	I/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Pulau Venu	II/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat	I/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	II/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Panjang	II/B/2
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Waigeo Barat	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Batanta Barat	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Arfak	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Salawati Utara	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Biak Utara	I/A/3
Papua Barat	Cagar Alam Tamrau Selatan	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Supriori	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Wondiboy	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Waigeo Timur	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Misool	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Kofiau	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Laut Pantai Sausapor	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Teluk Bintuni	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Fak Fak	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Kumawa	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Tamrau Utara	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Tanjung Wiay	II/B/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Papua Barat	Cagar Alam Wagura Kote	II/B/3
Papua Barat	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	I/A/4
Papua Barat	Taman Wisata Alam Beriat	III/B/6
Papua Barat	Taman Wisata Alam Klamono	III/B/6
Papua Barat	Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun, Sorong	II/B/6
Papua Barat	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido	II/B/6
Papua	Suaka Margasatwa Pulau Dolok	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Jayawijaya	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Danau Bian	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Anggromeos	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Komolon	II/B/2
Papua	Cagar Alam Cycloops	II/B/3
Papua	Cagar Alam Enarotali	II/B/3
Papua	Cagar Alam Bupul/ Kumbe	II/B/3
Papua	Cagar Alam Pegunungan Wayland	II/B/3
Papua	Taman Nasional Lorentz	I/A/4
Papua	Taman Nasional Wasur	I/A/4
Papua	Taman Wisata Alam Teluk Youtefa	II/B/6

Sumber: Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008

Keterangan:

I - IV : Tahapan

Pengembangan

- A : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional
 A/1 : Suaka Alam Laut
 A/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
 A/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
 A/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
 A/5 : Taman Hutan Raya
 A/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
 B : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional
 B/1 : Suaka Alam Laut
 B/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
 B/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
 B/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
 B/5 : Taman Hutan Raya
 B/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
 C : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional
 C/1 : Kawasan Resapan Air
 D : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional
 E : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional
 F : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 bahwa **kawasan andalan** merupakan bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Penetapan kawasan andalan didasarkan pada sektor unggulan yang dimiliki wilayah tersebut. Pengembangan kawasan andalan

diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Dalam Tabel 6.5 di bawah ini adalah kawasan andalan di Indonesia yang telah ditetapkan.

Tabel 6.5. Kawasan Andalan di Indonesia

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3
Aceh	Banda Aceh dan Sekitarnya	pertanian, pariwisata, industri, perikanan laut
Aceh	Lhokseumawe dan Sekitarnya	industri, pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan
Aceh	Pantai Barat Selatan	pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan
Aceh	Laut Lhokseumawe-Medan & Sekitarnya	perikanan, pertambangan
Sumatera Utara	Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan
Sumatera Utara	Pematang Siantar dan Sekitarnya	perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
Sumatera Utara	Rantau Prapat-Kisaran	perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, industri
Sumatera Utara	Tapanuli dan Sekitarnya	perkebunan, pertambangan, perikanan laut, pertanian, industri, pariwisata
Sumatera Utara	Nias dan Sekitarnya	pariwisata, perkebunan, perikanan
Sumatera Utara	Laut Lhokseumawe-Medan & Sekitarnya	perikanan, pertambangan
Sumatera Utara	Laut Selat Malaka dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan
Sumatera Utara	Laut Nias dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan
Sumatera Barat	Padang Pariaman dan Sekitarnya	industri, perikanan laut, pertanian, pariwisata, perikanan
Sumatera Barat	Agam-Bukit Tinggi (PLTA Kuto Panjang)	perkebunan, pariwisata, pertanian
Sumatera Barat	Mentawai dan Sekitarnya	pertanian, perikanan
Sumatera Barat	Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Di Atas/ Di Bawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping)	pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, industri
Sumatera Barat	Laut Mentawai, Siberut dan Sekitarnya	perikanan laut, pariwisata
Riau	Pekanbaru dan Sekitarnya	industri, perkebunan, pertanian, pertambangan
Riau	Duri-Dumai dan Sekitarnya	industri, perkebunan, perikanan
Riau	Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci	perkebunan, pertanian, industri, kehutanan
Riau	Ujung Batu-Bagan Batu	industri migas, perkebunan
Riau	Laut Selat Malaka dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3
Kepulauan Riau	Zona Batam-Tanjung Pinang & Sekitarnya	kelautan, pariwisata, industri, perikanan
Kepulauan Riau	Natuna dan Sekitarnya	pertambangan, perikanan laut
Kepulauan Riau	Laut Batam dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Kepulauan Riau	Laut Natuna dan Sekitarnya	perikanan laut, pertambangan, pariwisata
Jambi	Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya	perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, pariwisata
Jambi	Muara Bungo dan Sekitarnya	perkebunan, pertanian, kehutanan
Sumatera Selatan	Muara Enim dan Sekitarnya	pertanian, pertambangan, perkebunan
Sumatera Selatan	Lubuk Linggau dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan, industri
Sumatera Selatan	Palembang dan Sekitarnya	pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perikanan
Sumatera Selatan	Laut Bangka dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Bengkulu	Bengkulu dan Sekitarnya	pertanian, industri, perkebunan, perikanan, pariwisata
Bengkulu	Manna dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata
Bengkulu	Laut Bengkulu	perikanan, pariwisata
Bangka Belitung	Bangka	pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perikanan
Bangka Belitung	Belitung	pertanian, perkebunan, industri, pariwisata
Bangka Belitung	Laut Bangka dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Lampung	Bandar Lampung-Metro	perkebunan, pariwisata, industri, pertanian, perikanan
Lampung	Mesuji dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan, industri
Lampung	Kotabumi dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan, perikanan
Lampung	Liwa-Krui	pertanian, perkebunan, perikanan laut
Lampung	Laut Krakatau dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
DKI Jakarta	Perkotaan Jakarta	industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, jasa
DKI Jakarta	Laut Pulau Seribu	perikanan, pertambangan, pariwisata
Banten	Bojonegara-Merak-Cilegon	industri, pariwisata, pertanian, perikanan, pertambangan
Banten	Laut Krakatau dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Jawa Barat	Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya)	pertanian, pariwisata, industri, perikanan
Jawa Barat	Sukabumi dan Sekitarnya	perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan
Jawa Barat	Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka)	pertanian, industri, pariwisata, perikanan
Jawa Barat	Cekungan Bandung	industri, pertanian, pariwisata, perkebunan
Jawa Barat	Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya	pertanian, industri, perikanan, pertambangan
Jawa Barat	Priangan Timur-Pangandaran	pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, perikanan

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3
Jawa Tengah	Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosuko-Wonosraten)	industri, pariwisata, pertanian
Jawa Tengah	Kedung Sepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi)	pertanian, industri, pariwisata, perikanan
Jawa Tengah	Bregas	pertanian, kehutanan, industri, perikanan
Jawa Tengah	Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti)	pertanian, industri, pertambangan, perikanan
Jawa Tengah	Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya)	pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan
Jawa Tengah	Borobudur dan Sekitarnya	pariwisata
Jawa Tengah	Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Jawa Tengah	Laut Cilacap dan Sekitarnya	perikanan laut, pertambangan, pariwisata
DI Yogyakarta	Yogyakarta dan Sekitarnya	pariwisata, pertanian, industri, perikanan
Jawa Timur	Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila)	pertanian, perikanan, industri, pariwisata
Jawa Timur	Malang dan Sekitarnya	pertanian, perikanan, industri, perkebunan, pariwisata
Jawa Timur	Probolinggo-Pasuruan-Lumajang	pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, perikanan
Jawa Timur	Tuban-Bojonegoro	pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan
Jawa Timur	Kediri-Tulung Agung-Bitar	pertanian, perkebunan, industri, perikanan, pariwisata
Jawa Timur	Situbondo-Bondowoso-Jember	perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut
Jawa Timur	Madiun dan Sekitarnya	pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pariwisata
Jawa Timur	Banyuwangi dan Sekitarnya	perikanan, pertanian
Jawa Timur	Madura dan Kepulauan	pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perikanan
Jawa Timur	Laut Madura dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Bali	Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara)	pariwisata, pertanian, perikanan
Bali	Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan)	pariwisata, pertanian, industri, perikanan
Bali	Laut Bali dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
NTB	Lombok dan Sekitarnya	pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan
NTB	Bima	pertanian, industri, pariwisata, perikanan
NTB	Sumbawa dan Sekitarnya	pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, perikanan
NTB	Laut Selat Lombok dan Sekitarnya	perikanan laut, pariwisata

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3
NTT	Kupang dan Sekitarnya	pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut, pertambangan
NTT	Maumere-Ende	kehutanan, pariwisata, industri, perikanan, pertanian, perkebunan
NTT	Komodo dan Sekitarnya	pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, perikanan
NTT	Ruteng-Bajawa	perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pertanian
NTT	Sumba	pertanian, pariwisata, perkebunan
NTT	Laut Flores	perikanan, pariwisata
NTT	Laut Sawu dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
NTT	Laut Sumba dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Kalimantan Barat	Pontianak dan Sekitarnya	pertanian, industri, perikanan, pariwisata
Kalimantan Barat	Singkawang dan Sekitarnya	pertanian, industri, perkebunan, perikanan
Kalimantan Barat	Ketapang dan Sekitarnya	pertanian, industri, perkebunan, perikanan, kehutanan
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu dan Sekitarnya	pertanian, kehutanan, perkebunan
Kalimantan Barat	Sanggau	pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan
Kalimantan Barat	Laut Pontianak dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Kalimantan Barat	Laut Ketapang dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Kalimantan Tengah	Sampit - Pangkalan Bun	pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata
Kalimantan Tengah	Buntok	pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata
Kalimantan Tengah	Muarateweh	pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan
Kalimantan Tengah	Kuala Kapuas	pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
Kalimantan Tengah	Laut Kuala Pembuang	perikanan, pertambangan, pariwisata
Kalimantan Selatan	Kandangan dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan, pariwisata
Kalimantan Selatan	Banjarmasin Raya dan Sekitarnya	pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, perikanan
Kalimantan Selatan	Batulicin	perkebunan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, perikanan
Kalimantan Selatan	Laut Pulau Laut	perikanan, pertambangan
Kalimantan Timur	Tanjung Redeb dan Sekitarnya	industri, kehutanan, pertambangan, pariwisata, perikanan
Kalimantan Timur	Sangkuriang, Sangata, & Muara Wahau (Sasamawa)	industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, pariwisata
Kalimantan Timur	Tarakan, Tanjung Salas, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau (Tatapanbuma) dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3
Kalimantan Timur	Bontang-Samarinda-Tenggarong, Balikpapan Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam)	industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, pariwisata
Kalimantan Timur	Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Gorontalo	Gorontalo	pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan
Gorontalo	Marisa	pertanian, perkebunan, perikanan
Gorontalo	Laut Tomini dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Sulawesi Utara	Manado dan Sekitarnya	perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan
Sulawesi Utara	Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow)	pertanian, perkebunan, perikanan
Sulawesi Utara	Laut Bunaken dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Sulawesi Utara	Laut Batutoli dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Sulawesi Tengah	Poso dan Sekitarnya	pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, industri
Sulawesi Tengah	Toli-Toli dan Sekitarnya	pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata
Sulawesi Tengah	Kolonedale dan Sekitarnya	pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, agroindustri, pertambangan
Sulawesi Tengah	Palu dan Sekitarnya	pertambangan, perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata
Sulawesi Tengah	Laut Teluk Tolo Kepulauan Banggai dan Sekitarnya	perikanan, pariwisata
Sulawesi Selatan	Mamminasata dan Sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, Takalar)	pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, perikanan
Sulawesi Selatan	Palopo dan Sekitarnya	pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan
Sulawesi Selatan	Bulukumba-Watampone	pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, perdagangan
Sulawesi Selatan	Pare-Pare dan Sekitarnya	agroindustri, pertanian, perikanan, perkebunan
Sulawesi Selatan	Laut Kapoposang dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Sulawesi Selatan	Laut Teluk Bone dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Sulawesi Selatan	Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Sulawesi Selatan	Laut Selat Makassar	perikanan, pariwisata
Sulawesi Barat	Mamuju dan Sekitarnya	perkebunan, pertanian, kehutanan, agroindustri, perikanan
Sulawesi Tenggara	Asesolo/ Kendari	agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
Sulawesi Tenggara	Kapolimu-Patikala Muna-Buton	agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pariwisata
Sulawesi Tenggara	Mowedong/ Kolaka	agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian
Sulawesi Tenggara	Laut Asera Lasolo	perikanan, pariwisata

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3
Sulawesi Tenggara	Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Sulawesi Tenggara	Luat Tiworo dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Maluku	Seram	pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata
Maluku	Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar	perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri
Maluku	Buru	perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata
Maluku	Laut Banda dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Maluku	Laut Arafuru dan Sekitarnya	perikanan laut, pertambangan, pariwisata
Maluku Utara	Ternate, Tidore, Sidangoli, Sofifi, Weda dan Sekitarnya	perkebunan, perikanan laut, industri, pertambangan, pariwisata
Maluku Utara	Bacan-Halmahera Selatan	perkebunan, pertanian
Maluku Utara	Kepulauan Sula	perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan, perikanan
Maluku Utara	Laut Halmahera dan Sekitarnya	perikanan laut, pertambangan, pariwisata
Papua Barat	Bintuni	pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan
Papua Barat	Fak-Fak (Bomberai) dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan
Papua Barat	Sorong dan Sekitarnya	kehutanan, pertambangan, perikanan laut, industri
Papua Barat	Laut Raja Ampat Bintuni	perikanan, pertambangan, pariwisata
Papua	Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya	pertambangan, kehutanan, industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan
Papua	Biak	pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan
Papua	Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare)	pertanian, perkebunan, pertambangan
Papua	Merauke dan Sekitarnya	industri, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertanian
Papua	Memberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya	industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan
Papua	Wamena dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan
Papua	Laut Teluk Cendrawasih - Biak dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata
Papua	Laut Jayapura - Sarmi	perikanan, pariwisata

Sumber: Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Tabel 6.6. Kawasan Strategis Nasional

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Aceh	Industri Lhokseumawe	I/A/2
Aceh	Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	I/A/2
Aceh	Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam	I/A/2
Aceh	Ekosistem Leuser	I/B/1
Aceh	Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia	I/E/2
Aceh	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Sumatera Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia	I/E/2
Sumatera Utara	Perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (Mebidangro)	I/A/1
Sumatera Utara	Danau Toba dan Sekitarnya	I/B/1
Sumatera Utara	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Sumatera Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang	I/D/2
Sumatera Barat	Hutan Lindung Bukit Batabuh	I/B/1
Sumatera Barat	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Sumatera Barat	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Riau	Hutan Lindung Bukit Batabuh	I/B/1
Riau	Hutan Lindung Mahato	I/B/1
Riau	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura	I/D/2
Riau	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	I/B/1
Kepulauan Riau	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura	I/D/2
Kepulauan Riau	Batam, Bintan, Karimun	I/A/2
Jambi	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Jambi	Taman Nasional Berbak	I/B/1
Jambi	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	I/B/1

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Jambi	Taman Nasional Bukit Duabelas	I/B/1
Sumatera Selatan	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Bengkulu	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Bengkulu	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Lampung	Selat Sunda	III/A/2
Lampung	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
DKI Jakarta	Instalasi Lingkungan dan Cuaca	I/D/2
DKI Jakarta	Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit	I/D/2
DKI Jakarta	Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
Banten	Selat Sunda	III/A/2
Banten	Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
Banten	Taman Nasional Ujung Kulon	I/B/1
Banten	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Jawa Barat	Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
Jawa Barat	Perkotaan Cekungan Bandung	I/A/1
Jawa Barat	Fasilitas Uji Terbang Roket Pamengpeuk	I/D/1
Jawa Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk	I/D/2
Jawa Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari	I/D/2
Jawa Barat	Stasiun <i>Telecomand</i>	I/D/2
Jawa Barat	Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro	I/D/2
Jawa Barat	Pangandaran - Kalipuncang - Segara Anakan - Nusakambangan (Pacangsanak)	I/B/1
Jawa Barat	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Jawa Tengah	Pangandaran - Kalipuncang - Segara Anakan - Nusakambangan (Pacangsanak)	I/B/1
Jawa Tengah	Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur)	I/A/1
Jawa Tengah	Borobudur dan Sekitarnya	I/B/2
Jawa Tengah	Candi Prambanan	I/B/2
Jawa Tengah	Taman Nasional Gunung Merapi	I/B/1

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Jawa Tengah	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
DI Yogyakarta	Taman Nasional Gunung Merapi	I/B/1
Jawa Timur	Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosisila)	I/A/1
Jawa Timur	Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek	I/D/2
Jawa Timur	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Bali	Perkotaan Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita)	I/A/1
NTB	Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima	I/A/2
NTB	Taman Nasional Komodo	I/B/1
NTB	Gunung Rinjani	I/B/1
NTB	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
NTT	Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay	I/A/2
NTT	Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste	I/E/2
NTT	Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan negara Timor Leste/ Australia	I/E/2
Kalimantan Barat	Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa	I/A/2
Kalimantan Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak	I/D/2
Kalimantan Barat	Taman Nasional Betung Kerihun	I/B/1
Kalimantan Barat	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	I/E/2
Kalimantan Tengah	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	I/E/2
Kalimantan Tengah	Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito	I/A/2
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Tanjung Puting	I/B/1
Kalimantan Selatan	Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin	I/A/2
Kalimantan Timur	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	I/E/2
Kalimantan Timur	Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	I/A/2
Kalimantan Timur	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Sulawesi Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2
Sulawesi Utara	Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung	I/A/2
Sulawesi Utara	Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano	I/B/1
Sulawesi Tengah	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2
Sulawesi Tengah	Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui	I/A/2
Sulawesi Tengah	Poso dan Sekitarnya	I/C/1
Sulawesi Tengah	Kritis Lingkungan Balingara	I/B/1
Sulawesi Tengah	Kritis Lingkungan Buol-Lambunu	I/B/1
Sulawesi Selatan	Perkotaan Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	I/A/1
Sulawesi Selatan	Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare	I/A/2
Sulawesi Selatan	Toraja dan Sekitarnya	I/C/1
Sulawesi Selatan	Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare	I/D/2
Sulawesi Selatan	Soroako dan Sekitarnya	I/D/2
Sulawesi Tenggara	Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan kendari	I/A/2
Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo	I/B/1
Maluku	Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram	I/A/2
Maluku	Laut Banda	I/D/1
Maluku	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan negara Timor Leste/Australia	I/E/2
Maluku Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2
Papua Barat	Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	I/B/1
Papua Barat	Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2
Papua	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan negara Timor Leste/Australia	I/E/2
Papua	Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2
Papua	Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak	I/A/2
Papua	Stasiun Bumi Satelit Cuaca dan Lingkungan	I/D/2

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
1	2	3
Papua	Stasiun <i>Telemetry Tracking and Command</i> Wahana Peluncur Satelit	I/D/2
Papua	Timika	I/D/2
Papua	Taman Nasional Lorentz	I/B/1
Papua	Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	I/B/1
Papua	Perbatasan Darat RI dengan negara Papua Nugini	I/E/2

Sumber: Lampiran X Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008

Keterangan:

I - IV : Tahapan Pengembangan

- A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
 - A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
 - B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - B/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya
 - C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - C/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi
 - D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - D/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
 - E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - E/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

BAB VII

STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN ISU GENDER

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur pekerjaan umum, SDM menjadi salah satu faktor penentu karena berperan sebagai perencana, penyusun, pelaksana, hingga pemantau serta pengawas, walaupun dalam pelaksanaan tentunya juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDM di Kementerian PU perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Dari sisi jumlah, pegawai di Kementerian PU dari Tahun 2008 hingga 2011 mengalami peningkatan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penerimaan pegawai secara *online* yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai baru. Namun pada Tahun 2012, penerimaan pegawai baru dihentikan sementara waktu karena mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oleh karena, itu jumlah pegawai di Tahun 2012 dan 2013 tidak terjadi peningkatan.

Pada Tahun 2013, tercatat pegawai di Kementerian PU berjumlah 21.162 orang, baik yang bertugas di kantor pusat maupun balai serta satuan kerja di daerah. Jumlah tersebut terdiri dari 15.722 laki-laki dan 5.440 perempuan seperti terlihat pada Tabel 7.1 dan Gambar 7.1 berikut :

Tabel 7.1. Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2011 – 2013

Unit Organisasi	2011			2012			2013		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	1.004	452	1.456	925	441	1.366	926	427	1.353
Inspektorat Jenderal	152	100	252	140	100	240	128	101	229
Ditjen Penataan Ruang	376	242	618	356	233	589	347	234	581
Ditjen Sumber Daya Air	6.451	1.558	8.009	6.286	1.614	7.900	6.200	1.619	7.819
Ditjen Bina Marga	5.702	1.756	7.458	5.607	1.762	7.369	5.620	1.752	7.372
Ditjen Cipta Karya	1.583	799	2.382	1.506	821	2.327	1.428	803	2.231
BP Konstruksi	340	152	492	293	151	444	259	146	405
Balitbang	927	380	1.307	853	368	1.221	814	358	1.172
Kementerian PU	16.535	5.439	21.974	15.966	5.490	21.456	15.722	5.440	21.162

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki

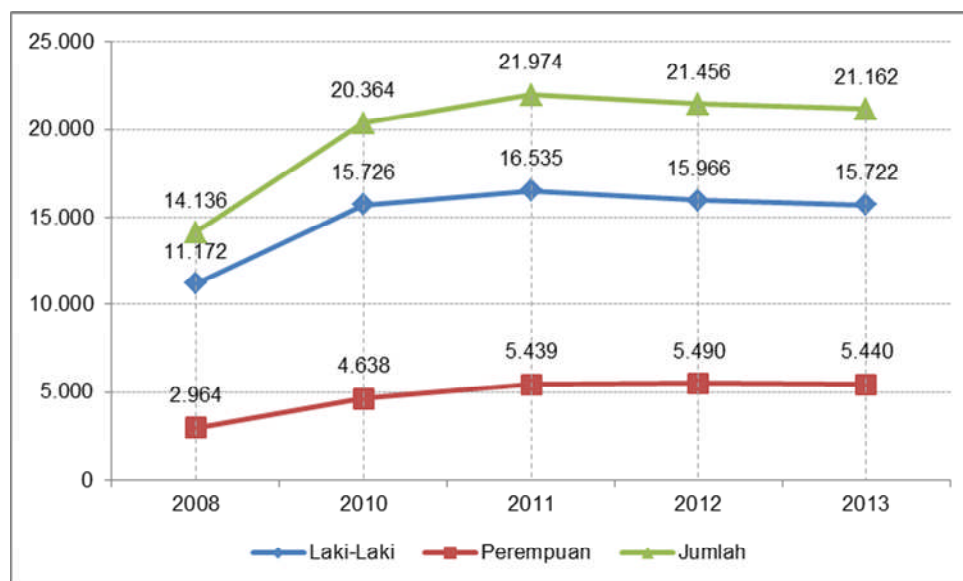
Pr : Perempuan

Data Tahun 2011 Status : 21 Juni 2011

Data Tahun 2012 Status : 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status : 01 April 2013

Gambar 7.1. Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2008 – 2013



Penempatan pegawai Kementerian PU disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja serta prioritas pada bidang tugas pelayanan teknis. Hal ini terlihat dari jumlah pegawai paling banyak berada di tiga unit organisasi yang menjadi fokus kegiatan pembangunan Kementerian PU, yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya. Persentase pegawai pada masing-masing unit organisasi tersebut di Tahun 2013 adalah 36,95%, 34,84% dan 10,54%. Sementara di Ditjen Penataan Ruang, jumlah persentase pegawainya sebanyak 2,75%. Distribusi pegawai berdasarkan unit organisasi dapat dilihat pada Tabel 7.2 dan Gambar 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2. Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2011 – 2013

Unit Organisasi	2011			2012			2013		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	4,57	2,06	6,63	4,31	2,06	6,37	4,38	2,02	6,39
Inspektorat Jenderal	0,69	0,46	1,15	0,65	0,47	1,12	0,60	0,48	1,08
Ditjen Penataan Ruang	1,71	1,10	2,81	1,66	1,09	2,75	1,64	1,11	2,75
Ditjen Sumber Daya Air	29,36	7,09	36,45	29,30	7,52	36,82	29,30	7,65	36,95
Ditjen Bina Marga	25,95	7,99	33,94	26,13	8,21	34,34	26,56	8,28	34,84
Ditjen Cipta Karya	7,20	3,64	10,84	7,02	3,83	10,85	6,75	3,79	10,54
BP Konstruksi	1,55	0,69	2,24	1,37	0,70	2,07	1,22	0,69	1,91
Balitbang	4,22	1,73	5,95	3,98	1,72	5,69	3,85	1,69	5,54
Kementerian PU	75,25	24,75	100,00	74,41	25,59	100,00	74,29	25,71	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki

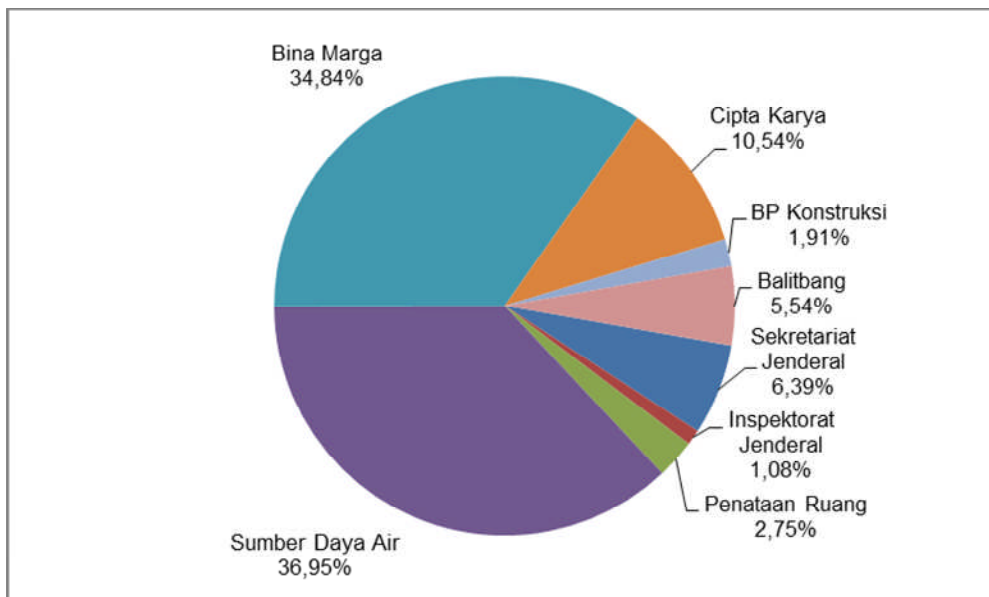
Pr : Perempuan

Data Tahun 2011 Status : 21 Juni 2011

Data Tahun 2012 Status : 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status : 01 April 2013

Gambar 7.2. Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2013



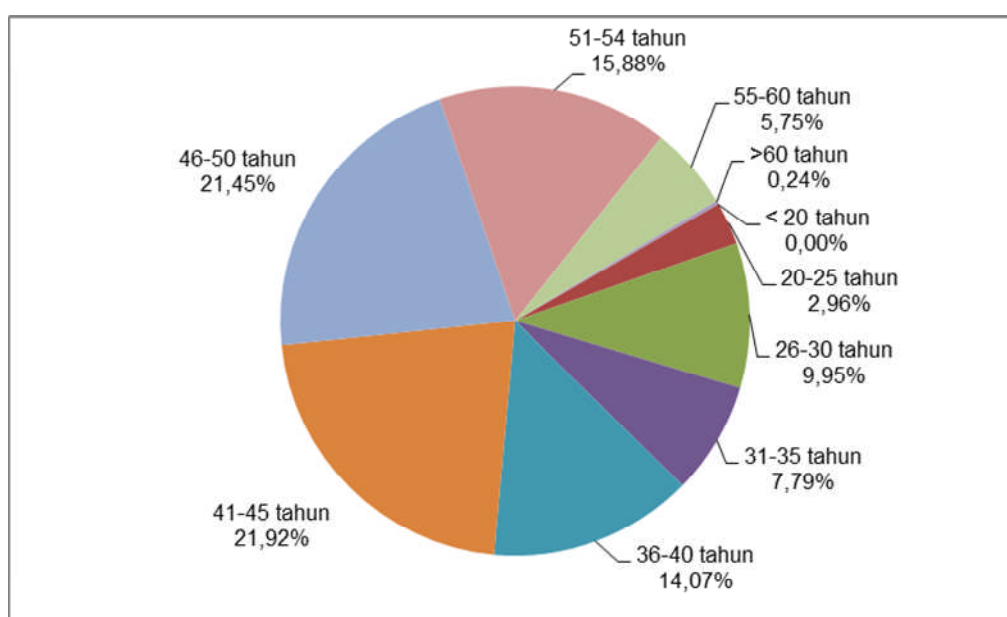
Berdasarkan tingkat usia, pegawai di Kementerian PU pada Tahun 2013 paling banyak berada pada rentang usia 41 hingga 50 tahun, yaitu sebanyak 4.621 orang atau 21,92%, serta 4.523 orang atau 21,45% berusia 46-50 tahun. Terbanyak berikutnya adalah pada rentang usia 51-54 tahun, yaitu 3.348 orang atau 15,88%. Ini menandakan banyak pegawai yang memiliki pengalaman panjang dalam bekerja. Sementara pegawai berusia di bawah 40 tahun terdiri dari 14,07% berusia 36-40 tahun, 7,79% berusia 31-35 tahun, 9,95% berusia 26-30 tahun, dan 2,96% berusia 20-25 tahun. Komposisi pegawai berdasarkan usia perlu diperhatikan karena berkaitan dengan produktivitas dan regenerasi suatu institusi. Pegawai dengan pengalaman yang lebih banyak diharapkan dapat lebih mengarahkan dan membina generasi yang lebih muda, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mempersiapkan penerus berikutnya. Komposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 7.3 dan Gambar 7.3 di bawah ini.

Tabel 7.3. Jumlah PNS Kementerian PU Menurut Usia dan Golongan Kepangkatan
Status : 1 April 2013

Golongan	Usia (tahun)										Jumlah
	< 20	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-54	55-60	>60	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV/E	0	0	0	0	0	0	1	0	14	12	27
IV/D	0	0	0	0	0	0	0	6	48	11	65
IV/C	0	0	0	0	0	1	4	18	73	9	105
IV/B	0	0	0	0	0	10	48	134	175	12	379
IV/A	0	0	0	2	7	72	210	220	215	4	730
III/D	0	0	0	4	56	167	269	387	175	1	1.059
III/C	0	0	9	116	174	165	228	277	109	0	1.078
III/B	0	3	209	494	263	386	656	716	281	0	3.008
III/A	0	457	1.583	482	759	1.009	623	188	45	1	5.147
II/D	0	1	0	2	6	14	38	35	15	0	111
II/C	0	162	244	27	82	172	203	68	20	1	979
II/B	0	0	4	17	97	462	529	289	8	0	1.406
II/A	0	2	25	410	1.262	1.778	1.213	516	25	0	5.231
I/D	0	0	0	1	10	27	62	44	3	0	147
I/C	0	0	15	62	170	236	224	126	5	0	838
I/B	0	0	0	1	13	25	52	87	1	0	179
I/A	0	0	9	24	67	97	163	237	0	0	597
CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	625	2.098	1.642	2.966	4.621	4.523	3.348	1.212	51	21.086

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Gambar 7.3. Persentase PNS Kementerian PU Menurut Usia Tahun 2013



Dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai Kementerian PU pada Tahun 2013 yang sudah menjadi Golongan IV berjumlah 1.299 orang atau 6,15% dari seluruh jumlah pegawai. Kemudian yang termasuk dalam Golongan III ada sebanyak 10.297 orang atau 48,76%, serta Golongan II dan Golongan I sebanyak 9.522 orang atau 45,09%.

Tabel 7.4. Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan
Status : 1 April 2013

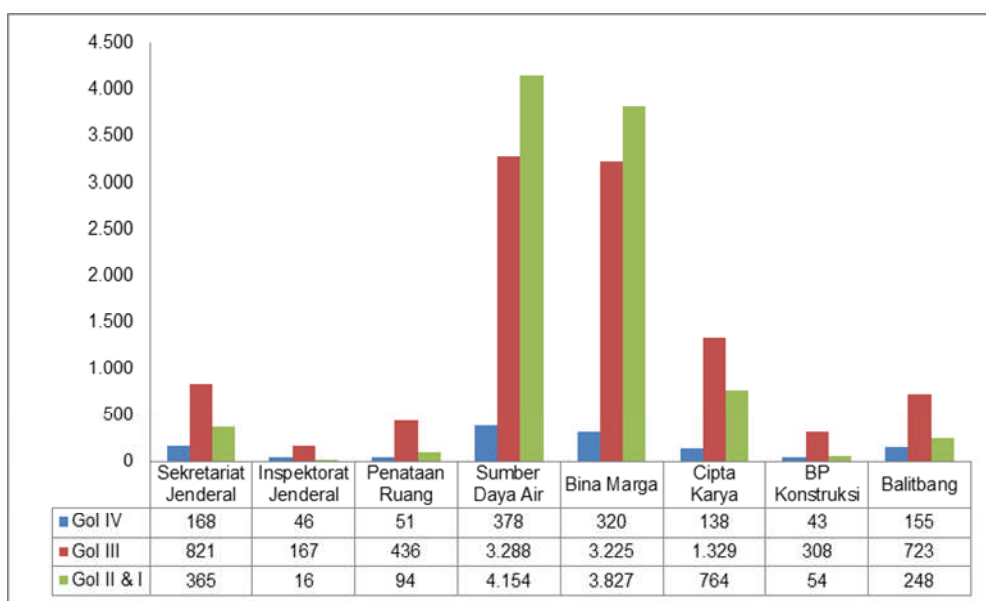
Unit Organisasi	Golongan IV			Golongan III			Golongan II dan I			Jumlah
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sekretariat Jenderal	118	50	168	517	304	821	292	73	365	1.354
Inspektorat Jenderal	33	13	46	84	83	167	11	5	16	229
Ditjen Penataan Ruang	41	10	51	233	203	436	73	21	94	581
Ditjen Sumber Daya Air	347	31	378	2.379	909	3.288	3.474	680	4.154	7.820
Ditjen Bina Marga	297	23	320	2.305	920	3.225	3.018	809	3.827	7.372
Ditjen Cipta Karya	114	24	138	752	577	1.329	562	202	764	2.231
BP Konstruksi	37	6	43	186	122	308	36	18	54	405
Balitbang	112	43	155	486	237	723	206	42	248	1.126
Kementerian PU	1.099	200	1.299	6.942	3.355	10.297	7.672	1.850	9.522	21.118

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki

Pr : Perempuan

Gambar 7.4. Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2013



Tabel 7.5. Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan
Status : 1 April 2013

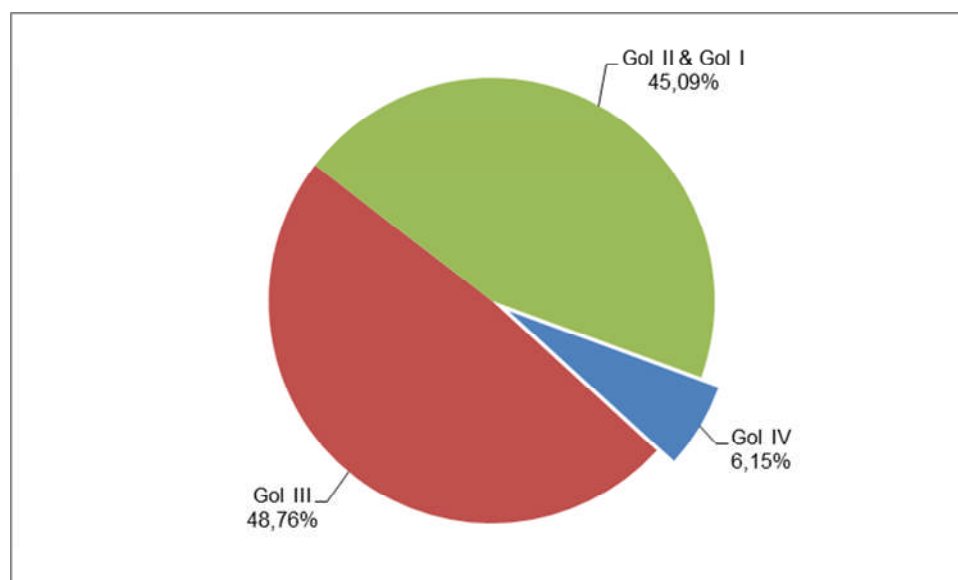
Unit Organisasi	Golongan IV			Golongan III			Golongan II dan I			Jumlah
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sekretariat Jenderal	0,56	0,24	0,80	2,45	1,44	3,89	1,38	0,35	1,73	6,41
Inspektorat Jenderal	0,16	0,06	0,22	0,40	0,39	0,79	0,05	0,02	0,08	1,08
Ditjen Penataan Ruang	0,19	0,05	0,24	1,10	0,96	2,06	0,35	0,10	0,45	2,75
Ditjen Sumber Daya Air	1,64	0,15	1,79	11,27	4,30	15,57	16,45	3,22	19,67	37,03
Ditjen Bina Marga	1,41	0,11	1,52	10,91	4,36	15,27	14,29	3,83	18,12	34,91
Ditjen Cipta Karya	0,54	0,11	0,65	3,56	2,73	6,29	2,66	0,96	3,62	10,56
BP Konstruksi	0,18	0,03	0,20	0,88	0,58	1,46	0,17	0,09	0,26	1,92
Balitbang	0,53	0,20	0,73	2,30	1,12	3,42	0,98	0,20	1,17	5,33
Kementerian PU	5,20	0,95	6,15	32,87	15,89	48,76	36,33	8,76	45,09	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki

Pr : Perempuan

Gambar 7.5. Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan
Tahun 2013



Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, begitu pula di Kementerian PU. Meskipun bukan satu-satunya parameter untuk mengukur kualitas SDM, namun pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas seseorang.

Berkaitan dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan, jumlah SDM di Kementerian PU pada Tahun 2013 yang menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang SLTA atau kurang berjumlah 10.233 orang atau 48,37%; D1-D3 1.088 orang atau 5,14%; D4/S1 7.649 orang atau 36,16%; S2 2.120 orang atau 10,02%; dan S3 65 orang atau 0,31%.

Setelah dilakukan penerimaan secara *online* beberapa tahun terakhir, jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan D4/S1 dan D3 mengalami peningkatan sesuai dengan persyaratan penerimaan yang dibutuhkan. Selain itu peningkatan juga terjadi pada jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan S2 yang pada Tahun 2012 berjumlah 2.004 orang menjadi 2.120 orang di Tahun 2013, serta jenjang pendidikan S3 dari 63 orang menjadi 65 orang. Data mengenai jumlah serta persentase pegawai Kementerian PU menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan seperti terdapat pada Tabel 7.6 dan 7.7 serta Gambar 7.6 dan 7.7 di bawah ini.

Tabel 7.6. Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2012 dan 2013

Pendidikan Terakhir Ditamatkan	2012			2013		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7
SLTA atau kurang	8.667	2.029	10.696	8.331	1.902	10.233
D1 - D3	713	388	1.101	708	380	1.088
D4/S1	4.820	2.595	7.415	4.970	2.679	7.649
S2	1.561	443	2.004	1.647	473	2.120
S3	59	4	63	61	4	65
Jumlah	15.820	5.459	21.279	15.717	5.438	21.155

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

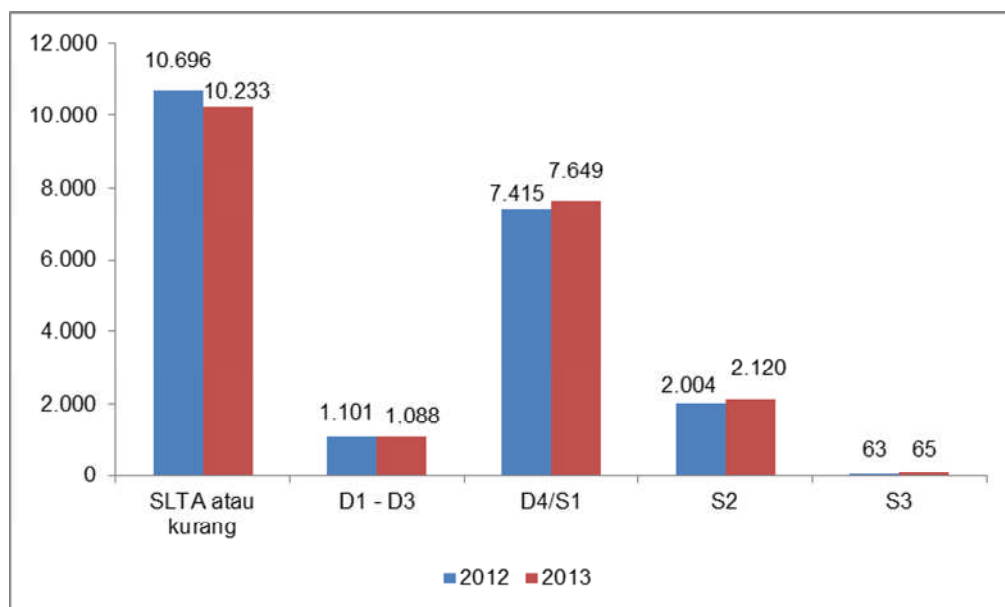
Catatan : Lk : Laki-Laki

Pr : Perempuan

Data Tahun 2012 Status : 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status : 01 April 2013

Gambar 7.6. Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2012 dan 2013



Tabel 7.7. Persentase SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2012 dan 2013

Pendidikan Terakhir Ditamatkan	2012				2013		
	Lk	Pr	Lk + Pr		Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4		5	6	7
SLTA atau kurang	40,73	9,54	50,27		39,38	8,99	48,37
D1 - D3	3,35	1,82	5,17		3,35	1,80	5,14
D4/S1	22,65	12,20	34,85		23,49	12,66	36,16
S2	7,34	2,08	9,42		7,79	2,24	10,02
S3	0,28	0,02	0,30		0,29	0,02	0,31
Jumlah	74,35	25,65	100,00		74,29	25,71	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

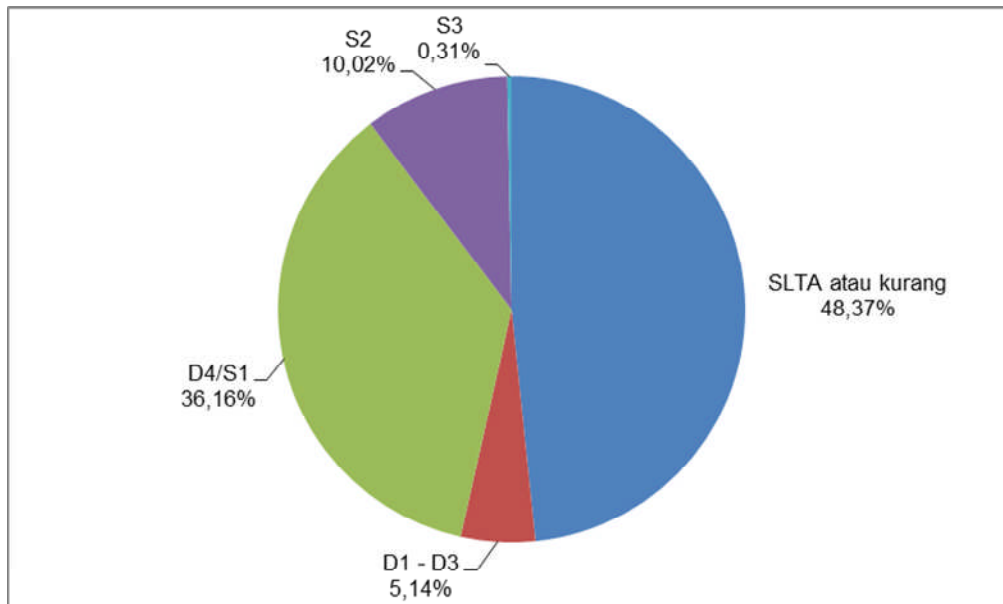
Catatan : Lk : Laki-Laki

Pr : Perempuan

Data Tahun 2012 Status : 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status : 01 April 2013

Gambar 7.7. Persentase SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2013



B. Isu Gender

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, lanjut usia, remaja putra dan putri, maupun anak usia dini. Apabila hasil pembangunan belum termanfaatkan secara setara dan adil oleh kaum laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat yang diterima.

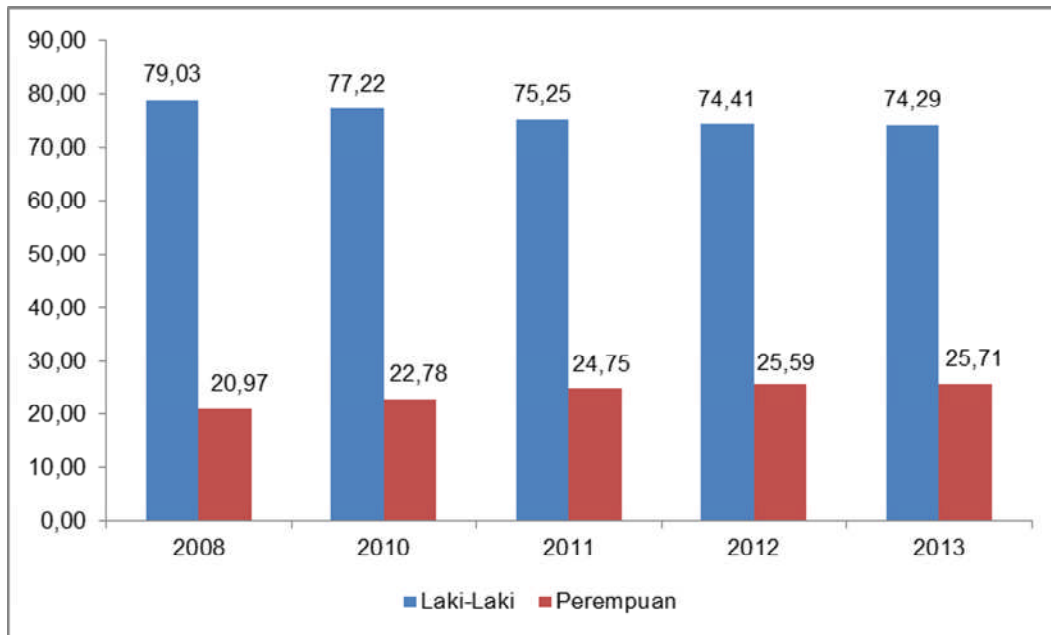
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Secara umum tujuan PUG adalah memastikan perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM) yang sama atas

pembangunan. Perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Sesuai dengan salah satu strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2010-2014, pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen Kementerian PU yang akan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Konsep setara dan adil harus menjadi pegangan setiap tahapan kegiatan dimana setara berarti seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi). Sementara adil dapat diartikan sebagai tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) maupun laki-laki.

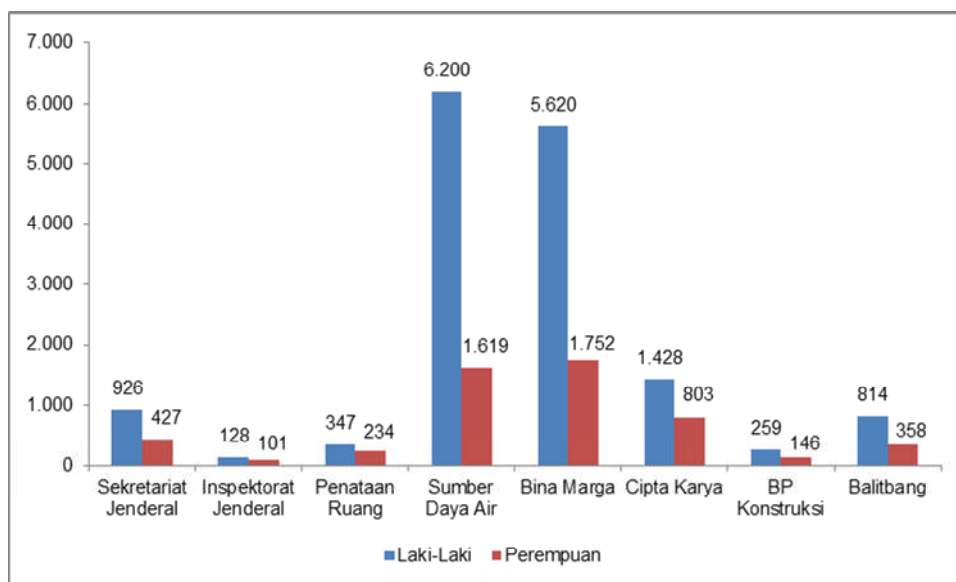
Keterlibatan perempuan dalam kegiatan bidang Pekerjaan Umum salah satunya terlihat dari jumlah pegawai di Kementerian PU. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan di Kementerian PU hanya berkisar seperempat dari jumlah pegawai keseluruhan, namun menunjukkan peningkatan dari Tahun 2008 yang tercatat 20,97% menjadi 25,71% di Tahun 2013. Sementara persentase laki-laki di Tahun 2013 tercatat 74,29%.

Gambar 7.8. Persentase SDM Kementerian PU
Tahun 2008 – 2013

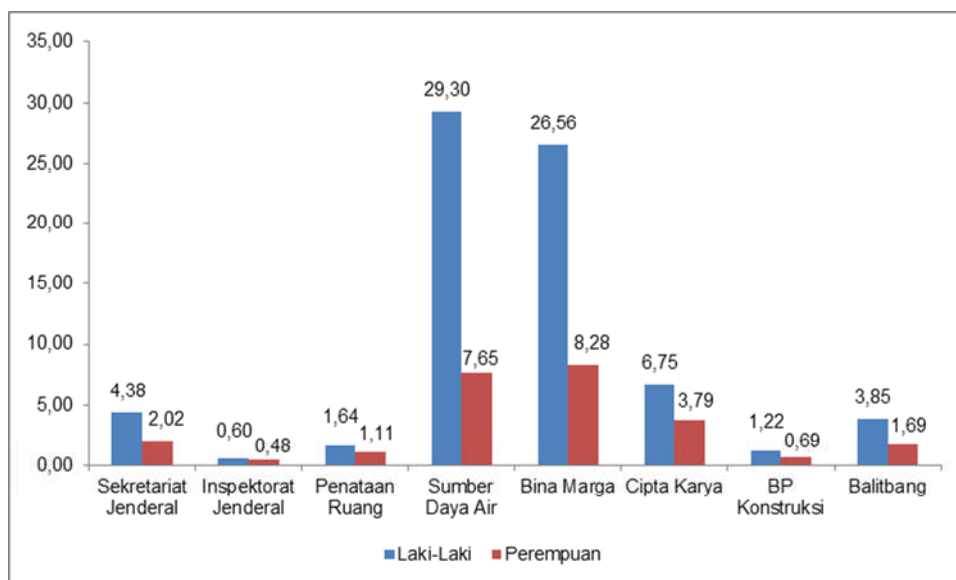


Jumlah pegawai perempuan pada unit organisasi mengikuti distribusi pegawai secara keseluruhan. Namun dari persentase, pegawai perempuan paling banyak berada di Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 8,28% atau sebanyak 1.752 orang, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan 7,65% atau 1.619 orang, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya 3,79% atau 803 orang. Sementara pegawai laki-laki paling banyak berturut-turut berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan 29,30% atau 6.200 orang, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 26,56% atau 5.620 orang, Direktorat Jenderal dan Cipta Karya dengan 6,75% atau 1.428 orang.

Gambar 7.9. Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013

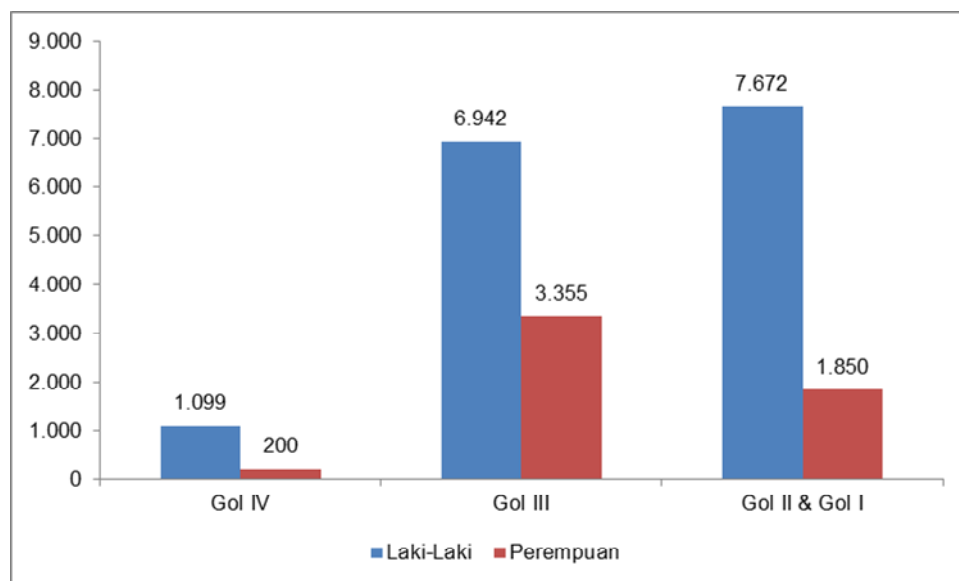


Gambar 7.10. Persentase SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013

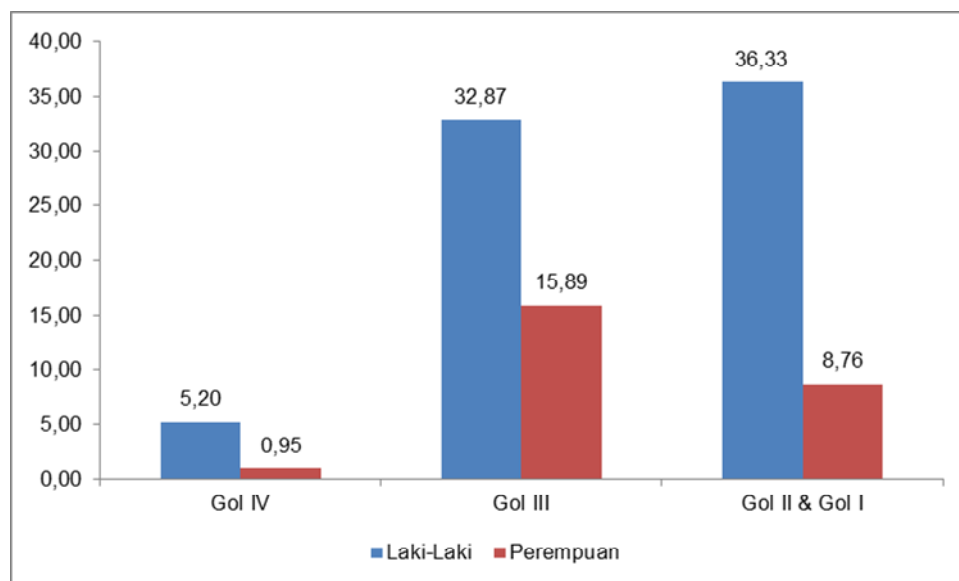


Jika dilihat dari tingkat golongan kepangkatan, pegawai perempuan di Kementerian PU pada Tahun 2013 yang sudah masuk Golongan IV ada sebanyak 200 orang atau 0,95%, Golongan III 3.355 orang atau 15,89%, serta Golongan II dan Golongan I sebanyak 1.850 orang atau 8,76%.

Gambar 7.11. Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2013



Gambar 7.12. Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2013



Keterlibatan kaum perempuan dalam proses pembangunan, khususnya sebagai pegambil kebijakan, salah satunya terlihat dari jumlah perempuan yang menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Di Kementerian PU, meskipun jumlah laki-laki yang menduduki jabatan lebih banyak, sesuai dengan persentase pegawai laki-laki yang juga lebih banyak, namun kaum perempuan tetap mendapat peran sesuai dengan kapasitasnya.

Komposisi pejabat di Kementerian PU mengalami perubahan seiring dengan terjadinya mutasi, reorganisasi maupun pergantian karena purnabakti. Pada Tahun 2013, ada sebanyak 1.354 pejabat yang menduduki jabatan Eselon I hingga Eselon IV. Jumlah tersebut terdiri dari 1.049 pejabat laki-laki dan 305 pejabat perempuan. Atau secara persentase, komposisi pejabat di Kementerian PU di Tahun 2013 terdiri dari 77,47% laki-laki dan 22,53% perempuan. Persentase perempuan yang menjabat juga meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 22,24%.

Tabel 7.8. Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2011 – 2013

Unit Organisasi	2011			2012			2013		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	150	66	216	144	64	208	166	61	227
Inspektorat Jenderal	13	8	21	15	9	24	15	9	24
Ditjen Penataan Ruang	70	38	108	65	36	101	69	38	107
Ditjen Sumber Daya Air	343	53	396	324	48	372	333	59	392
Ditjen Bina Marga	223	31	254	212	34	246	214	40	254
Ditjen Cipta Karya	79	40	119	74	42	116	69	40	109
BP Konstruksi	78	16	94	74	17	91	74	19	93
Balitbang	108	41	149	106	40	146	109	39	148
Kementerian PU	1.064	293	1.357	1.014	290	1.304	1.049	305	1.354

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki

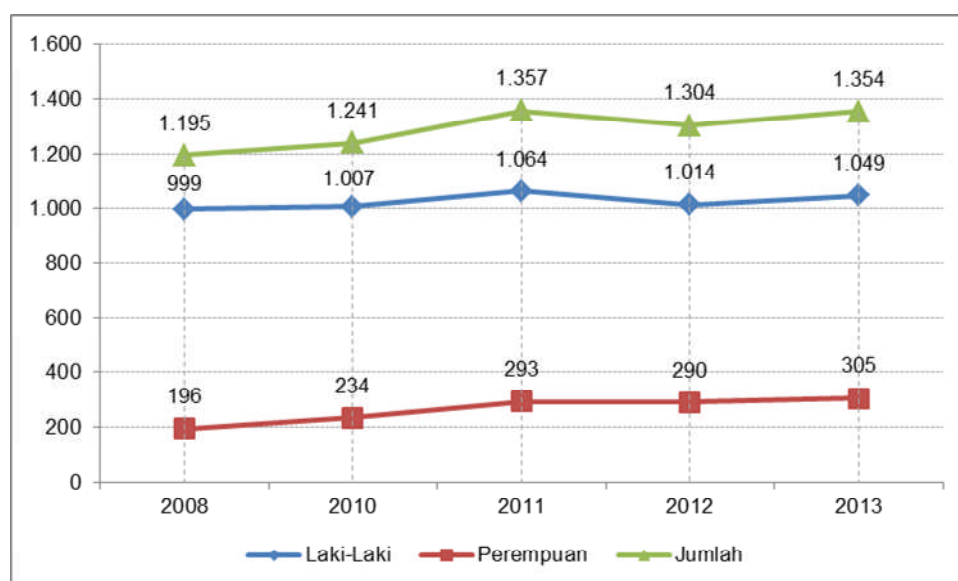
Pr : Perempuan

Data Tahun 2011 Status : 21 Juni 2011

Data Tahun 2012 Status : 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status : 01 April 2013

Gambar 7.13. Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2008 – 2013



Tabel 7.9. Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2011 – 2013

Unit Organisasi	2011			2012			2013		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	11,05	4,86	15,92	11,04	4,91	15,95	12,26	4,51	16,77
Inspektorat Jenderal	0,96	0,59	1,55	1,15	0,69	1,84	1,11	0,66	1,77
Ditjen Penataan Ruang	5,16	2,80	7,96	4,98	2,76	7,75	5,10	2,81	7,90
Ditjen Sumber Daya Air	25,28	3,91	29,18	24,85	3,68	28,53	24,59	4,36	28,95
Ditjen Bina Marga	16,43	2,28	18,72	16,26	2,61	18,87	15,81	2,95	18,76
Ditjen Cipta Karya	5,82	2,95	8,77	5,67	3,22	8,90	5,10	2,95	8,05
BP Konstruksi	5,75	1,18	6,93	5,67	1,30	6,98	5,47	1,40	6,87
Balitbang	7,96	3,02	10,98	8,13	3,07	11,20	8,05	2,88	10,93
Kementerian PU	78,41	21,59	100,00	77,76	22,24	100,00	77,47	22,53	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki

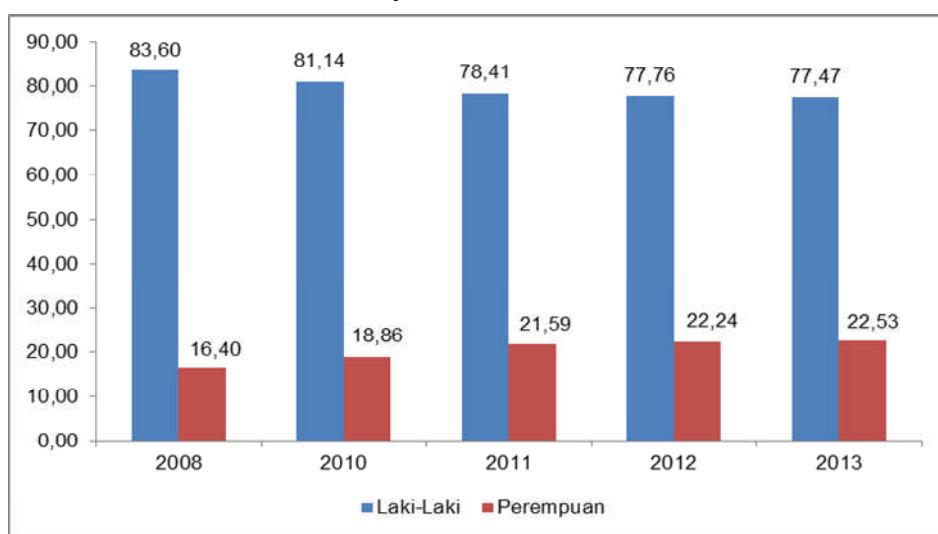
Pr : Perempuan

Data Tahun 2011 Status : 21 Juni 2011

Data Tahun 2012 Status : 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status : 01 April 2013

Gambar 7.14. Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2008 – 2013



Dari Gambar 7.15 terlihat bahwa pejabat perempuan paling banyak berada di Sekretariat Jenderal, yaitu 61 orang atau 4,51% dari jumlah seluruh pejabat di Kementerian PU. Pejabat perempuan paling banyak berikutnya terdapat di Ditjen Sumber Daya Air, yaitu sebanyak 59 orang atau 4,36%. Sementara pejabat laki-laki paling banyak berada di Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga dengan persentase masing-masing 24,59% dan 15,81%.

Tabel 7.10. Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon
Status : 1 April 2013

Unit Organisasi	Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sekretariat Jenderal	7	0	7	10	1	11	44	12	56	105	48	153
Inspektorat Jenderal	1	0	1	5	1	6	3	1	4	6	7	13
Ditjen Penataan Ruang	1	0	1	5	1	6	24	6	30	39	31	70
Ditjen Sumber Daya Air	1	0	1	19	0	19	101	8	109	212	51	263
Ditjen Bina Marga	1	0	1	15	0	15	68	4	72	130	36	166
Ditjen Cipta Karya	1	0	1	7	0	7	25	10	35	36	30	66
BP Konstruksi	1	0	1	5	0	5	21	6	27	47	13	60
Balitbang	1	0	1	3	2	5	34	8	42	71	29	100
Kementerian PU	14	0	14	69	5	74	320	55	375	646	245	891

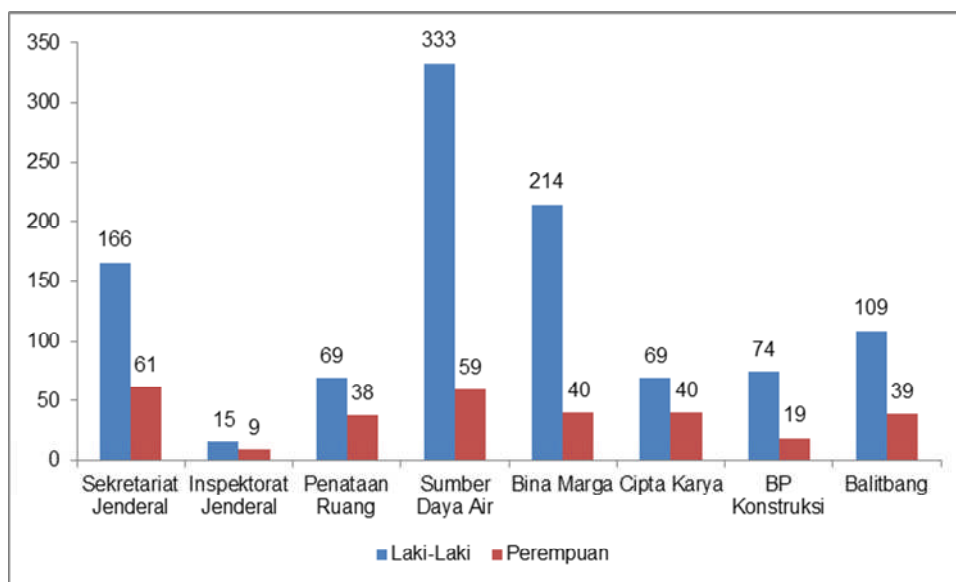
Sumber : Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki

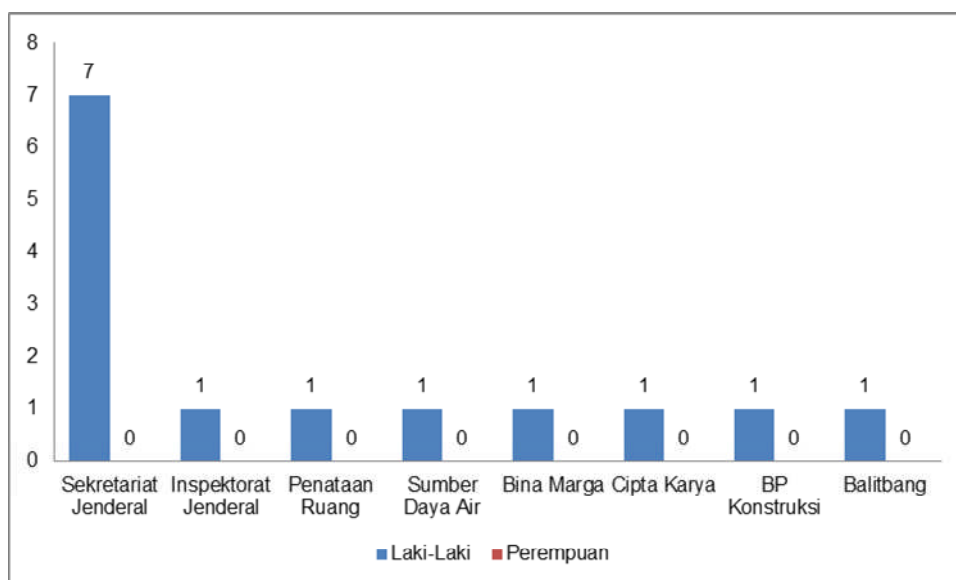
Pr : Perempuan

Data Tahun 2013 Status : 01 April 2013

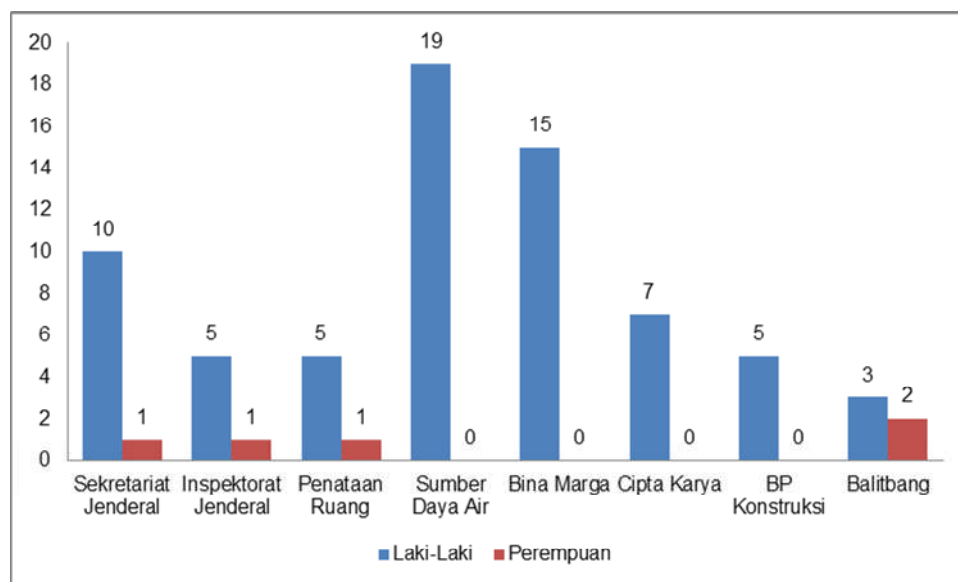
Gambar 7.15. Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013



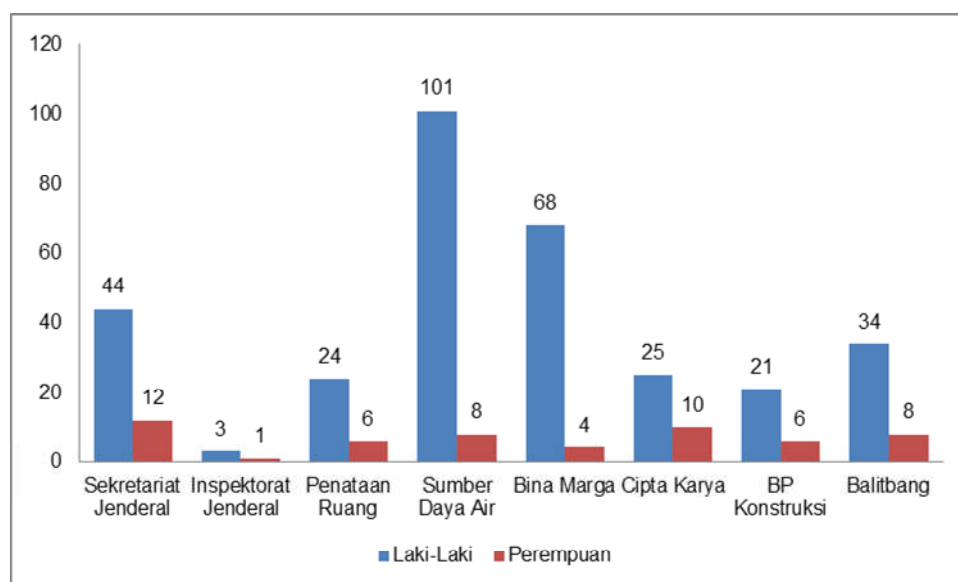
Gambar 7.16. Jumlah Pejabat Eselon I Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013



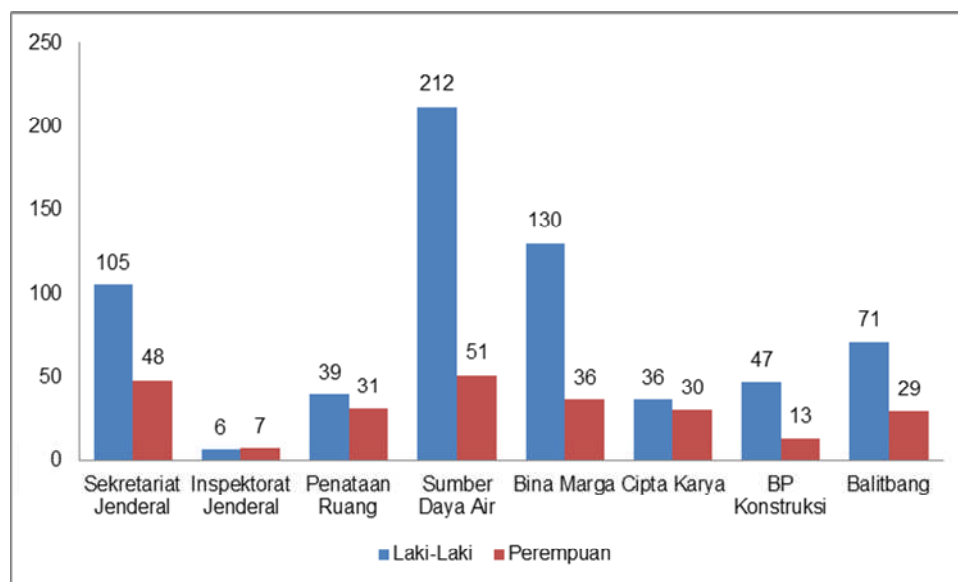
Gambar 7.17. Jumlah Pejabat Eselon II Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013



Gambar 7.18. Jumlah Pejabat Eselon III Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013



Gambar 7.19. Jumlah Pejabat Eselon IV Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013



Tabel 7.11a. Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 1 April 2013

Unit Organisasi	Eselon I			Eselon II			Eselon III		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sekretariat Jenderal	0,52	0,00	0,52	0,74	0,07	0,81	3,25	0,89	4,14
Inspektorat Jenderal	0,07	0,00	0,07	0,37	0,07	0,44	0,22	0,07	0,30
Ditjen Penataan Ruang	0,07	0,00	0,07	0,37	0,07	0,44	1,77	0,44	2,22
Ditjen Sumber Daya Air	0,07	0,00	0,07	1,40	0,00	1,40	7,46	0,59	8,05
Ditjen Bina Marga	0,07	0,00	0,07	1,11	0,00	1,11	5,02	0,30	5,32
Ditjen Cipta Karya	0,07	0,00	0,07	0,52	0,00	0,52	1,85	0,74	2,58
BP Konstruksi	0,07	0,00	0,07	0,37	0,00	0,37	1,55	0,44	1,99
Balitbang	0,07	0,00	0,07	0,22	0,15	0,37	2,51	0,59	3,10
Kementerian PU	1,03	0,00	1,03	5,10	0,37	5,47	23,63	4,06	27,70

Tabel 7.11b. Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon
Status : 1 April 2013

Unit Organisasi	Eselon IV			Jumlah		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	11	12	13	14	15	16
Sekretariat Jenderal	7,75	3,55	11,30	12,26	4,51	16,77
Inspektorat Jenderal	0,44	0,52	0,96	1,11	0,66	1,77
Ditjen Penataan Ruang	2,88	2,29	5,17	5,10	2,81	7,90
Ditjen Sumber Daya Air	15,66	3,77	19,42	24,59	4,36	28,95
Ditjen Bina Marga	9,60	2,66	12,26	15,81	2,95	18,76
Ditjen Cipta Karya	2,66	2,22	4,87	5,10	2,95	8,05
BP Konstruksi	3,47	0,96	4,43	5,47	1,40	6,87
Balitbang	5,24	2,14	7,39	8,05	2,88	10,93
Kementerian PU	47,71	18,09	65,81	77,47	22,53	100,00

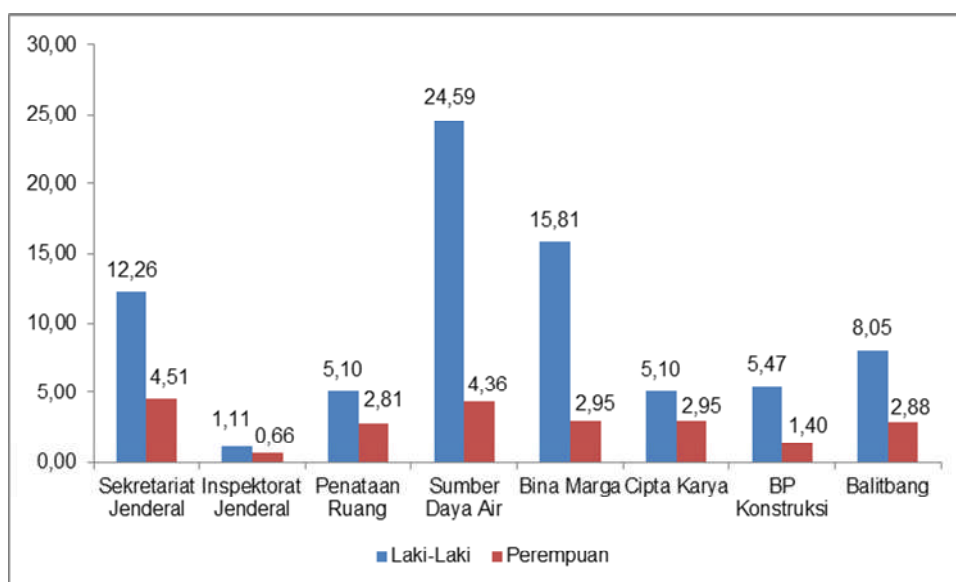
Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PU

Catatan: Lk: Laki-Laki

Pr: Perempuan

Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013

Gambar 7.20. Persentase Pejabat (Eselon I – Eselon IV) Kementerian PU
Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2013



BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi hasil pembangunan bidang prasarana dan sarana ke-PU-an, Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) dapat digunakan sebagai dukungan data dan informasi dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di Lingkungan Kementerian PU untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan. BIS-PU diharapkan juga dapat melengkapi serta memberikan data dan informasi ke-PU-an tingkat nasional dalam sajian yang lebih mudah untuk digunakan oleh *stakeholder* dan masyarakat.

Rintisan BIS-PU dimulai pada Tahun 2003 dengan nama Buku Penyediaan Informasi Statistik Prasarana Kimpraswil. Pada Tahun 2006 BIS-PU berganti nama menjadi Buku Induk Kestatistikan dan pada Tahun 2007 menjadi Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum. Di Tahun 2012, digunakan nama Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) yang dibuat dengan format yang berbeda dalam hal penekanan pada informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PU-an beserta beberapa dokumentasinya. Kemudian di Tahun 2013 BIS-PU dibuat dengan format data agregat menurut provinsi dan diupayakan urut beberapa tahun. Selain dalam format buku, informasi dalam BIS-PU juga dapat dilihat dalam format digital *e-book* melalui media *Dashboard* Data Literal Infrastruktur Pekerjaan Umum pada portal PU-net.

Pusdata telah berupaya maksimal dalam menyediakan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi dalam mendukung manajemen Kementerian Pekerjaan Umum untuk tingkat nasional secara lengkap. Namun demikian, upaya tersebut masih dirasakan belum dapat memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang senantiasa dinamis keragaman jenisnya dan meningkat jumlah pengguna informasinya.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan data dan informasi mengenai infrastruktur PU di tingkat nasional dapat tersedia dengan lebih terstruktur, lengkap dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk keperluan dukungan dan referensi data dan informasi.

Lebih jauh, dengan diterbitkannya BIS-PU ini diharapkan dapat terjadi peningkatan kerjasama antar unit kerja di dalam dan di luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga jaringan kerjasama dalam pertukaran data dan informasi berjalan secara mutual dan dapat saling melengkapi untuk dapat digunakan sebagai masukan kegiatan dan dapat menghasilkan *outcome* yang bermanfaat dalam rangkaian dukungan informasi bagi pembangunan nasional.



**STATISTIK
PEKERJAAN UMUM**

www.pu.go.id/site/view/72

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp. 021-7392262